

Reforma agraria sebagai salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus digalakkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan menekan angka ketimpangan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah. Pada tahun 2021 ini Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) mengangkat tema penelitian sistematis berupa Pemetaan Potensi Reforma Agraria di Pawonsari/Pacitan-Wonogiri-Wonosari. Pada tahap pertama pemetaan potensi guna mendorong program Reforma Agraria dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul (Wonosari). Untuk merepresentasikan kondisi wilayah, kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat maka sampling lokasi dilakukan pada beberapa Desa mencakup: Desa Nglanggeran, Desa Bleberan, Desa Girikarto, Desa Kanigoro, Desa Tepus, Desa Candirejo, Desa Bejiharjo, Desa Kemadang, Desa Jepitu dan Desa Pucung.

Pemetaan potensi wilayah guna mendorong kebijakan Reforma Agraria ini menunjukkan bahwa potensi beberapa desa di Gunungkidul dari aspek fisik, pariwisata, pertanian, perikanan sangat potensial, akan tetapi masih terbatasnya pendampingan serta terbatasnya sarana prasarana menjadikan potensi yang ada belum secara optimal dikembangkan. Reforma agraria sebagai salah satu kebijakan untuk mengoptimalkan akses beserta pengembangan kapasitas serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat harapannya mampu mengembangkan potensi yang ada guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Karya beberapa peneliti ini harapannya mampu memetakan potensi wilayah yang ada sehingga perencanaan reforma agraria dan perencanaan program pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.



STPN Press Bekerja sama dengan PPPM-STPN
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta
Tlp. 0274-587529

ISBN: 978-602-7894-41-9



9 786027 894419

BERBENAH UNTUK MASA DEPAN INDONESIA:

Penyunting: Widhiana Hestining Puri, dkk.



PENYUNTING : WIDHIANA HESTINING PURI
WESTI UTAMI
ARISTONO NUGROHO

PENGEMBANGAN REFORMA AGRARIA GUNUNG KIDUL

Hasil Penelitian Sistematis 2021

**PENGEMBANGAN
REFORMA AGRARIA
GUNUNG KIDUL**

PENGEMBANGAN REFORMA AGRARIA GUNUNG KIDUL

Penulis:

Ardhi Arnanto	Sugiharto
Aristiono Nugroho	Sugiasih
Asih Retno Dewi	Sukmo Pinuji
Dwi Wulan Pujiriyani	Sri Kistiyah
Elsa Widura	Trisnanti Widi R
Priyo Katon Prasetyo	Tunjung Fitra Wijanarko
Prasetyo Bayu Nugroho	Widhiana Hestining Puri

Penyunting:

Widhiana Hestining Puri, Westi Utami,
Aristiono Nugroho

STPN Press, 2021

**Pengembangan
Reforma Agraria Gunung Kidul**

©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
STPN Press, Desember 2021

Bekerja sama dengan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping,
Sleman Yogyakarta, 55293,
Tlp. (0274) 587239
Faxs: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Penulis:

Ardhi Arnanto, Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi, Dwi Wulan Pujiriyani,
Elsa Widura, Priyo Katon Prasetyo, Prasetyo Bayu Nugroho, Sugiharto,
Sugiasih, Sukmo Pinuji, Sri Kistiyah, Trisnanti Widi R, Tunjung Fitra
Wijanarko, Widhiana Hestining Puri

Penyunting:

Widhiana Hestining Puri, Westi Utami, Aristiono Nugroho
Layout dan Cover: Tim STPN Press

Pengembangan Reforma Agraria Gunung Kidul
STPN Press, 2021
xii + 152 hlm.: 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-41-9

Tidak diperjualbelikan
diperbanyak untuk
kepentingan pendidikan
dan kalangan sendiri



SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha kuasa atas segala yang ada di bumi dan langit, tiada sesuatupun dapat terjadi tanpa perkenannya. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional telah menuntaskan agenda penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjadi tugas besarnya. Hulu dari kegiatan tersebut salah satunya adalah publikasi atas hasil penelitian sebagaimana tersaji dalam buku monografi ini.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *"research"* yang berasal dari kata *"re"*, yang berarti kembali dan *"to search"*, yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu. Hilir penelitian adalah adanya diseminasi hasil penelitian yang harapannya menjadi ajang aktualisasi diri dari peneliti, ekspose hasil penelitian, menjadi umpan balik dalam kegiatan pembelajaran melalui pengayaan atas bahan ajar yang senantiasa update, serta kajian yang berbobot dalam paper kebijakan untuk memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan.

Penelitian Sistematis PPPM STPN Tahun 2021 ini berfokus pada agenda Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada pengembangan Kawasan strategis PAWONSARI yang meliputi Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari. Sebagai tahap awal kajian ini diawali dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan wilayah pesisir selatan DIY. Penelitian Sistematis

merupakan skema yang dikembangkan oleh PPPM dalam rangka merespon dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap isu-isu dan program strategis nasional utama dari kementerian. Budaya penelitian yang dikembangkan PPPM merupakan alur proses yang terkontrol dari hulu sampai hilir. Proses seleksi proposal, progress report, seminar hasil, dan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk naskah buku dan/ jurnal menjadi instrumen dalam mengontrol proses dan substansi dalam penelitian.

Pada Penelitian Sistematis ini terdapat 9 (sembilan) tim penelitian yang di turunkan di 10 desa yang tersebar di Kabupaten Gunung Kidul. Sembilan tim tersebut masing-masing berada di lokasi Desa Girikerto, Desa Kemadang, Desa Jepitu, Desa Kanigoro, Desa Nglangeran dan Desa Bleberan, Desa Pucung, Desa Bejiharjo, Desa Candirejo, dan Desa Tepus. Penelitian-penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi-potensi yang ada di masing-masing desa dalam rangka merumuskan konsep pengembangan reforma agraria bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi masing-masing desa yang dimiliki terbagi atas sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia. Kekayaan yang dimiliki tiap daerah ini menjadi modal penting dalam rangka pengembangan di masa yang akan datang.

STPN mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Penelitian Sistematis tahun ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dalam pelaksanaan seminar hasil Penelitian Sistematis yaitu Bp. A. Harry Sukmono, S.T., selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul dan Bp. Ir. Budi Martono, M.Si. selaku General Manager Gunung Sewu. Kepada pemerintah Kab. Gunung Kidul khususnya para pimpinan OPD serta stakeholder lainnya yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian. Kepada seluruh dosen dan/ peneliti STPN atas partisipasi dan kontribusinya dalam kegiatan penelitian STPN. Kesiadaan dan keikhlasan hati para dosen dan/peneliti untuk aktif terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan paper kebijakan/ policy brief

merupakan wujud tanggung jawabnya terhadap tridharma perguruan tinggi. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada jajaran manajer dan staf PPPM atas kerja keras dan integritasnya. Semoga goresan tinta yang ditorehkan para penulis dalam buku ini menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, Desember 2021
Ketua STPN,

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.

PENGANTAR PENYUNTING

Reforma agraria sebagai salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus digalakkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan menekan angka ketimpangan terhadap kepemilikan, penguasaan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah. Pada tahun 2021 ini Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) mengangkat tema penelitian sistematis berupa Pemetaan Potensi Reforma Agraria di Pawonsari/Pacitan-Wonogiri-Wonosari. Pada tahap pertama pemetaan potensi guna mendorong program Reforma Agraria dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul (Wonosari). Untuk merepresentasikan kondisi wilayah, kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat maka sampling lokasi dilakukan pada beberapa Desa mencakup: Desa Nglanggeran, Desa Bleberan, Desa Girikarto, Desa Kanigoro, Desa Tepus, Desa Candirejo, Desa Bejiharjo, Desa Kemadang, Desa Jepitu dan Desa Pucung. Dalam monografi ini disajikan beberapa hasil kajian pada 5 desa mencakup:

1. Pengembangan Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah di Desa Kemadang, Gunungkidul
2. Pengembangan Reforma Agraria Berbasis Potensi di Desa Kanigoro, Gunungkidul.
3. Pembangunan Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah di Kelurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk dan Kelurahan Bleberan Kapanewon Playen.
4. Solusi Sosio Ekologis dalam bingkai reforma agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pucung kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
5. Konsep Pembangunan Desa berbasis Potensi Wilayah di Kelurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul.

Pemetaan potensi wilayah guna mendorong kebijakan Reforma Agraria ini menunjukkan bahwa potensi beberapa desa di Gunungkidul dari aspek fisik, pariwisata, pertanian, perikanan sangat potensial, akan tetapi masih terbatasnya pendampingan serta terbatasnya sarana prasarana menjadikan potensi yang ada belum secara optimal dikembangkan. Reforma agraria sebagai salah satu kebijakan untuk mengoptimalkan akses beserta pengembangan kapasitas serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat harapannya mampu mengembangkan potensi yang ada guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Karya beberapa peneliti ini harapannya mampu memetakan potensi wilayah yang ada sehingga perencanaan reforma agraria dan perencanaan program pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selamat Membaca

Tim Editor

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	v
Pengantar Penyunting	ix
Pengembangan Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah di Desa Kemadang, Gunungkidul	1
<i>Widhiana Hestining Puri, Asih Retno Dewi, Elsa Widura, Sugiharto</i>	
Pengembangan Reforma Agraria Berbasis Potensi di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul	32
<i>Dwi Wulan Pujiriyani dan Ageliyah Juliani</i>	
Pembangunan Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Di Kalurahan Nglanggeran – Kapanewonan Patuk-Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Bleberan-Kapanewonan Playen Kabupaten Gunungkidul	58
<i>Sukmo Pinuji, Trisnanti Widi Rineksi, Sri Kistiyah</i>	
Solusi Sosio Ekologis dalam Bingkai Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul	88
<i>Aristiono Nugroho, Sugiasih, dan Prastyo Bayu Nugroho</i>	

**Konsep Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah
di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Kalurahan
Jepitu, Kapanewon Girisubo) 124**

Priyo Katon Prasetyo, Ardi Ananto, Tunjung Fitra Wijanarko

PENGEMBANGAN REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DI DESA KEMADANG, GUNUNGKIDUL

Widhiana Hestining Puri, Asih Retno Dewi, Elsa Widura, Sugiharto

A. Pendahuluan

Ketersediaan sumber daya di suatu wilayah perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut kebijakan pemerataan ekonomi baik di kota maupun di desa merupakan salah satu agenda pemerintah, salah satunya melalui program Reforma Agraria (RA). Dalam konteks RA, menjadi momentum yang tepat bagi daerah untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada agar lebih terasa kebermanfaatannya serta memberikan nilai lebih. RA adalah sebuah program yang sangat luas yang terdiri dari distribusi aset dan akses. Hal ini bermakna bahwa kesejahteraan masyarakat tidak harus melalui distribusi tanah sebagai aset namun juga berupa distribusi akses agar fungsi pemanfaatan tanah dapat meningkat.

Program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada tahun 2021 ini diarahkan untuk memetakan dan mengembangkan potensi wilayah Jawa bagian selatan khususnya Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari (Pawonsari). Hal ini mengingat potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut yang belum tergarap secara maksimal sehingga diharapkan nantinya desa menjadi mandiri dan berdaya yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat. Potensi suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk penyusunan *roadmap* pengembangan wilayah.

Penelitian tentang pemetaan potensi wilayah desa telah banyak dilakukan, di antaranya studi Hapsari dan Cahyono (2014) mengenai pemetaan partisipatif potensi Desa Selopatak, Kecamatan Trawas,

Kabupaten Mojokerto. Pemetaan partisipatif dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat/wilayah mereka hidup. Masyarakat memiliki pengetahuan mendalam mengenai pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, identifikasi sumber daya alam yang dimiliki, dan sebagainya. Manfaat pemetaan partisipatif bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, selanjutnya peta yang dihasilkan bisa digunakan sebagai media negosiasi dengan pihak lain terkait pemanfaatan.

Pemetaan potensi desa yang memiliki karakter yang khas nantinya akan menjadi salah satu ciri dan dapat dikembangkan menjadi desa wisata serta dapat menjadikan nilai jual tersendiri. Harani dkk (2017) melakukan penelitian mengenai desa pesantren yang merupakan desa di daerah pesisir pantai yang lokasinya berada di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Desa ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata, sehingga dibutuhkan pemetaan potensi yang ada.

Srirejeki dkk (2020) melakukan pemetaan potensi desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pliken, Kabupaten Banyumas. Dampak keberadaan BUMDes sulit diukur sehingga pemerintah desa mempertimbangkan kegiatan lain untuk ekspansi aktivitas bisnis BUMDes didasarkan pada perencanaan dan strategi yang menyeluruh. Dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang berbasis aset untuk memastikan bahwa setiap potensi anggota diakui dan dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa. Hasil menunjukkan bahwa bakat/potensi individu, organisasi warga dan lembaga lokal adalah faktor utama dalam penyusunan peta potensi desa. Lebih lanjut, hasilnya menunjukkan peningkatan kapasitas dan manajemen serta pengembangan jaringan desa sangat penting untuk penguatan BUMDes.

Gunungkidul menjadi wilayah pertama target kerja Tim GTRA dalam rangka menyusun kajian dan *roadmap* pengembangan RA khususnya wilayah pesisir. Wilayah pesisir akan sangat berkaitan dengan potensi pantai, pariwisata, UMKM, pertanian, maupun juga seni dan budayanya dalam rangka mendukung perekonomian masyarakatnya. Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari merupakan salah satu desa di pesisir selatan Gunungkidul yang mempunyai potensi wilayah yang potensial untuk dikembangkan. Desa Kemadang memiliki potensi utama berupa pantai yang telah cukup lama dikembangkan untuk kegiatan pariwisata. Pantai di Desa Kemadang merupakan pantai karst yang identik dengan batu karang dan pasir putih sehingga memiliki daya tarik secara alami. Namun, sebagian besar dari total 157 nelayan di Desa Kemadang memiliki tingkat kualitas hidup nelayan yang masih rendah (Trijayanti dan Muataali, 2017).

Hampir sama dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Harani dkk (2017) serta Sirejeki dkk (2020) tulisan ini mencoba bertujuan untuk mengidentifikasi potensi wilayah yang ada di Desa Kemadang. Potensi wilayah tersebut meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, potensi dari aspek pertanian dan tata ruang, serta potensi ekonomi Desa Kemadang. Selain itu, menganalisa strategi pengembangan reforma agraria berbasis potensi wilayah untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Kemadang. Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Hapsari dan Cahyono (2014) mengenai pemetaan partisipatif potensi desa, pemetaan potensi Desa Kemadang dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan dan hasil studi kepustakaan (*desk study*) dengan penelitian lapangan (*field study*). Penulis melakukan analisis deskriptif guna menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap potensi wilayah dalam rangka melakukan identifikasi terhadap potensi dan strategi pengembangan Reforma Agraria di Desa Kemadang.

B. Konsep Reforma Agraria dan Potensi Wilayah

1. Reforma Agraria

Ide reforma agraria telah dimuat dalam UUPA, khususnya pada Pasal 7, 10, dan 17. Meskipun cakupan ide tersebut hanyalah terbatas pada konsep landreform (bagian dari reforma agraria). Bernhard Limbong (2012a:171) menjelaskan, bahwa UUPA telah memuat program *agrarian reform*, sebagai berikut: (a) pembaharuan hukum agraria nasional melalui unifikasi hukum; (b) penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah; (c) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; (d) perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan; dan (e) perencanaan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Sementara itu, Abhijit Banerjee, Paul J. Gertler, dan Maitreesh Ghatak saat melakukan penelitian di India berjudul, "*Empowerment and Efficiency: The Economics of Agrarian Reform* (1998)," yang dipublikasikan oleh Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, menyatakan bahwa: (a) dampak reformasi *tenancy* (reforma agrarian) terbukti memberi efek pada peningkatan daya tawar petani; (b) ada efek keamanan tenurial yang mendorong keberanian petani melakukan investasi di atas tanahnya.

Berbeda dengan Abhijit Banerjee, Paul J. Gertler, dan Maitreesh Ghatak; Samuel Kariuki melakukan penelitian berjudul, "*Agrarian Reform, Rural Development and Governance in Africa: A case of Eastern and Southern Africa* (2009)," yang dipublikasikan oleh Centre for Policy Studies, Johannesburg (South Africa) menyatakan, bahwa: setelah 14 tahun demokrasi di Afrika Selatan, ada kesepakatan di seluruh spektrum politik dan sosial bahwa program reforma agraria berada dalam kesulitan besar.

Hampir sejak awal, program ini telah dikritik karena gagal mencapai targetnya, atau mencapai berbagai tujuan, seperti: (a) pemulihan historis, (b) redistribusi kekayaan dan peluang, serta (c) pertumbuhan ekonomi. Ada 36 target reforma agraria yang diusulkan oleh Bank Dunia, dan harus diadopsi dalam Program Rekonstruksi dan Pembangunan (*The Reconstruction and Development Programme*) pada tahun 1994, yang antara lain berisi seruan untuk mentransfer 30 persen tanah pertanian dalam lima tahun pertama. Namun, pada tahun 1999, hanya tercapai kurang dari 1 persen tanah pertanian telah dialihkan melalui semua aspek reforma agraria. Selanjutnya, pada tahun 2000, setelah melalui tinjauan komprehensif reforma agraria, pemerintah mengadopsi target yang direvisi dan tidak diragukan lagi lebih realistis untuk mentransfer 30 persen tanah pertanian. Hasilnya, berupa terlaksananya redistribusi tanah sebesar 30 persen tanah pertanian pada tahun 2014, yang setara dengan 25 juta hektar.

Kritik terhadap reforma agraria tidak menyurutkan niat untuk melaksanakan reforma agrarian, melainkan justru menambah semangat dalam melaksanakan reforma agraria, dengan tetap memperhatikan kritik yang ada. Berbekal semangat *agrarian reform* tersebut dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka dilaksanakanlah reforma agraria, yang meliputi: reforma regulasi, reforma aset, dan reforma akses, yang perinciannya sebagai berikut:

a. Reforma Regulasi

Reforma regulasi perlu dilakukan, karena adakalanya regulasi tidak mendukung atau gagal mendukung reforma agraria, atau menghambat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Maria S.W. Soemardjono dalam "Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan" yang dimuat Kompas.com pada 9 Oktober 2012 menyatakan, bahwa ada lima karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral, yaitu: (1) berorientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, serta hanya digunakan

sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; (2) lebih berpihak pada pemodal besar; (3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik; (4) pada saat koordinasi antar sektor lemah, justru sumberdaya dikelola secara sektoral; dan (5) tidak memberi perlindungan hak asasi manusia secara proporsional.

Sementara itu, dalam konteks reforma agraria, Muhammad Ilham Arisaputra (2015:18-19) menjelaskan, bahwa reforma agraria selalu berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan politik, serta hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, reforma agraria harus mencakup: (1) instrumen kebijakan agraria yang mengacu pada perubahan yang relatif kecil, seperti: subsidi dan tarif pajak; (2) perubahan struktural yang mampu mengubah struktur pertanian, seperti: program kredit, dan investasi di bidang infrastruktur; dan (3) reformasi kelembagaan yang mampu mengubah dasar ekonomi pedesaan dan masyarakat, seperti: redistribusi tanah dan perubahan sistem penyewaan tanah secara kolektif.

Untuk itu, reforma agraria wajib meliputi tiga konsep utama, yaitu: (1) *landreform*, yang merupakan program penataan kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah agar lebih adil; (2) *accessreform*, yang merupakan program penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar lebih produktif, melalui pemberian fasilitas kredit modal usaha tani, dan bantuan pemasaran produk pertanian; dan (3) *regulation reform*, yang merupakan program penataan dan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat, khususnya petani kecil (peasant).

Regulation reform atau reforma regulasi inilah yang menjadi unsur penting dalam pelaksanaan reforma agraria. Penataan dan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat, khususnya para petani kecil di desa, perlu diimplementasikan melalui pelaksanaan reforma aset (*asetreform*) dan reforma akses (*accessreform*).

b. Reforma Aset

Reforma aset perlu dilakukan, karena bagi petani dan sebagian besar masyarakat Indonesia, tanah merupakan aset berharga yang akan dijaganya dengan sepenuh hati. Sebagai aset, maka penguasaan dan pemilikan tanah serta tindakan pengadministrasiannya merupakan sesuatu yang penting, serta perlu direformasi. Reforma aset dapat menjadi dasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi, dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju dan demokratis. Sebagaimana diketahui reforma aset terdiri dari tiga konsepsi utama, yang perlu dilaksanakan secara terpadu. Konsepsi utama tersebut terdiri dari *landreform*, redistribusi tanah, dan legalisasi aset, yang princiannya sebagai berikut:

(1) Landreform

Hal ini sesuai dengan pernyataan Boedi Harsono (dalam Santoso, 2012:207), yang telah menjelaskan bahwa *landreform* merupakan serangkaian tindakan dalam rangka *agrarian reform*, yang meliputi perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta hubungan hukum yang terkait dengan penguasaan tanah.

Oleh karena itu, menurut Lipton (dalam Limbong, 2012b:48) dalam *landreform* perlu dilakukan pengambil-alihan tanah yang sifatnya wajib oleh negara dari pemilik tanah luas, dengan memberi kompensasi agar pengambil-alihan tersebut memberi manfaat optimal bagi semua pihak. Senada dengan pandangan Lipton, telah sejak 1983, A.P. Parlindungan (1983:4) mengungkapkan adanya aspek politik dalam *landreform*. Ia menjelaskan, bahwa *landreform* memiliki adagium "*land to the tiller*", yang berguna untuk menyemangati para petani penggarap dalam menghadapi *landlord*.

Pandangan Boedi Harsono, Lipton, dan A.P. Parlindungan memperlihatkan relasi antara *landreform* dengan pengambil-alihan tanah oleh negara dari pemilik tanah luas atau *landlord*,

untuk kemudian dibagikan kepada para pemilik tanah sempit atau petani penggarap (*tiller*). Hal inilah yang mendasari kegiatan redistribusi tanah dalam pelaksanaan *landreform* atau reforma aset (*asset reform*).

(2) Redistribusi Tanah

Hal ini sesuai dengan pernyataan Russet King (dalam Hutagalung, 1985) menyatakan, bahwa redistribusi tanah merupakan pengambil-alihan sebagian tanah, atau seluruh tanah milik tuan tanah, yang kemudian diserahkan kepada petani yang bertanah sempit atau petani yang tidak mempunyai tanah. Untuk melengkapi keterangan Russet King, maka E. Jacoby (dalam Hutagalung, 1985) menjelaskan bahwa *landreform* memiliki tiga tahapan, yaitu: pengambil-alihan tanah, redistribusi tanah, dan penyesuaian unit-unit pertanian baru.

Pandangan Russet King dan E. Jacoby selanjutnya dilengkapi oleh Diyan Isnaeni (2017: 310) dengan mengungkapkan tujuan redistribusi tanah, yaitu: (a) untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat, yang berupa tanah; (b) untuk melaksanakan prinsip “tanah untuk petani”, agar tanah tidak lagi dijadikan ajang spekulasi; (c) untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan penguasaan dan pemilikan tanah secara besar-besaran; (d) untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia; dan (e) untuk mempertinggi produksi nasional, dan mendorong penyelenggaraannya secara intensif; serta (f) untuk mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.

Dengan demikian ketika dalam rangka *landreform*, telah dilakukan pengambil-alihan tanah oleh negara dari pemilik tanah luas dengan memberi kompensasi, maka redistribusi tanah merupakan tahapan selanjutnya yang sangat penting. Urgensi

tahapan ini nampak, ketika berupaya membumikan adagium *"land to the tiller"*.

(3) Legalisasi Aset

Legalisasi aset merupakan proses administrasi pertanahan, yang meliputi adjudikasi, pendaftaran hak atas tanah, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah (Mediatataruang.com, 2016). Sementara itu diketahui, bahwa adjudikasi merupakan serangkaian kegiatan, yang terdiri dari: (a) pengumpulan data fisik dan data yuridis; (b) pengumuman data fisik dan data yuridis; dan (c) penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pengakuan atau pemberian hak atas tanah.

Pasca legalisasi aset, para peserta reforma agraria atau penerima redistribusi tanah telah mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan tanahnya. Oleh karena itu, beberapa pihak menyebut kegiatan ini (legalisasi aset) sebagai "penguatan aset". Tetapi ada pula beberapa pihak tertentu yang memberi sebutan lebih teknis, yaitu "pendaftaran tanah". Bagi mereka sebutan ini lebih tepat secara yuridis, karena sesuai dengan terminologi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

c. Reforma Akses

Reforma akses perlu dilakukan, karena merupakan hal penting bagi petani atau peserta reforma agraria. Bernhard Limbong (2012b:299) menjelaskan, bahwa access-reform (reforma akses) merupakan penyediaan sarana bagi masyarakat (penerima redistribusi tanah), untuk mengembangkan tanah pertanian sebagai sumber kehidupan petani, yang meliputi partisipasi ekonomi politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas dan kemampuan.

Dalam konteks reforma akses, pemerintah memberikan fasilitasi akses kepada masyarakat, baik akses masyarakat ke tanahnya itu sendiri, maupun akses masyarakat ke instrumen penunjang agar mereka dapat mengelola tanahnya dengan baik (optimal), seperti: akses permodalan. Tepatnya, pemerintah terlibat dalam semua mekanisme reforma agraria, dalam bingkai tanggungjawab dan pengawasan (Arisaputra, 2015:142).

Dengan demikian reforma akses merupakan suatu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, guna mengelola tanahnya atas dukungan dari pemerintah, berupa sarana dan prasarana produksi. Kondisi ini juga menunjukkan urgensi penataan dan pemanfaatan tanah yang lebih produktif, agar petani semakin dekat dengan sumber-sumber ekonomi.

2. Identifikasi Potensi Wilayah

Pemetaan dan pengembangan potensi wilayah Jawa Bagian Selatan khususnya Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari (PAWONSARI) merupakan salah satu program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada tahun ini. Hal ini mengingat potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut yang belum tergarap secara maksimal sehingga diharapkan nantinya desa menjadi mandiri dan berdaya yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat. Potensi wilayah Desa Kemadang yang akan disajikan meliputi sumberdaya keuangan, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta sumberdaya manusia. Potensi suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk penyusunan *roadmap* pengembangan wilayah.

a. Merancangan Roadmap Pengembangan Reforma Agraria

- (1) Makna *roadmap*, yaitu merupakan gambaran tentang rencana rinci suatu kegiatan yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, penyusunan *roadmap* memperhatikan empat hal, yaitu: apa, siapa, kapan, dan di mana. Biasanya *roadmap* disederhanakan

dalam bentuk tabel, yang kolomnya terdiri dari: program/kegiatan, output, tahapan kerja, waktu pelaksanaan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran, penanggungjawab, dan lokasi pelaksanaan (Sari, 2016:21-22).

- (2) Secara harfiah, *roadmap* dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, *roadmap* adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Informasi lain yang minimal harus dijelaskan dalam *roadmap* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, *roadmap* dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta *monitoring* dan evaluasi (Kementerian PAN-RB, 2011:3).
- (3) Prinsip dasar dalam pembuatan *roadmap*, sebagai berikut:
 - (a) Jelas, yaitu mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
 - (b) Ringkas, yaitu disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
 - (c) Terukur, yang terdiri dari: program, kegiatan, target, waktu, outputs dan outcomes;
 - (d) *Adjustable*, yaitu dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
 - (e) Terinci, yaitu merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
 - (f) Komitmen, yaitu merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan;
 - (g) Dokumen resmi, yaitu menjadi dokumen resmi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang

ditetapkan pimpinan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang bersangkutan
(Kementerian PAN-RB, 2011:3-4)

- (4) *Roadmap* yang baik memenuhi tiga hal, sebagai berikut:
 - (a) Logos, yaitu *roadmap* yang disusun bersifat logis dan mampu membawa ke visi yang diinginkan;
 - (b) Partos, yaitu *roadmap* yang disusun bersifat empowering dan mampu menggerakkan; serta
 - (c) Etos, yaitu *roadmap* yang disusun bersifat etis atau memenuhi kaidah-kaidah etis
(Utarini, 2016:6).
- (5) *Outline roadmap*, sebagai berikut:
 - (a) Ringkasan Eksekutif
 - (b) Pendahuluan
 - (c) Rencana Aksi, yang terdiri dari: pencapaian, rencana, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggungjawab, dan rencana anggaran.
 - (d) Lampiran
(Kementerian PAN-RB, 2011:4-5)

C. Kondisi Potensi Wilayah Desa Kemadang

1. Sumber Daya Keuangan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang merupakan sebuah desa yang terdapat di pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti desa-desa yang lainnya di Yogyakarta, Desa Kemadang memiliki tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan yang dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan hak *anggaduh*. Tanah desa yang dimiliki Desa Kemadang seluas 636.701,90 m² yang jenisnya terdiri dari tanah kas desa, *pelungguh*, dan tanah untuk kepentingan umum yang antara lain adalah untuk sekolah, pasar desa,

dan fasilitas kesehatan. Tanah *pelungguh* adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Tanah *pelungguh* di Desa Kemadang merupakan tanah pertanian yang kondisinya relatif subur bisa ditanami padi 2 kali setahun. Beberapa tanah *pelungguh* disewakan kepada petani penggarap dengan sewa Rp1.000.000,- per tahun, lebih tinggi dari pada tanah pertanian lain yang harga sewanya sekitar Rp500.000,- sampai dengan Rp700.000,- per tahun karena faktor tingkat kesuburan tanah. Sedangkan tanah kas desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa misalnya untuk bangunan balai desa.

Sumber dan besar pendapatan Desa Kemadang pada tahun 2020, antara lain:

Pendapatan Asli Desa	Rp 120.000.000,00
Pendapatan Transfer	Rp 2.743.184.300,00
Dana Desa	Rp 1.106.888.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 37.574.800,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp 26.210.000,00
Bagi Hasil Pen. Ret.	
Wisata & Olah raga	Rp 525.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus	Rp 99.000.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp 948.511.500,00
Pendapatan Lain-lain	Rp 3.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.866.184.300,00

Dari data di atas dapat diketahui lain-lain pendapatan desa yang sah di Desa Kemadang berupa bagi hasil penarikan retribusi wisata dan olah raga cukup besar dibanding bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Hal ini bisa dijelaskan karena di Desa Kemadang terdapat beberapa lokasi wisata pantai favorit yang tersedia tempat pemungutan retribusi.

2. Sumber Daya Alam

a. Formasi Batuan

Desa Kemadang secara regional berada pada zona karst Gunung Sewu yang dikenal menjadi bagian dari Pegunungan Selatan (Widura 2021). Zona Gunung Sewu terbentuk dari proses tektonik lempeng berupa pengangkatan dari lingkungan laut dangkal pada sekitar 20–15 juta tahun lalu yaitu akhir Miosen awal atau mulai Miosen Tengah (Samodra 2001, Sunkar 2008, dalam Widura 2021). Proses pengangkatan yang terjadi kemudian diikuti dengan proses erosi dan abrasi sehingga membentuk tebing curam/*cliff* di pantai dengan ketinggian berkisar 25–100m (Sutoyo 1994, Haryono, Barianto, & Cahyadi 2017, dalam Widura 2021). Formasi batuan yang ada di Desa Kemadang merupakan Formasi Wonosari dimana tersusun atas batugamping terumbu dan lapis serta sisipan batu napal. Luas formasi batuan di Desa Kemadang untuk batugamping 1794,243 Ha dan endapan liat 183,116 Ha.

b. Jenis Tanah

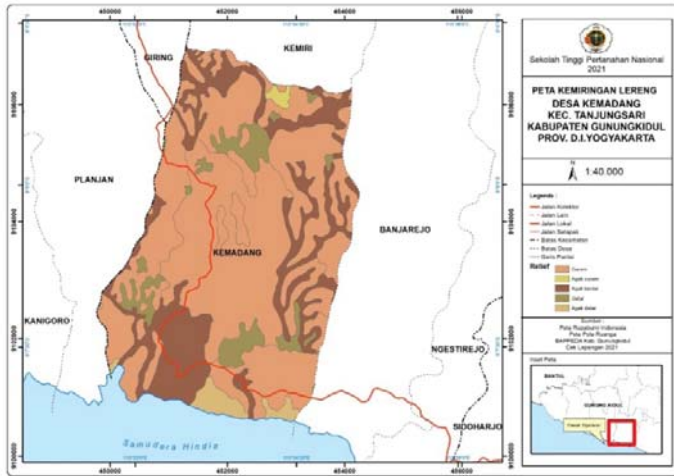
Jenis tanah yang terdapat di Desa Kemadang didominasi tanah litosol dan mediterania merah di semua wilayah (2062,51 Ha). Tanah mediterania merah merupakan tanah yang berasal dari bahan induk batu kapur dengan kadar bahan organik rendah. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air.

Tanah litosol merupakan tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami pelapukan

dengan sempurna. Oleh karena itu, tanah jenis ini sulit untuk ditanami tumbuhan. Tanah litosol memiliki ciri memiliki tekstur yang bermacam-macam, berasal dari batu-batuan keras, dan kandungan unsur haranya rendah.

c. Kelerengan Tanah

Mengacu pada hasil penelitian Widura (2021), secara umum Kecamatan Tanjungsari memiliki kemiringan lereng datar hingga terjal dengan kemiringan $0-55^{\circ}$. Kemiringan lereng cenderung bervariasi pada bukit-bukit karst yang ada di wilayah tersebut. Sebagian morfologi perbukitan pada kemiringan lereng $8-16^{\circ}$ (agak curam). Sedangkan Desa Kemadang sebagai wilayah pesisir pantai yang dijumpai gisik memiliki kemiringan lereng $0-8^{\circ}$ (datar sampai landai) dan pantai memiliki kemiringan lereng $16-55^{\circ}$ (curam sampai sangat terjal). Kondisi morfologi di wilayah pesisir yang landai dominan dijumpai di Desa Kemadang. Luas wilayah Kemadang dengan relief landai adalah 1977,36 Ha, curam 1.337,03 Ha. Sedangkan menurut Purwantara, Sugiharyanto, dan Khotimah (2013) khusus Pantai Baron memiliki kemiringan lereng sebesar $8,5^{\circ}$ (landai). Gambaran kemiringan lereng tanah di Desa Kemadang dapat dilihat pada peta berikut ini:



Sumber: Hasil Analisis Data

Gambar 1. Peta Jenis Penggunaan Tanah Desa Kemadang

d. Kondisi Hidrogeologi (Keairan)

Kawasan karst identik dengan kondisi kering atau sulit untuk memperoleh air. Sistem hidrologi di kawasan karst terbentuk dari kombinasi pelarutan batuan dengan porositas yang berkembang baik (porositas sekunder) sehingga air yang jatuh di permukaan mengalir melalui celah-celah dan lorong bawah tanah kemudian masuk dalam akuifer atau sungai bawah tanah (Cahyadi, Ayuningtyas, & Prabawa 2013) sebagaimana dikutip oleh Widura 2021. Air hujan yang jatuh akan mengalir melalui celah (diaklas) batuan, fitur karst seperti gua (luweng), dan ponor. Kondisi tersebut menyebabkan sedikit dijumpai sistem aliran sungai di permukaan.

Kondisi hidrogeologi di Desa Kemadang berupa akuifer celah, tinggi seluas 2062,51 Ha. Desa Kemadang dengan formasi batugamping terumbu dan berlapis memiliki karakteristik antar ruas batuan besar (diaklas) sehingga air hujan yang terinfiltrasi ke dalam tanah tidak

semuanya tersimpan menjadi air tanah tetapi mengisi di berbagai celah diaklas.

Biasanya beberapa area yang terhubung dari beberapa diaklas dijumpai lorong-lorong bawah tanah, akumulasi air yang masuk menjadi sistem air bawah tanah sedangkan kedalaman airtanah di Desa Kemadang adalah $> 15\text{m}$, merata di seluruh wilayah.

3. Sumber Daya Buatan

Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya buatan akan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Secara langsung, sumberdaya buatan tersebut mampu mencukupi kehidupan masyarakat di Desa Kemadang. Secara Ekonomi, jika dikembangkan terutama dalam hal peningkatan hasil produksi dan pemasaran maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

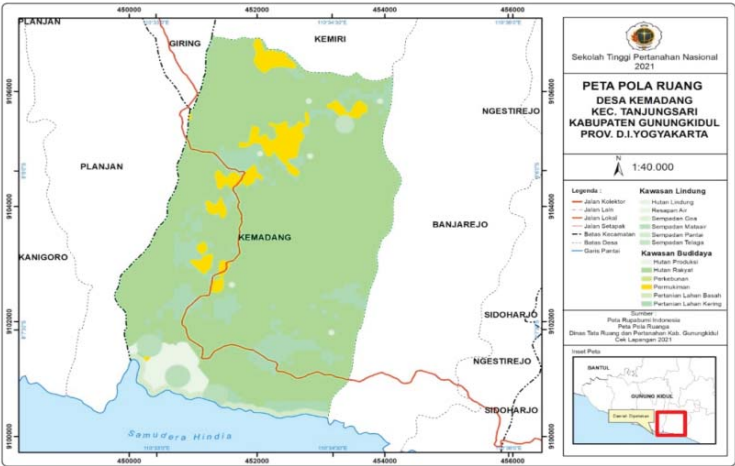
a. Pola dan Struktur Ruang

Berdasarkan peta pola ruang yang ada terlihat bahwa sebagian besar wilayah Desa Kemadang diarahkan untuk kawasan hutan lindung setempat, kawasan pertanian pangan, kawasan hutan rakyat, serta kawasan hutan produksi. Sehingga rencana pengembangan kedepannya harus tetap memperhatikan arahan pola ruang ini. Jika akan dikembangkan sebagai lokasi wisata, maka wisata yang diarahkan adalah ekowisata yang tetap mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan. Luas Pola Ruang menurut RT/RW Desa Kemadang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Pola Ruang menurut RT/RW Desa Kemadang

No	Pola Ruang	Peruntukan	Luas (Ha)
1	Kawasan lindung setempat	Sempadan Goa	4,69
2	Kawasan lindung setempat	Sempadan Pantai	38,81
3	Kawasan lindung setempat	Sempadan Mataair	35,96
4	Kawasan lindung setempat	Sempadan Telaga	7,72
5	Kawasan pertanian pangan	Pertanian Lahan Kering	232,72
6	Kawasan hutan rakyat	Hutan Rakyat	1579,18
7	Kawasan peruntukan permukiman	Permukiman	115,56
8	Kawasan hutan produksi	Hutan Produksi	51,56

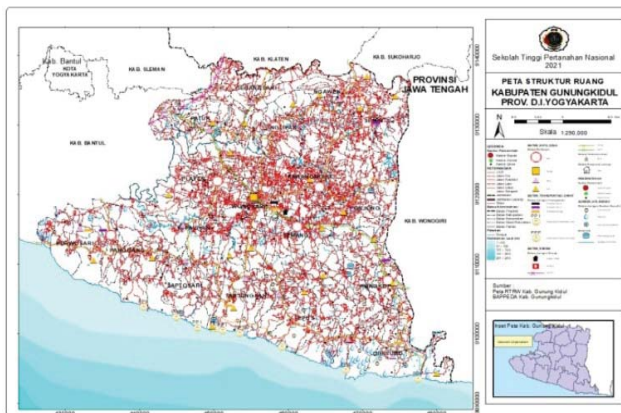
Sumber: Hasil Analisis Data



Sumber: Hasil Analisis Data

Gambar 2. Peta Pola Ruang Desa Kemadang

Jenis dan Sebaran Struktur Ruang menurut RT/RW menurut Perda Kabupaten Gunungkidul No 6 Tahun 2011 tentang RT/RW, Desa Kemadang termasuk Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) merupakan desa yang memiliki kecenderungan pertumbuhan pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi tinggi yang dicirikan dengan adanya kegiatan perdagangan dan jasa. Selain itu, merupakan kawasan strategis yaitu koridor yang menghubungkan Wonosari-Baron. Desa Kemadang juga masuk rencana penetapan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi Pulau Ngrawe dan Pulau Jumpino.



Sumber: Hasil Analisis Data

Gambar 3. Peta Struktur Ruang Kabupaten Gunungkidul

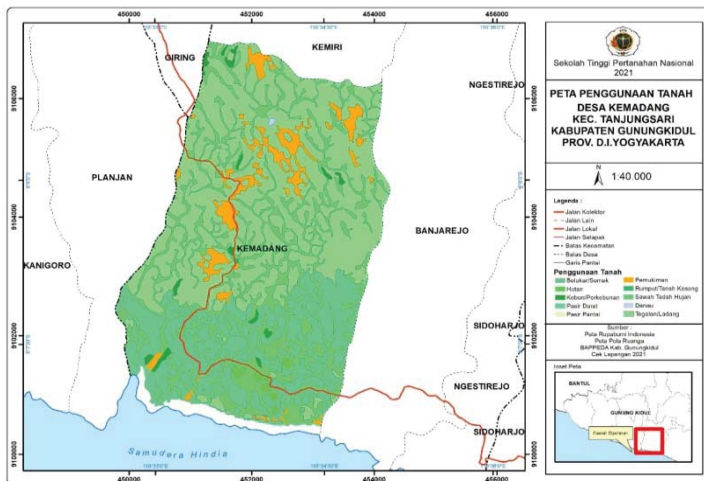
Pemanfaatan ruang diarahkan pada perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Arahkan struktur ruang di Desa Kemadang berupa:

- (1) Fasilitas pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan menengah, kesehatan dan sosial untuk skala kawasan.
- (2) Pengembangan dan peningkatan prasarana dasar perdesaan yang meliputi jalan (terdapat Jalan Jalur Lintas Selatan di bagian selatan dekat pantai, jalan kolektor primer, jalan lokal, jalan setapak), listrik, air minum (ada 6 goa/luweng, 1 penampungan air bersih, 3 mata air, jaringan air bersih), system jaringan

transportasi (rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di Baron), telepon, pangkalan pendaratan ikan.

b. Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Kemadang berdasarkan luasan terbesarnya berupa tegalan/ladang (972,49 Ha), kemudian diikuti oleh sawah tadah hujan (445,46 Ha). Hal ini bisa dijelaskan karena sebagian besar masyarakat Desa Kemadang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Selanjutnya penggunaan tanah lainnya adalah sebagai belukar/semak, pemukiman, hutan, kebun/perkebunan, pasir darat, pasir pantai, rumput/tanah kosong, serta sungai. Gambaran lengkap mengenai sebaran dan jenis penggunaan tanah di Desa Kemadang dapat dilihat pada peta berikut ini:



Sumber: Hasil Analisis Data

Gambar 4. Peta Jenis Penggunaan Tanah Desa Kemadang

- (1) Sawah, masyarakat di Desa Kemadang adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Dari total jumlah penduduk di Desa Kemadang sekitar 7.114 jiwa atau sejumlah 2.259 KK, jumlah warga desa yang memiliki mata

pencapaian sebagai petani sejumlah 2.113 orang dan buruh tani sejumlah 121 orang. Tanah pertanian warga umumnya adalah tanah pertanian tadah hujan yang memiliki tingkat kesuburan terbatas sehingga dalam 3 kali masa tanam tanaman dalam 1 tahun, hanya dapat ditanami tanaman padi untuk 1 kali masa tanam yaitu di musim hujan sekitar bulan desember. Namun terdapat “sawah porangan” yang merupakan lahan pertanian subur yang mampu digunakan untuk menanam komoditas padi sepanjang tahun.

- (2) Tegalan, luas tanah pertanian kering berupa tegal/ladang di Desa Kemadang adalah 1.594,19 Ha. Pemanfaatan lahan tegalan sebagian besar untuk menanam palawija seperti jagung, ubi, atau kacang tanah. Kacang tanah merupakan produk unggulan untuk pertanian lahan kering di Desa Kemadang.
- (3) Penampungan airtanah yang berasal dari Sungai Bawah Tanah (SBT) Baron. Sebagaimana diketahui kawasan karst identik dengan kondisi kering atau sulit untuk memperoleh air. Sistem hidrologi di kawasan karst terbentuk dari kombinasi pelarutan batuan dengan porositas yang berkembang baik (porositas sekunder) sehingga air yang jatuh di permukaan mengalir melalui celah-celah dan lorong bawah tanah kemudian masuk dalam akuifer atau sungai bawah tanah (Cahyadi, Ayuningtyas, & Prabawa 2013) sebagaimana dikutip oleh Widura 2021. Air hujan yang jatuh akan mengalir melalui celah (diaklas) batuan, fitur karst seperti gua (luweng), dan ponor. Kondisi tersebut menyebabkan sedikit dijumpai sistem aliran sungai di permukaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan karst ini salah satunya adalah Sistem Airtanah Baron untuk pemenuhan di Kecamatan Tanjungsari yang terletak di Desa Kemadang. Mata air Baron memiliki sistem imbuhan yang bersifat lokal dari dataran karst Wonosari dan perbukitan karst Gunung Sewu, hingga sistem imbuhan yang bersifat regional dari perbukitan bukan karst

di bagian timur laut (Setiawan, dkk 2018 dalam Widura 2021). Kondisi tersebut membuat kemunculan air terjadi sepanjang tahun. Debit air lebih besar saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Sejak keberhasilan pemanfaatan air dari Sistem Airtanah Baron atau mata air Baron, masyarakat di Kecamatan Tanjungsari hampir tidak pernah mengalami kekurangan air.

- (4) Pariwisata, Desa Kemadang memiliki potensi wisata laut berupa wisata pantai sebanyak 10 buah, pulau, taman laut, situs sejarah bahari dan lain-lain. Jumlah tempat wisata pantai yang sudah dikembangkan sebanyak 6 buah di antaranya Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Watukodok, Pantai Rawe, Pantai Sanglen, dan Pantai Sepanjang. Sedangkan yang belum dikembangkan di antaranya Pantai Mbuluk, Pantai Pondok Rangon, Pantai Nglolang, dan Pantai Porok. Sektor pariwisata di Desa Kemadang sudah dikelola dengan cukup baik melalui BUMDesa sehingga sudah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, tetapi masih bisa di kembangkan lebih maksimal sehingga akan mampu mendongkrak pendapatan Asli Desa.
- (5) Industri, sebagai daerah wisata pantai dengan komoditas hasil perikanannya Desa Kemadang potensial untuk dikembangkan industri pengolahan ikan atau pengalengan ikan yang memiliki kapasitas untuk penyimpanan dan pembekuan ikan. Selama ini para nelayan maupun pengepul hanya menyimpan ikannya dengan es batu seadanya, dan mengirimkannya ke daerah lain seperti Cilacap yang telah memiliki pabrik pengolahan ikan/ pengalengan ikan.

4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data potensi Desa Kemadang, jumlah penduduk usia produktif di Desa Kemadang adalah sejumlah 3.958 jiwa, jumlah penduduk usia anak 1.516 jiwa dan usia tua 1.629 jiwa. Sehingga didapatkan rasio ketergantungan adalah 79,46 yang berarti setiap

tahunnya 100 orang berusia produktif (18-56 tahun) menanggung 79 orang penduduk usia non-produktif (berusia di bawah 18 tahun atau di atas 56 tahun).

Tabel 2. Penduduk Umur Produktif dan Umur Non Produktif di Desa Kemadang

No	Tenaga Kerja	Laki-laki		Perempuan	
1	Penduduk usia 0-6 tahun	275	4%	254	4%
2	Penduduk usia 7-18 tahun	510	7%	477	7%
3	Penduduk usia 18-56				
	- Bekerja	1816	26%	1832	26%
	- Belum atau tidak bekerja	178	3%	132	2%
4	Penduduk usia 56 ke atas	769	11%	860	12%
	Jumlah	3548	49,95%	3555	50,05%
	Total	7103			

Sumber: Buku Potensi Desa Kemadang 2020, diolah

Komposisi penduduk di Desa Kemadang digolongkan berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 3.548 jiwa (49,95%) dan perempuan sebanyak 3.555 jiwa (50,05%). Kualitas angkatan kerja Desa Kemadang dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berusia produktif berdasarkan Buku Potensi Desa Kemadang 2020, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk usia produktif di Desa Kemadang sudah mengenyam pendidikan. Latar belakang pendidikan angkatan kerja paling banyak tamat SD, disusul dengan tamat SMP dan SMA sedangkan jumlah penduduk umur produktif berdasarkan jenis ketrampilan yang dikuasai dapat didominasi sebagai petani (2113 jiwa) dan nelayan (176 jiwa).

D. Strategi Pembangunan

Dengan mempertimbangan berbagai potensi dan permasalahan yang ada di beberapa sektor serta strategi penguatan dan pengembangan potensi wilayah yang diusulkan di Desa Kemadang dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kondisi Aktual, Potensial, dan Strategi Pengembangan Reforma Agraria di Desa Kemadang

KONDISI AKTUAL	POTENSIAL	STRATEGI				OUTPUT
		PROGRAM	KEGIATAN	PIHAK YANG TERLIBAT	SUMBER PENDANAAN	
SEKTOR PERTANIAN						
keterbatasan pupuk dan bibit tanaman	pengelolaan distribusi pupuk dan bibit tanaman melalui gapoktan	diversifikasi pertanian	Pembagian bibit dan pupuk	Dinas Pertanian BUMDES Dinas Koperasi	APBD Kabupaten Gunungkidul	bibit dan pupuk terdistribusi sesuai dengan luasan lahan pertanian
pemasaran hasil melalui pasar, tengkulak, pengecer, lumbung desa/ kelurahan dan sebagian untuk konsumsi keluarga.	Penjualan melalui KUD	diversifikasi pertanian	Pembentukan KUD	Dinas Koperasi	APBD Kabupaten Gunungkidul	Produk olahan hasil pertanian
komoditas pertanian dijual secara angsumg tanpa pengolahan lanjutan	pengolahan hasil pertanian sebagai produk lanjutan	diversifikasi pertanian	pelatihan pengolahan produk pertanian	Dinas pertanian, dinas penanaman modal	APBD Kabupaten Gunungkidul	Produk olahan hasil pertanian
produk pertanian unggulan palawija	pengembangan jenis tanaman yang lain	diversifikasi pertanian	penanaman porang	wakil bupati gunung kidul, Panewu Tanjungsari, BPPT Tanjungsari, Lurah dan pamong	-	budidaya tanaman porang di Kalurahan Kemadang

				penanaman melon	kalurahan Kemadang UGM, gapoktan di Kemadang	budidaya tanaman Melon di kawasan Pantai Porok
				Penyuluhan, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dan kelompok sadar wisata agro bahari berbasis educator for sustainable development	Fakultas Biologi UGM	pemfokusan budidaya kelengkeng untuk nantinya dijadikan wisata edukasi
SEKTOR PETERNAKAN						
pemeliharaan ternak hanya sebagai usaha sampingan dan bersifat individu	pengembangan peternakan sapi dan kambing dalam skala besar karena didukung ketersediaan lahan dan hijauan pakan ternak	diversifikasi pertanian	Pengembangan usaha peternakan	dinas peternakan, dinas penanaman modal	APBD Kabupaten Gunungkidul	budidaya peternakan skala besar
SEKTOR PERIKANAN						
Hasil tangkapan nelayan sebagian besar hanya memenuhi kebutuhan lokal	pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan dan produk lanjutan	pemasaran produk perikanan	Pengembangan usaha pemasaran dan produk lanjutan ikan laut	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul,	APBD Kabupaten Gunungkidul	produk olahan hasil perikanan laut

dan belum dikemas menjadi produk lanjutan dan belum ada pabrik pembekuan ikan	ke beberapa kota besar			Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal, Dinas Perindustrian		
usaha pengepul ikan dan lobster dilakukan secara individu	Pengelolaan pengepul ikan dan lobster secara berkelompok dan profesional	pembinaan	pelatihan dan pembinaan kelompok nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal, BUMDes	APBD Kabupaten Gunungkidul	pengelolaan usaha pengepul ikan dan lobster
budidaya lobster mengalami kegagalan karena faktor alam	pengembangan budidaya lobster dan abalone	pelatihan dan pendampingan	pengembangan budidaya lobster dan abalone	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Penanaman Modal, BUMDes	APBD Kabupaten Gunungkidul	budidaya penangkaran lobster dan abalone
SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT						
Komoditas perkebunan kelapa	pengembangan jenis tanaman perkebunan yang lain	pendampingan budidaya tanaman perkebunan	penanaman pohon porang	wakil bupati Gunungkidul, Panewu Tanjung Sari, BPPT Tanjungsari, Lurah Kemadang	-	budidaya tanaman porang di Kalurahan Kemadang
SEKTOR PERINDUSTRIAN						
Belum ada pengembangan industri yang	Pengembangan Industry pengolahan ikan	pengolahan pemasaran produk	Pengembangan usaha pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten	APBD Kabupaten Gunungkidul	produk olahan hasil perikanan laut

	pelatihan			Pelatihan Kerajinan Hasil Laut (POKIR) pada kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil TA 2021	Dinas Kelautan dan Perikanan		
SEKTOR PARIWISATA							
Pengelolaan pariwisata yang belum terpadu	Pengembangan potensi wisata dengan penyediaan sarana & prasarana yang memadai	Pengembangan dan pengelolaan tempat wisata	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang di lokasi wisata	Dinas Pariwisata, Pokdarwis, BUMDes	APBD Kabupaten Gunungkidul	sarana dan prasaran yang memadai bagi wisatawan	
			pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata Pantai Porok	Dinas Pariwisata, Dinas PU	APBD Kabupaten Gunungkidul	infrastruktur jalan dan penerangan menuju lokasi wisata	
			pendampingan pengelolaan penginapan di lokasi wisata	Dinas Pariwisata, Pokdarwis, BUMDes	APBD Kabupaten Gunungkidul	pengelolaan penginapan di lokasi wisata	
			pendampingan pengelolaan	Dinas Pariwisata, Pokdarwis, BUMDes	APBD Kabupaten Gunungkidul	usaha pariwisata dengan standar sertifikasi	

			industri pariwisata yang memenuhi standar sertifikasi usaha pariwisata	Dinas Pariwisata, Pokdarwis, BUMDes	Gunungkidul	usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata
BUMDes						
Pengelolaan 4 jenis bentuk usaha oleh BUMDes Kemadang	Pengembangan jenis usaha yang dikelola BUMDes Kemadang	pelatihan dan pendampingan	Pelatihan pegembangan dan pengelolaan jenis usaha potensial	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM		pengelolaan berbagai jenis usaha oleh BUMDes Kemadang
SEKTOR SENI DAN BUDAYA						
sekitar melestarikan warisan budaya (local wisdom) seperti kegiatan rasulan/merti desa, karawitan, wayang, jathilan, reog klasik, wong ireng, dan nyadran/sedekah laut	kegiatan seni budaya yang belum dikembangkan dengan baik sehingga mendukung kegiatan sektor pariwisata dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kemadang	pengembangan seni dan budaya	pendampingan dan support dana untuk pengembangan warisan budaya di Kemadang yang mendukung sektor pariwisata	Dinas Pariwisata, Pokdarwis, BUMDes	APBD Kabupaten Gunungkidul	event budaya di lokasi pariwisata

E. Kesimpulan dan Saran

Desa Kemadang memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang potensial. Potensi-potensi yang ada tersebut secara keseluruhan belum dikelola dan dikembangkan dengan baik. Potensi yang paling menonjol dan menjadi andalan di desa ini adalah potensi pariwisata yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat luas dengan mengintegrasikan berbagai potensi lainnya dalam kemasan desa wisata khususnya wisata pantai. Sumber-sumber ekonomi masyarakat sekitar akan terangkat sehingga menjadikan desa dan masyarakat menjadi lebih maju.

Masyarakat di Desa Kemadang memerlukan pendampingan dari pihak-pihak terkait maupun dukungan sarana dan prasarana yang sifatnya berkelanjutan. Pendampingan dan penguatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasannya. Pembangunan dan pengembangan potensi di desa dengan konsep reforma agraria harus dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan karakter dan potensi wilayah setempat dan sesuai dengan potensi sumber daya manusia yang ada.

Daftar Pustaka

- Banerjee, A, Gertler, P.J. & Ghatak, M. 1998, Empowerment and efficiency: the economics of agrarian reform, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
- BPS Kabupaten Gunung Kidul 2020, Kecamatan Tanjungsari dalam angka 2020.
- Hapsari, H & Cahyono, A.B. 2014, 'Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto', *GEOID* Vol. 10, No. 01 (99-103)
- Harani, A.R., Arifan, F., Werdiningsih, H., & Riskiyanto, R 2017, 'Pemetaan Potensi Desa Menuju Desa Wisata yang Berkarakter

- (Studi Kasus: Desa Pesantren Kec Ulujami Kab Pemalang)', vol. 17, no. 1.
- Hutagalung, A.S. 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kariuki, S. 2009, *Agrarian Reform, Rural Development and Governance in Africa: A case of Eastern and Southern Africa*, Centre for Policy Studies, Johannesburg (South Africa).
- Kementerian PAN-RB. 2011, "Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi."
- Limbong, B, 2012a, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Limbong, B. 2012b, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Mediatataruang.com. 2016. "Program Legalisasi Aset BPN-RI." www.mediatataruang.com tanggal 10 September 2016.
- Parlindungan, A.P. 1983, *Landreform di Indonesia*, STIKI, Ujungpandang.
- Srirejeki, K, Faturahman, A., Warsidi, Ulfah, P & Herwiyanti, E. 2020, 'Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendekatan Aset Based Community-Driven Development', *Warta LPM*, vol. 23, no. 1.
- Sugiharyanto, Purwantara, S., Khotimah, N, 2013, 'Karakteristik spasial pengembangan wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks UUK DIY', Laporan hibah bersaing Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Trijayanti, E., & Muta'ali, L. 2017, 'Kualitas hidup nelayan Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul', *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(1).
- Widura, E. 2021, "Kerentanan Fisik Alami Sebagian Tipologi Wilayah Kepesisiran Gunungkidul:", Skripsi pada Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

PENGEMBANGAN REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI DI DESA KANIGORO KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Dwi Wulan Pujiriyani dan Ageliyah Juliani

Pendahuluan

Secara global, kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang menjadi wajah dari pedesaan dimana dua pertiga dari penduduk miskin di dunia adalah masyarakat miskin di pedesaan. Kontrol yang efektif terhadap sumber daya produktif khususnya tanah oleh masyarakat miskin di pedesaan, sangat krusial bagi mereka untuk bisa membangun penghidupan dan keluar dari kemiskinan. Hal ini dikarenakan pada berbagai situasi agraria, porsi pendapatan utama mereka masih berasal dari pertanian meskipun pada dasarnya mereka juga sudah mengenal diversifikasi mata pencaharian. Oleh karenanya, kurangnya akses pada tanah sangat berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan (Borras et al, 2005). Piagam Petani (*Peasant Charter*) menyebutkan bahwa transformasi kehidupan dan kegiatan pedesaan dalam semua aspeknya (ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, lingkungan dan kemanusiaan) merupakan salah satu tujuan reforma agraria. *The Peasant's Charter* juga menyebutkan tentang bagaimana usaha mula-mula dari reforma agraria adalah menghapus kemiskinan untuk mewujudkan pertumbuhan dengan pemerataan melalui redistribusi kuasa ekonomi dan politik serta partisipasi publik di bidang agraria. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa reforma agraria lekat dengan persoalan isu kemiskinan di pedesaan. Reforma agraria menjadi fondasi dari penataan aspek agraria yang dalam hal ini aspek ekonomi dan politik pun akan tertata (Hastiyanto, 2019).

Bertumpu pada upaya untuk membangun desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara jelas menghadirkan gagasan kemandirian desa. Berbekal kewenangan yang dimiliki, desa diharapkan menjadi arena sekaligus basis penghidupan bagi masyarakatnya melalui aset yang dimilikinya. Dalam konteks ini, penguasaan dan pemanfaatan aset di desa memerlukan tidak saja kepastian dan kejelasan status melalui proses inventarisasi, namun juga partisipasi dan kontrol masyarakat. Tujuannya agar penguasaan aset tidak didominasi semata untuk kepentingan elit desa (*elite capture*), namun juga dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam konteks itu, keadilan akses dalam kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria di desa mutlak dibutuhkan untuk menopang basis penghidupan masyarakat (Hariyono, 2017).

Dalam konteks menempatkan reforma agraria sebagai agenda membangun desa-desa di Indonesia, Pawonsari merupakan salah satu skema strategis yang sedang diupayakan untuk menjadi model pengembangan wilayah Jawa Bagian Selatan (JBS). Pembangunan di wilayah Jawa Bagian selatan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Kebutuhan pembangunan di wilayah ini diperlukan karena masih besarnya potensi sumber daya alam yang tersedia baik tanah yang subur, sumber daya laut, tambang dan tempat wisata. Pengembangan kawasan Jawa Bagian Selatan diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya di Indonesia khususnya Jawa Bagian Utara baik dari segi infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, demografi serta daya dukung lingkungan (Bahfein, 2020).

Dalam implementasinya, Pawonsari melibatkan tiga daerah pada tiga provinsi berbeda di kawasan Jawa Bagian Selatan, yaitu Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah dan Kecamatan Wonosari di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi JBS saat ini memiliki banyak tantangan yang oleh

karenanya dibutuhkan pengembangan di wilayah tersebut. Pawonsari akan dijadikan sebagai klaster untuk percobaan pembangunan pada era saat ini. Pawonsari akan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pawonsari akan dimasukkan dalam payung Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang akan dijadikan wadah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mendukung reforma agraria Pawonsari inilah diperlukan kajian lebih detail terkait potensi desa-desa di wilayah ini. Kajian mengenai pemetaan potensi desa sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan. Wibowo dan Alfarisy (2020) melakukan pemetaan potensi ekonomi desa dalam konteks mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki desa pada dasarnya menunjukkan bahwa pengembangan potensi desa harus diarahkan pada potensi unggulannya. Hal ini dimungkinkan karena secara strategis akan menunjang pengembangan potensi yang lain. Penelitian lain dilakukan oleh Vuspitasari, dkk (2021) mengenai pemetaan potensi Desa Sukamaju di Kabupaten Bengkayang. Dalam penelitian ini dijelaskan terkait rendahnya SDM, kurangnya pengetahuan, kurangnya peran desa dan kurangnya modal sebagai penghambat pengembangan desa. Sementara itu, penelitian Tyas dan Damayanti (2018), mengkaji tentang potensi pengembangan Desa Kliwonan sebagai desa wisata batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa ini belum siap menjadi sebuah desa wisata karena masih terdapat aspek sediaan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan yakni pada elemen aksesibilitas, *amenity*, informasi dan kelembagaan.

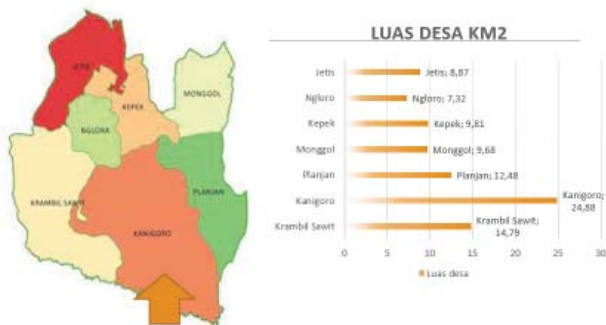
Penelitian serupa terkait dengan pengembangan potensi dilakukan Khadijah (2020) di Desa Jatiroke. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua masalah utama yang dimiliki oleh Desa Jatiroke. Yang pertama adalah berbagai potensi yang terdapat di desa yang belum diberdayakan dengan baik oleh masyarakat sekitar sendiri hingga pengurus desa. Potensi tersebut sangat beragam macamnya,

mulai dari potensi alam, potensi budaya, hingga potensi sumber daya masyarakatnya. Masalah kedua yang terjadi adalah bagaimana desa secara keseluruhan belum bisa dijadikan sebagai sebuah aset karena kurangnya pengelolaan sarana dan prasarana desa. Dari berbagai permasalahan tersebut, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan Desa Jatiroke sebagai sebuah desa wisata. Dalam mengembangkan sebuah desa wisata, terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan seperti memperbaiki berbagai infrastruktur desa, mengembangkan potensi budaya, serta melakukan pengembangan teknologi dengan menggunakan media sosial dan *website* sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Seluruh cara ini dapat dilakukan untuk mengembangkan desa Jatiroke sebagai sebuah desa wisata sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas yang akhirnya dapat meningkatkan tingkat perekonomian warga Desa Jatiroke itu sendiri. Diantara kajian yang ada, belum ada penelitian spesifik yang mengkorelasikan antara pemetaan potensi desa dengan program reforma agraria. Dalam hal inilah penelitian ini menjadi penting untuk secara langsung menempatkan pendalaman desa melalui potensi-potensinya untuk kemudian melihat peluang implementasi reforma agraria yang dapat dilakukan. Untuk selanjutnya tulisan ini ingin mengidentifikasi berbagai potensi yang ada di Desa Kanigoro serta mengetahui konsep pengembangan reforma agraria yang dapat dilakukan di Desa Kanigoro. Desa Kanigoro merupakan salah satu desa potensial yang berada di jalur pengembangan Pawonsari.

Bahan untuk kajian ini dilakukan penelitian lapangan yang dilakukan pada periode Juni 2021 sampai dengan September 2021. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dengan jenis dokumen di antaranya monografi desa, data statistik dari BPS Kabupaten Gunung Kidul, serta dokumen lain yang terkait baik berupa hasil penelitian maupun arsip dari desa. Sementara itu data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

Sejarah dan Riwayat Desa Kanigoro

Desa Kanigoro merupakan desa terluas di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Desa Kanigoro memiliki luas 24,88 km atau sekitar 28,33 persen dari luas Kecamatan Saptosari. Selain Kanigoro, sebenarnya terdapat 6 desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Saptosari, yaitu Desa Krambilsawit, Desa Planjan, Desa Monggol, Desa Kepek, Desa Ngloro dan Desa Jetis. Desa ini berada di ujung selatan wilayah Kecamatan Saptosari dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.



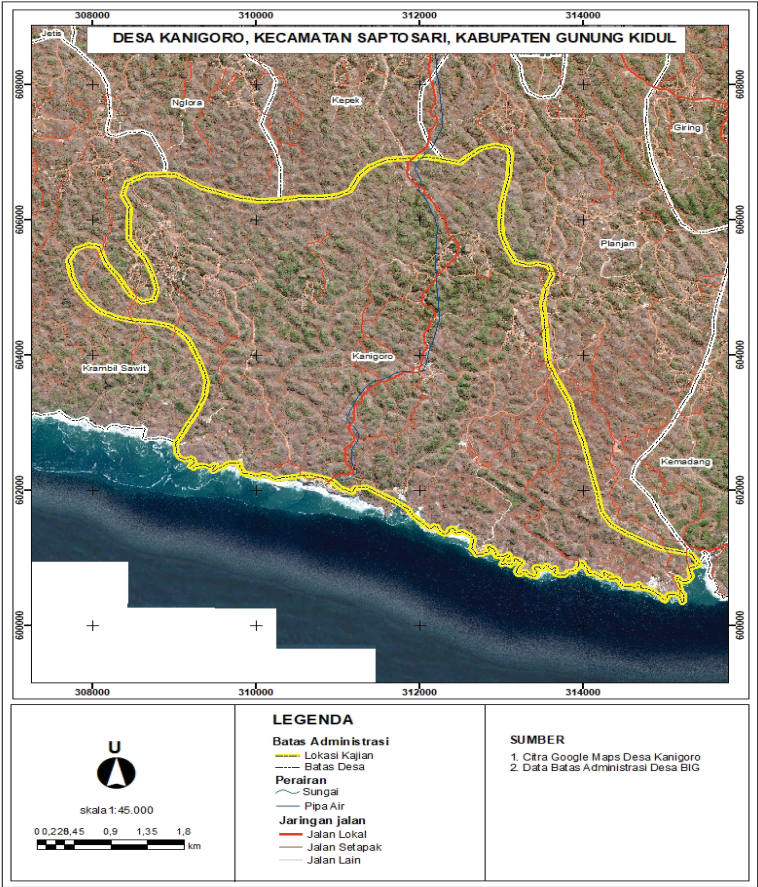
Sumber: Disarikan dari BPS Kabupaten Gunung Kidul, 2020.

Gambar 1. Perbandingan Luas Desa Kanigoro dengan Desa Lainnya di Wilayah Kecamatan Saptosari

Nama Kanigoro sendiri muncul dari legenda kampung bernama Jurug dimana dahulu kala diyakini terdapat pohon kehidupan berdiameter 45 meter yang dikenal dengan nama pohon Kanigoro. Mereka yang telah meninggal akan hidup kembali apabila diletakkan di bawah pohon kehidupan ini, begitupun mereka yang sakit akan serta merta bisa sembuh. Pohon ini pada akhirnya bisa ditebang dan nama Kanigoro inilah yang kemudian muncul dan dikenal sampai sekarang. Cerita lain tentang Desa Kanigoro juga muncul dari nama salah satu abdi Kerajaan Majapahit bernama Kebo Kanigoro yang hidup pada

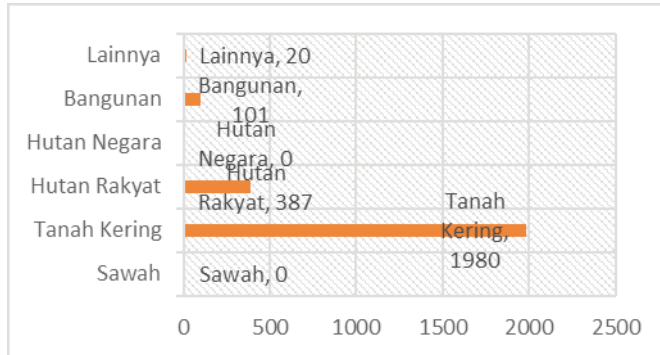
masa Raden Brawijaya V. Sebagaimana riwayat nama Kanigoro yang menyimpan cerita, Desa Kanigoro juga merupakan desa yang sangat khas bertahan dengan tradisinya. Hal ini juga ditegaskan oleh Afandi, dkk (2018), tradisi-tradisi yang dilakoni oleh masyarakat masih sangat kental seperti adanya kegiatan Rasulan atau bersih desa dan peringatan satu suro. Labuhan sesajen di Pantai Ngrenahan adalah salah satu tradisi yang juga masih lestari hingga kini.

Desa Kanigoro berjarak 41 km dari pusat kota Yogyakarta. Sebagaimana gambaran umum desa-desa di Gunung Kidul, lanskap desa ini juga didominasi oleh tanah kering. Hamparan permukaan tanah di Desa Kanigoro menunjukkan karakteristik umum dari wilayah Gunung Kidul yang didominasi oleh *karst*. Struktur tanah di desa Kanigoro sebagaimana karakteristik tanah karst, adalah lahan yang kurang subur untuk pertanian, rentan terjadi erosi dan tanah longsor, serta rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah. Permukaan lahan tampak kasar-kasar dan jamak dijumpai gunung-gunung baru dengan permukaan yang tajam.



Gambar 2. Peta Administrasi Desa Kanigoro

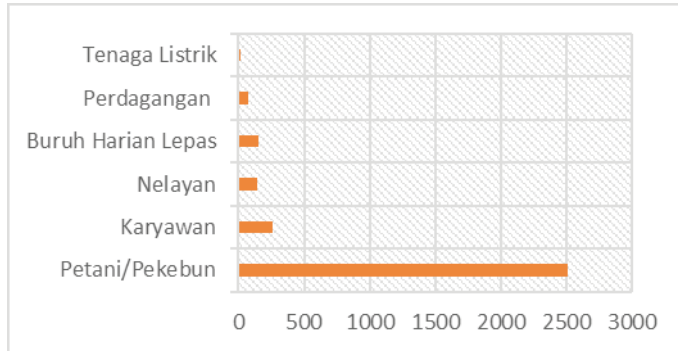
Untuk penggunaan lahan sendiri, Desa Kanigoro kembali lagi merupakan desa di Kecamatan Saptosari yang memiliki tanah kering paling luas yaitu 1980 hektar dan hutan rakyat yang juga paling luas yaitu 387 hektar. Penggunaan lahan di Desa Kanigoro dapat dilihat dalam Gambar 3.



Sumber: Kecamatan Saptosari Dalam Angka, 2020

Gambar 3. Penggunaan Lahan di Desa Kanigoro

Mengacu pada Wardono (2016), masyarakat Desa Kanigoro merupakan masyarakat yang telah mengalami perubahan mata pencaharian dari petani ke nelayan. Perubahan mata pencaharian di desa ini dimulai sekitar tahun 80-an. Semua ini berawal dari nelayan yang mendapat pelatihan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Baron. Namun data terkini menunjukkan bahwa struktur mata pencaharian masyarakat Desa Kanigoro masih didominasi oleh bidang pertanian/ perkebunan. Sebagian besar dari masyarakat Desa Kanigoro bekerja sebagai petani/pekebun sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 4. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Saptosari termasuk di Desa Kanigoro bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas tanaman pangan yang utama di Kecamatan Saptosari, yaitu padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. Dominasi mata pencaharian atau sumber penghidupan pada ekonomi berbasis lahan inilah yang menempatkan tanah sebagai aset yang sangat strategis bagi keberlangsungan penghidupan masyarakat.



Sumber: Monografi Desa Kanigoro, 2020.

Gambar 4. Struktur Mata Pencarian Masyarakat di Desa Kanigoro

Potensi Desa Kanigoro

Potensi Desa Kanigoro dapat dikategorikan menjadi lima potensi, yaitu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya buatan, potensi sumber daya manusia, potensi pertanahan dan tata ruang serta potensi perekonomian. Ragam dan peluang pemberdayaan dari masing-masing potensi ini dapat dicermati dalam Tabel 1.

Pertama adalah potensi sumber daya alam. Dalam hal ini, formasi batuan di Desa Kanigoro adalah Formasi Wonosari dengan luas 2.515 hektar. Formasi Wonosari merata di Desa Kanigoro. Terdapat dua jenis batuan yang ada di Desa Kanigoro ada dua macam, yaitu batu gamping dan endapan liat. Batu gamping yang ada di Desa Kanigoro seluas 2.254,34 hektar, sedangkan untuk endapan liat adalah seluas 121,07 hektar. Untuk jenis tanah yang ada di Desa Kanigoro adalah litosol dan mediterania merah. Jenis tanah litosol dan mediterania merah merata di Desa Kanigoro sehingga luas total untuk jenis tanah tersebut adalah 2.515 hektar. Desa Kanigoro memiliki kemiringan lahan yang sedang. Kemiringan lereng tersebut tersebar secara merata di wilayah desa maka luas seluruhnya untuk kemiringan total kelas lereng lahan tersebut adalah 2.515 hektar. Dari aspek sebaran

dan kondisi hidrologi, Desa Kanigoro memiliki jenis hidrologi yang akuifer celah, tinggi. Kondisi hidrologi tersebut tersebar secara merata di wilayah desa dengan luas total untuk kondisi hidrologi tersebut adalah 2.515 hektar.

Kedua adalah potensi sumber daya buatan. Sumber daya buatan yang ditemukan di Desa Kanigoro terutama berkaitan dengan penyediaan air bersih. Ada 3 sumber daya buatan yang ada, yaitu sumur bor, bak tadah hujan, dan mata air yang disalurkan melalui ledeng (PDAM) di Ngobaran. Sumber daya buatan yang ada di Desa Kanigoro ini memungkinkan Desa Kanigoro terbebas dari persoalan kekeringan yang jamak dihadapi oleh desa-desa di Gunung Kidul. Sumber daya buatan ini menjamin ketersediaan air bersih yang melimpah untuk bisa diakses oleh seluruh warga. Sumberdaya air ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tidak ada aktivitas pembelian air yang dilakukan masyarakat di desa ini. Sumber air di Ngobaran yang dialirkan melalui PDAM adalah sumber air yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Sementara itu, air hujan pun tidak dibiarkan begitu saja karena masyarakat memiliki bak tadah hujan yang dimanfaatkan untuk menampung air hujan.

Ketiga adalah potensi sumberdaya manusia. Jumlah penduduk umur produktif di Desa Kanigoro adalah sebanyak 4.673 jiwa. Umur non produktif dibagi menjadi dua, untuk anak-anak sebanyak 1.264 jiwa, sedangkan untuk orang tua sebanyak 931 jiwa. Penduduk usia produktif di Desa Kanigoro juga termasuk paling besar dibandingkan 6 desa lain di wilayah Kecamatan Saptosari yaitu sejumlah 4673 jiwa atau sekitar 17,3%. Tingkat pendidikan SLTA ke atas (sampai dengan D1/D3 dan S1) adalah sejumlah 380 jiwa.

Keempat adalah potensi pertanahan dan tata ruang. Lahan di Desa Kanigoro rata-rata dikuasai sendiri oleh pemiliknya. Saat ini terdapat 3028 tanah yang bersertifikat dengan luas total 650 ha. Belum banyak tanah yang beralih ke luar orang Desa Kanigoro maka dari itu tanah di Desa Kanigoro cukup istimewa. Hal tersebut dikarenakan pada

wisata pantai, status tanahnya merupakan tanah khas Desa. Karena di pantai lain biasanya berupa *Sultan Ground*. Pengelolaan pantai haruslah mendapatkan ijin. Ijin yang dimaksud adalah ijin berupa alih fungsi wisata dari pertanian. Pantai yang sudah mendapatkan ijin antara lain adalah Pantai Midodaren, Pantai Ngobaran serta Pantai Nguyahan. Sedangkan untuk Pantai Ngobaran sendiri memiliki keistimewaan karena dikelola oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Kepemilikan tanah di Desa Kanigoro cukup bervariasi. Kebanyakan tanah di Desa Kanigoro merupakan tanah AB. Tanah AB atau *Afkiren Bosch* merupakan tanah kawasan hutan Belanda dulunya dan sekarang menjadi tanah kehutanan. Tanah AB tersebut tidak tercantum pada Letter C, namun dapat ditemukan di dalam peta desa pada masa belanda. Tanah AB yang diatasnya dibangun rumah ada di beberapa dusun, yaitu Dusun Widoro, Dusun Ngresik dan Dusun Kranon. Sementara untuk pekarangan yang merupakan tanah AB ada di Dusun Kanigoro dan Dusun Gebang. Pada tahun 2012 terdapat program dari kehutanan terkait tanah AB. Tanah AB dari pekarangan bisa dijadikan hak milik, asalkan ditukar dengan tanah yang dekat dengan tanah AB yang lain. Hingga sekarang, status dari tanah AB tersebut masih dipertanyakan oleh masyarakat karena statusnya yang belum jelas. Pembagian wilayah AB tersebut masih dipertanyakan apakah sesuai dengan perjanjian Giyanti atau yang lainnya. Pertanian yang ada diatas tanah AB hingga saat ini masih berjalan dengan lancar. Tanah tersebut turun temurun digarap oleh sanak saudara, misalnya dari orang tua kemudian diturunkan ke anaknya yang menggarap selanjutnya. Namun mereka tetap tahu dan sadar bahwa tanah yang mereka garap itu merupakan tanah AB. Sehingga, untuk pertaniannya tidak bergilir, karena penggarapan dilakukan secara turun temurun. Selain itu, dasar hukum yang jelas terkait pengelolaan tanah AB hingga saat ini juga belum ada.

Kelima adalah potensi perekonomian desa. Potensi perekonomian ini meliputi: pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan,

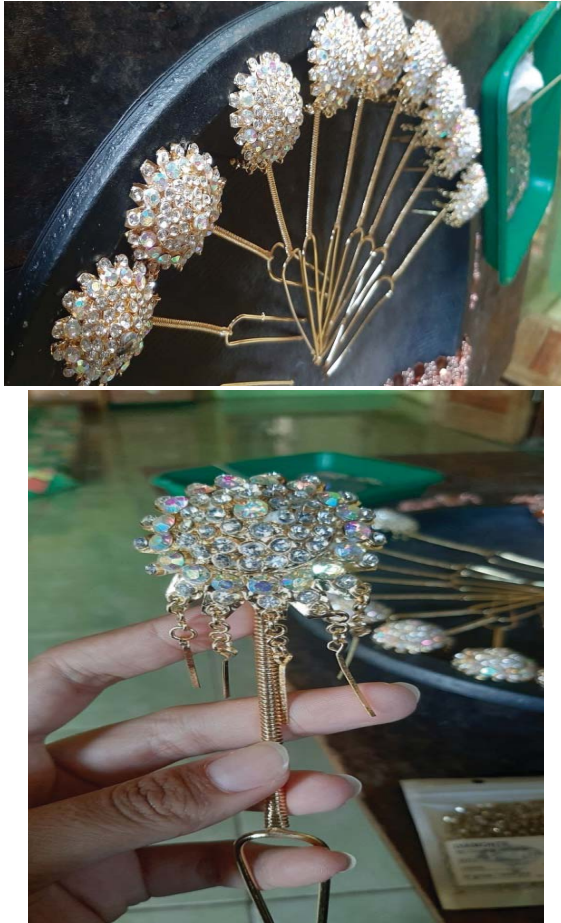
perindustrian, perdagangan, UKM dan Bumdes. Pertanian di Desa Kanigoro bergantung dari adanya hujan. Pertanian yang ada adalah pertanian tadah hujan dengan tanaman berupa palawija, termasuk padi. Masa panen untuk pertanian tersebut tentu saja hanya setahun sekali, tepatnya pada saat musim penghujan. Kendala yang ada di pertanian adalah adanya tikus dan kera ekor panjang. Hama tikus dapat dibasmi dengan obat-obatan, namun untuk kera ekor panjang tidak dapat dibunuh. Oleh karena itu, petani biasanya pergi ke sawah mulai jam enam pagi hingga enam sore untuk menunggu tanaman agar tidak diserang oleh kera ekor panjang. Biasanya kera-kera tersebut mengambil atau merusak tanaman seperti jagung. Selain itu, juga terdapat pohon jati sebagai tanaman selipan.

Sementara itu, untuk peternakan yang ada di Desa Kanigoro yang sudah berjalan ada sejumlah tiga peternakan. Dua diantaranya ada di Dusun Mendak dan Dusun Gebang. Ayam potong hasil ternak tersebut dijual kepada pengepul. Terkait dengan perikanan, jumlah perahu di Desa Kanigoro sebanyak lebih dari 100 perahu. Biasanya dalam satu perahu berisikan 2 atau 3 orang untuk sekali jalan. Waktu nelayan melaut adalah mulai pukul 03.00, sedangkan untuk mencapai daratan adalah antara pukul 09.00 hingga pukul 11.00. Nelayan pergi melaut setiap hari, kecuali pada Hari Jum'at Kliwon dan Selasa Kliwon. Terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Kanigoro dan dapat ditemukan pengepul di TPI tersebut. Hal ini menyebabkan warga membeli ikan melalui pengepul, bukan langsung dari TPI. Aktivitas tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga. Pengepul biasanya menjual ikan hingga ke luar kota.

Untuk perkebunan, singkong merupakan jenis tanaman perkebunan andalan di Desa Kanigoro. Hasil panen singkong yang melimpah menjadikan tanaman ini cukup potensial untuk dikembangkan. Pendampingan dan pengolahan singkong pernah dilakukan oleh salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Masyarakat Desa Kanigoro khususnya di Dusun Ngresik pernah diberikan

pendampingan pengolahan singkong. Singkong yang semula hanya dijual mentah atau diolah menjadi gaplek, kemudian mulai diolah menjadi kripik dan stik yang memiliki nilai jual lebih tinggi,

Terkait dengan perindustrian, *home industry* yang ada di Desa Kanigoro antara lain adalah kerajinan manik-manik yang dibuat untuk acara pernikahan atau pentas seperti mahkota, dan kalung.



Sumber: Dokumentasi, 2021

Gambar 5. Kerajinan Aksesoris Pengantin di Desa Kanigoro

Penjualan biasanya dilakukan melalui pengepul atau melalui *online*. Penjualan secara *online* perlu dikembangkan, karena sebelumnya toko *online* yang dimiliki hanya digunakan untuk menampilkan *display* dari kerajinan yang dibuat. Untuk pemesanan dapat dilakukan melalui kontak langsung dengan pengrajin, sehingga belum ada penilaian di toko *online*. Kerajinan lain yang dibuat adalah tempat sampah yang dibuat dengan menganyam daun. Tempat sampah tersebut dijual kepada pengepul yang nantinya akan dijual kembali ke kota. Pengrajin biasanya mengundang beberapa warga yang mau membantu untuk membuat kerajinan tersebut dan nantinya akan diberikan upah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan.

Perekonomian masyarakat Desa Kanigoro juga ada di sektor perdagangan. Terdapat banyak warung yang ada di pantai. Namun untuk pajak pendapatan belum ada, hal tersebut dikarenakan harus ada alih fungsi lahan terlebih dahulu agar dapat dilakukan penarikan pajak. Data jumlah usaha tersebut biasanya diperbaharui setiap tahun. Para pedagang biasanya merupakan orang-orang yang sudah lama berada di tempat itu. Pedagang makanan berupa warung makan di Pantai Ngrenehan cukup banyak. Pedagang makanan Pantai Nguyahan sebanyak 55 warung makan, namun yang hingga saat ini aktif hanya berjumlah 20 warung. Hal tersebut dikarenakan tidak bertahan lama karena adanya persaingan. Pernah ada satu warung yang hanya bertahan satu minggu akibat tidak laku, lalu kemudian tutup. Sementara di Pantai Ngobaran, penjual makanan berjumlah sekitar 50 warung. Biasanya warung makan tersebut buka mulai jam 7 pagi hingga sore hari. Penjual souvenir di Pantai Ngrenehan ada dua. Souvenir yang dijual mereka berupa kerajinan dari kerang. Bahan pembuatan souvenir tersebut didapat dari pantai yang ada di Desa Kanigoro, namun yang merangkai kerajinan tersebut adalah orang-orang dari Desa Kemadang. Kemudian apabila kerajinan tersebut sudah jadi akan diambil kembali untuk dijual di Pantai Ngrenehan. Selain kerajinan dari kerang, ada pula topi yang dijual yang diambil

dari Malioboro. Jasa foto di Pantai Ngrenahan ada sebanyak dua orang yang berasal dari Desa Kanigoro dan Planjen. Penjual yang ada di pantai, rata-rata menjual makanan untuk warung makan, sementara untuk pedagang yang lain menjual oleh-oleh khas hasil laut. Oleh-oleh tersebut dapat berupa *crispy* rumput laut, udang, abon, peyek, cumi-cumi dan lain sebagainya. Namun beberapa belum ada kemasannya, namun ada pula yang sudah ada kemasannya. Biasanya untuk oleh-oleh yang sudah ada kemasannya tersebut merupakan hasil dari UMKM yang ada.

Untuk wisata, Desa Kanigoro memiliki 17 titik pantai yang mana untuk sementara ada 4 titik yang telah dibuka untuk umum, yaitu Pantai Ngobaran, Ngrenahan, Nguyahan dan pantai Widodaren. Sementara 13 titik pantai yang lain, yakni Pringjono, Dadap Ayam, Dluwek, Toroudan, Ngranah, Peyuyon, Wagah, Mboyan, Kayuarum, Dluwuk, Krakal Kecil, Ngluwen dan Srunen. Kendala dalam pengembangan 14 titik pantai ini adalah belum tersedianya akses jalan. Jika akses jalan sudah tersedia, maka ke-13 titik ini akan sangat potensial jika dikembangkan.

Desa Kanigoro juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai desa wisata budaya. Selain keindahan pantainya, ada tradisi atau ritual yang sampai saat ini masih tumbuh dan dilestarikan masyarakat. Tradisi atau ritual ini, jika diintegrasikan dengan momen-momen tahunan besar yang sudah umum dikenal di Desa Kanigoro, seperti perayaan Melasti oleh umat Hindu yang dapat menjadi peluang pengembangan wisata yang sangat prospektif. Sampai hari ini, Labuhan Laut sudah menjadi salah satu daya tarik wisata yang cukup dikenal. Labuhan yang dilaksanakan setiap satu suro ini memberikan daya hidup bagi pantai Ngrenahan, salah satu pantai yang menjadi ikon Desa Kanigoro. Jika ke depan, destinasi wisata ini bisa dikemas sebagai satu kesatuan paket lengkap, Kanigoro akan menjadi salah satu tujuan wisata yang diperhitungkan. Tujuan wisata

yang tidak kalah populer dengan Pantai Kukup ataupun Pantai Baron yang sementara ini masih menjadi ikon favorit.



Sumber: <https://inibaru.id/tradisinesia/rasa-syukur-pada-tuhan-lewat-upacara-labuhan-laut-pantai-ngrenehan>. Diakses 9 Juli 2021

Gambar 6. Upacara Labuhan Laut di Pantai Ngrenehan

Sementara itu untuk potensi seni dan budaya, terdapat berbagai macam kesenian yang ada di Desa Kanigoro. Budaya yang masih ada hingga saat ini adalah ketoprak, karawitan, wayang kulit, reog, jathilan, ketok bambu (toklek) serta doger. Ketoprak di Desa Kanigoro terbagi menjadi tiga kelompok yang tersebar di Dusun Kranon, Dusun Klumpit dan Dusun Gebang. Kesenian ketoprak di Desa Kanigoro cukup menarik, sehingga juga sering diundang untuk tampil di berbagai acara, misalnya acara pernikahan serta rasulan. Kebudayaan di Desa Kanigoro merupakan suatu ciri khas yang tumbuh karena ada pakar seninya. Budaya-budaya tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian desa, namun seni tumbuh karena rasa suka dan keinginan untuk melestarikan budaya mereka. Sehingga, biasanya para anggota dari kelompok kesenian tersebut suka dengan apa yang mereka lakukan di kelompok mereka masing-masing.

Untuk UKM, saat ini yang ada adalah UMKM Mina Lestari yang ada di Pantai Ngrenehan sejak tahun 2000. Pesanan makanan di UMKM sebelum adanya pandemik bisa mencapai setengah kwintal.

Pesanan tersebut biasanya juga dititipkan di toko-toko. Mina Lestari sudah mendapatkan program pembinaan dari pemerintah. Sering ada kegiatan pengabdian mahasiswa atau KKN di UMKM tersebut.



Sumber: Dokumentasi, 2021

Gambar 7. UMKM Mina Lestari di Desa Kanigoro

Selanjutnya adalah BUMDES. BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Kanigoro sedang dalam masa perkembangan. BUMDES belum lama berdiri sehingga belum dapat memberikan pendapatan kepada pengelola atau yang menjaga bumdes. Bumdes menjual bahan pertanian, pulsa serta jasa parkir di pantai.

Tabel 1. Potensi dan Peluang Pemberdayaan di Desa Kanigoro

No	Potensi	Rincian	Peluang Pemberdayaan
1	Sumber Daya Alam	Jenis tanah didominasi oleh tanah mediterania (tanah kapur) dan tanah litosol	Sangat sesuai untuk palawija dan tanaman kayu keras bernilai ekonomis tinggi (kayu jati).
		Garam berkualitas tinggi	Pengembangan industri garam
2	Sumber Daya Buatan	Tersedianya sumur bor, bak penampung air hujan dan mata air yang dialirkan dengan kran melalui PDAM	Meretas mitos desa-desa Gunung Kidul yang terbelenggu kemiskinan karena kondisi alam yang tidak mendukung. Ke depan akan menjadi modal penting untuk pengembangan diversifikasi jenis usaha UKM karena tidak terkendala dengan kurangnya air (memungkinkan tersedianya air bersih sepanjang tahun (tidak pernah kekeringan). Kondisi ini akan mempermudah mencari alternatif jenis usaha.

3	Sumber Daya Manusia	Terdapat 467 warga berusia produktif yang 380 orang diantaranya berpendidikan (SLTA-D1/D3-S1)	Menjadi modal penting untuk pelaksanaan kegiatan padat karya dan juga padat modal.
4	Pertanahan dan Tata Ruang	Penguasaan lahan yang didominasi oleh warga Kanigoro sendiri/masih minimnya peralihan kepemilikan serta status tanah wisata pantai di Kanigoro yang merupakan tanah kas desa.	Menjadi modal penting untuk otonomi dan kemandirian desa sehingga meminimalkan intervensi dari eksternal desa
5	Perekonomian		
	Pertanian/ perkebunan	Jagung dan singkong sebagai hasil pertanian yang dominan	Bisa dikembangkan menjadi produk olahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani
	Peternakan	Terdapat ayam, kambing dan sapi yang menjadi ternak warga	Penataan pengelolaan dan penambahan modal untuk pengembangan usaha peternakan
	Perikanan (tangkap)	Sudah memiliki TPI (tempat pelelangan ikan) yang dikenal sebagai pusat ikan segar berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau.	Dikembangkan dengan mengintegrasikannya dengan pengelolaan wisata yang lebih profesional (memenuhi standar usaha pariwisata)

Perindustrian	Beragam <i>skill</i> dimiliki warga (kerajinan)	Dikelola secara serius dengan pengembangan <i>skill</i> wirausaha
Perdagangan	Sudah memiliki pasar desa	Perlu ditata dan dikembangkan untuk menjadi pusat ekonomi desa yang bisa terintegrasi dengan potensi wisata
Wisata	Memiliki 17 titik pantai	Dapat dioptimalkan untuk membuka banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian desa
Seni dan budaya	Dusun-dusun menjadi basis kelompok seni	Dioptimalkan sebagai pengikat kesatuan warga
UKM	Ada UKM yang sudah memiliki konsumen-konsumen loyal dengan tingkat pesanan yang tinggi.	Dapat menjadi penggerak bagi UKM-UKM lain
Bumdes	Melakukan usaha penjualan obat-obat pertanian, pulsa dan pengelolaan parkir wisata pantai Ngobaran	Dapat didorong sebagai motor penggerak perekonomian desa dan menciptakan berbagai kesempatan berusaha

Strategi Pembangunan Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah di Desa Kanigoro

Dari berbagai ragam potensi yang ada di Desa Kanigoro, teridentifikasi beberapa permasalahan spesifik yang memerlukan strategi untuk dapat dioptimalkan tata kelolanya. Tentu saja semua strategi ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagaimana semangat reforma agraria, semua potensi dan kekayaan SDA yang dimiliki desa harus dioptimalkan sepenuhnya agar manfaatnya dapat kembali ke desa dan untuk desa. Secara detail, potensi dan strategi dapat dicermati dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Potensi, Permasalahan dan Strategi Pembangunan RA

No	Potensi	Permasalahan	Strategi
1	Pertanian	Masih untuk konsumsi sendiri dan kebutuhan pasar setempat (internal desa)	Pengembangan hasil pertanian menjadi produk olahan termasuk di dalamnya standar pengemasan untuk bisa dilepas ke pasar, perizinan, dan jalur pemasarannya
2	Perikanan (tangkap dan budidaya)	Terbatasnya produk olahan hasil laut yang menyebabkan produk cepat rusak, belum maksimalnya penataan di tempat pelelangan ikan	Pendampingan terkait teknik pengolahan hasil laut supaya dapat memenuhi standar pasar dan penataan ulang tempat pelelangan ikan yang lebih rapi dan bersih

3	Peternakan	Nilai jual yang fluktuatif, beban produksi akibat biaya pakan yang tinggi, dan konstruksi kandang yang kurang memadai	Pendampingan terkait tata kelola peternakan yang baik dan pengembangan jejaring peternak di desa atau daerah lain yang lebih maju
4	Perkebunan	Masih terbatas untuk konsumsi sendiri dan penjualan di pasar setempat/lokal	Meningkatkan nilai tambah dengan mengolah hasil perkebunan menjadi makanan olahan yang diintegrasikan dengan pengembangan wisata pantai Desa Kanigoro
5	Perindustrian	Warga desa hanya menjadi tenaga kerja murah dari para pengepul	Pendampingan yang intensif untuk pengembangan kewirausahaan dan pelatihan pemasaran melalui digital marketing
6	Perdagangan	Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pemasaran hasil pertanian maupun produk olahan	Mendorong perbaikan infrastruktur perdagangan (pasar desa) dan pelatihan terkait strategi-strategi pemasaran dan pengetahuan terkait investasi

7	Kepariwisataan	Keterbatasan infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata dan terbatasnya penginapan (homestay) yang memenuhi standar	Pembangunan infrastruktur transportasi dan penginapan serta pengintegrasian destinasi dalam paket wisata tematik
8	Usaha Kecil Menengah (UKM)	Keengganan masyarakat untuk keluar dari zona aman (enggan mencoba sesuatu yang baru)	Meningkatkan interaksi dan mengembangkan pengalaman dengan membuka jejaring UKM di luar desa, mendorong sistem bapak angkat untuk usaha kecil (kemitraan usaha kecil menengah dengan industri besar)
9	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Terbatasnya pengembangan jenis usaha dan keterbatasan SDM untuk mengelola	Menambah variasi jenis usaha dan mengoptimalkan keberadaan SDM potensial dari orang-orang muda

Penutup

Kemiskinan di pedesaan salah satunya adalah akibat dari ketimpangan penguasaan sumber agraria, maka reforma agraria adalah jalan yang diperlukan bagi mayoritas penduduk desa yang masih miskin agar lebih sejahtera dan produktif dengan menyediakan tanah sebagai alat produksi bagi petani kecil dan buruh tani khususnya perempuan, menjamin kepemilikan dan kontrol atas tanah yang

mereka garap dan mengembalikan hak teritori masyarakat. Desa Kanigoro memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang sangat baik. Meskipun demikian seluruh potensi ini belum terintegrasi dengan baik. Pariwisata dapat menjadi ikon utama potensi desa untuk bisa mengangkat potensi yang lain. Jika semuanya bisa diintegrasikan dengan baik, maka perekonomian desa akan berkembang menjadi desa yang maju. Reforma agraria dapat mengambil tempat dalam hal ini untuk memastikan bahwa sumberdaya agraria yang dimiliki desa dapat dioptimalisasikan sepenuhnya.

Desa perlu dibekali dan diperkuat dengan pendampingan yang bersifat berkelanjutan. Selama ini program pendampingan yang masuk ke desa seringkali berhenti pada kegiatan utama, tanpa adanya proses monitoring dan tindak lanjut kegiatan. Oleh karenanya kebijakan pendampingan yang akan masuk ke desa harus dipastikan akan melewati tiga tahapan ini dan tidak boleh menggunakan konsep program *'hit and run'*. Reforma agraria dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.

Daftar Pustaka

- Afandi MY, Siswanto PE, Hasbana A, Nurjati IR, Utami RP, Fardila R, Trisnawati S, Oktaviana, W.R. Membangun Pola Pikir Masyarakat Dalam Upaya Optimalisasi Kearifan Lokal Melengan Klumpit Kanigoro Saptosari Gunungkidul Melalui Program Kampung Wisata. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 18(2), 109-116.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kecamatan Saptosari Dalam Angka 2020*. Kabupaten Gunung Kidul: BPS Kabupaten Gunung Kidul.
- Bahfein, S. 2020. Wamen ATR/BPN Minta Pemetaan Potensi Jawa

- Bagian Selatan Dipercepat. <https://properti.kompas.com/read/2020/07/22/193307621/wamen-atr-bpn-minta-pemetaan-potensi-jawa-bagian-selatan-dipercepat>. Diakses 14 Desember 2021.
- Bahfein, S. 2021. Pawonsari Bakal Jadi Model Pengembangan Jawa Bagian Selatan. <https://properti.kompas.com/read/2021/04/02/190130321/pawonsari-bakal-jadi-model-pengembangan-jawa-bagian-selatan>. Diakses 14 Desember 2021.
- Borras Jr, Kay C, Lodhi AHA. 2005. Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Hariyono, Tri. 2017. Current Issues. ISS/UNDP Land, Poverty and Public Action Policy Paper No 1.
- Desa dan Reforma Agraria di Indonesia. <https://spi.or.id/desa-reforma-agraria-di-indonesia>. Diakses Oktober 2021.
- Hastiyanto, F. 2019. Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial Dalam Reforma Agraria di Indonesia. *Kybernani: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 18-28.
- Khadijah, S. 2020. Potensi Desa Jatiroke sebagai Desa Wisata. *Tornare Journal of Sustainable Tourism Research*. 3(1), 27-31.
- Tyas NW, Damayanti M. 2018. Potensi Pengembangan Desa Kliwonan sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. 2(1), 74-89.
- Ulfah IF, Setiawan A, Rahmawati A. 2017. Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. 2(1), 46-64.
- Vuspitasari BK, Deffrinica D, Siahaan SV. 2021. Menggali Peluang Ekonomi Kreatif Melalui Potensi Desa Suka Maju Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*. 25(1), 181-187.

- Wardono, B. 2016. Perubahan Mata Pencaharian Dari Petani ke Nelayan Perikanan Tangkap Laut di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2(2), 73-80.
- Wibowo AA, Alfariy MF. 2020. Analisis Potensi Ekonomi Desa dan Prospek Pengembangannya. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*. 22(2), 204-218.

PEMBANGUNAN REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DI KALURAHAN NGLANGGERAN – KAPANEWONAN PATUK-KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN KALURAHAN BLEBERAN-KAPANEWONAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sukmo Pinuji, Trisnanti Widi Rineksi, Sri Kistiayah

A. Pendahuluan

Reforma agraria merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah untuk mewujudkan tanah sebagai sebesar-besarnya sumber kemakmuran bersama. Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia diarahkan dengan melakukan perubahan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum terhadap penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah .

Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-Ma'ruf Amin (2019-2024) mempunyai tiga kegiatan penting reforma agraria yang kemudian berimplikasi pada penetapan arah kebijakan pertanahan di Indonesia, yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu pelaksanaan program prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan sejalan dengan *road map* reforma agraria dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BPN 2020-2024. Sasaran pelaksanaan *road map* reforma agrarian yaitu terwujudnya arah kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan kinerja Program Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 hingga mencapai visi besar yaitu menjadi lembaga pengelola penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun 2024.

Percepatan pembangunan Jawa Bagian Selatan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah saat ini mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk ikut berperan serta dalam mewujudkannya. Prioritas pembangunan nasional ini berdampak pada tuntutan pengelolaan pertanahan yang komprehensif dan dapat memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Terlebih lagi, Jawa Bagian Selatan memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan Jawa Bagian Utara, yang memberikan konsekuensi pada semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Salah satu alasan utama kenapa Jawa Bagian Selatan ini memiliki tantangan yang lebih adalah dari kondisi geografis yang jauh berbeda dengan wilayah utara. Sebagai contoh, Jawa Bagian Selatan (JBS) merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam, baik gempa bumi maupun tsunami. Pantai di wilayah selatan pulau Jawa merupakan pantai lepas yang langsung menghadap ke Samudera Hindia, dan memiliki gelombang yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pantai utara Jawa. Dalam beberapa penelitian juga disebutkan bahwa beberapa wilayah di JBS lebih rawan terhadap kekeringan jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa, yang kemudian juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, JBS juga memiliki karakteristik geografis yang khas, yang menyebabkan wilayah ini tertinggal jika dibandingkan dengan Jawa Bagian Utara. Terkait dengan hal tersebut, melalui gagasan Pawonsari, Kementerian ATR/BPN berusaha untuk mengembangkan roadmap rencana strategis pengembangan pertanahan terintegrasi yang dimuat dalam satuan geografis yang memiliki karakteristik kewilayahan yang sama. Gagasan Pawonsari ini merupakan rancangan pembangunan terpadu yang meliputi wilayah Pacitan, Wonogiri dan Wonosari yang merupakan wilayah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa dan memiliki karakteristik geografis yang serupa berupa perbukitan dan pegunungan kapur (*karst*). Saat ini, Kementerian ATR/BPN melalui

Ditjen Penataan Agraria di bawah kendali Direktorat Landreform sedang merancang roadmap pembangunan Pawonsari yang merupakan bagian dari percepatan pembangunan Jawa Bagian Selatan. Hal ini juga berkesinambungan dengan dilaksanakannya proyek pembangunan jalan lintas selatan Jawa yang direncanakan akan selesai di tahun 2024. Pembangunan JLS ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi pertanahan di wilayah Jawa Bagian Selatan.

Untuk dapat melakukan percepatan pembangunan Pawonsari serta merumuskan strategi yang menyeluruh serta terpadu, dilakukan kajian yang bersifat holistik dan menyeluruh yang meliputi sektor ekonomi, sosial, budaya, geografis maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk dapat mengidentifikasi dan mengenali potensi wilayah terkait agar dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan strategi pembangunan pertanahan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah tersebut. Hal lain yang juga menarik adalah bahwa pembangunan Pawonsari bersifat lintas-wilayah dan lintas-provinsi, yang tentunya juga memberikan konsekuensi administratif serta hierarki kewenangan yang menantang, yang menjadikan koordinasi menjadi salah satu kunci yang penting untuk dapat dipenuhi. Pembangunan Pawonsari tidak dapat dilakukan sebagai satuan terpisah, dan membutuhkan sebuah *action plan* yang bersifat terpadu dan komprehensif. Koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting dilakukan agar hal ini dapat berjalan dengan baik.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka dukungan data dasar sangat diperlukan agar dapat dijadikan sebagai strategi masukan penyusunan kebijakan. Data dasar tersebut meliputi data sosial, ekonomi, budaya, fisik, geografis, serta kependudukan, yang dapat memberikan gambaran kompleks wilayah Pawonsari secara komprehensif. Kebutuhan data dasar tersebut tidak hanya sebatas pada aspek pertanahan yang meliputi penggunaan, pemanfaatan,

pemilikan dan penguasaannya, tapi secara lebih luas juga harus mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kewilayahan dan masyarakat setempat. Selain itu, pengenalan terhadap potensi daerah juga diperlukan untuk dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai *entry point* dalam percepatan pembangunan berbasis reforma agraria yang akan dilakukan di wilayah Pawonsari. Data tersebut diperlukan untuk dapat mengenali karakteristik kewilayahan dan tipe/pola pembangunan pertanian yang sesuai dengan karakteristik tersebut, agar dapat digunakan dalam merumuskan strategi kebijakan yang sesuai.

Penelitian ini merupakan rangkaian penelitian potensi Reforma Agraria kawasan Pawonsari yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengenali karakteristik dan potensi dari wilayah penelitian, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, geografis, kependudukan, maupun pemerintahan, yang nantinya akan digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan berbasis reforma agraria. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah memberi gambaran karakteristik wilayah dan menjadi bahan masukan bagi dikembangkannya *roadmap* percepatan reforma agraria di wilayah Pawonsari agar dapat dikembangkan menjadi strategi kebijakan yang komprehensif.

Dipilihnya wilayah Kabupaten Gunung Kidul, secara khusus pada penelitian ini adalah Kalurahan Bleberan dan Kalurahan Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul tidak terlepas dari keunikan karakteristik wilayah Gunung Kidul terutama dari sisi geografis, dimana sebagian besar wilayah Gunung Kidul, termasuk di dalamnya lokus penelitian, Bleberan dan Nglanggeran, merupakan daerah pegunungan dengan batuan karst yang menjadikannya menjadi salah satu wilayah yang memiliki bentang alam yang cukup spesifik. Selama beberapa dekade Gunung Kidul juga dikenal sebagai wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang 'terbelakang' jika dibandingkan dengan wilayah lain

di Provinsi DIY, sebelum akhirnya dapat mempromosikan dirinya di sektor pariwisata, dengan menonjolkan karakteristik geologis dan bentang alam yang dimilikinya.

Dalam merumuskan strategi optimalisasi potensi kewilayahan yang digunakan untuk pengembangan reforma agraria berbasis potensi wilayah, penelitian ini berasumsi bahwa dengan karakteristik geografis yang dimilikinya, lokus penelitian ini memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Selain itu, dengan dicanangkannya Gunung Kidul sebagai kawasan geowisata juga merupakan *entry point* yang sangat penting dalam mendesain strategi pembangunan berbasis reforma agraria yang ada di wilayah penelitian. Merujuk kepada hal tersebut, maka penelitian ini menjabarkannya menjadi beberapa pertanyaan penelitian berikut:

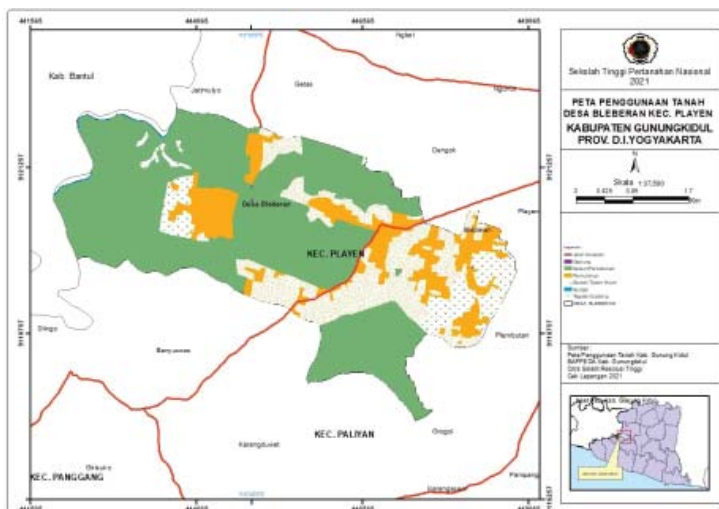
1. Apa saja karakteristik kewilayahan yang menonjol di wilayah penelitian yang dapat dikembangkan menggunakan skema pembangunan berbasis reforma agraria?
2. Bagaimana strategi pengembangan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut?

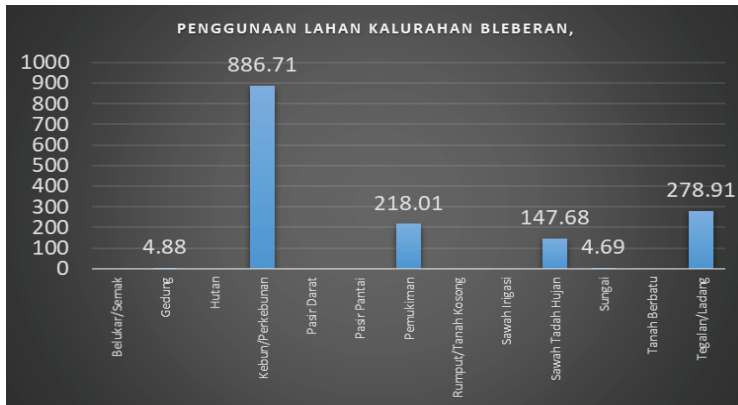
B. Potensi dalam Pengembangan Kalurahan Bleberan

Daerah Bleberan merupakan daerah karst. Daerah ini merupakan daerah berbukit-bukit. Dengan jenis tanah tersebut ditambah dengan bentuk topografi yang berbukit menyebabkan kemampuan lahan untuk pertanian sangat sedikit dan lahan sangat rawan terhadap ancaman proses erosi tanah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan konservasi tanah untuk mempertahankan keberadaan tanah di daerah karst. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini adalah dengan membuat bangunan terasering di lahan-lahan pertanian. Sistem terasering ini dilakukan dengan mengumpulkan batu-batu kapur yang kemudian disusun rapi sejajar kontur. Harapan dari sistem ini adalah tanah yang terdapat di permukaan batuan karst pada waktu musim hujan tidak hilang oleh

proses erosi, akan tetapi tanah tersebut dapat tertahan oleh bangunan-bangunan terasering dan lama kelamaan lapisan tanah akan terus bertambah sehingga ketebalan tanah meningkat. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan tanah di lahan pertanian selain dengan menerapkan sistem terasering, masyarakat juga melakukan penanaman tanaman keras di tepi lahan pertanian untuk menahan tanah melalui sistem perakaran tanamannya. Tanaman keras yang banyak di pilih oleh masyarakat adalah jenis Jati (*Tectona grandis*) karena memiliki perakaran dangkal yang sesuai dengan ketebalan tanah, juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dari kayu yang dihasilkan.

Penggunaan tanah di wilayah Kalurahan Bleberan didominasi dengan tanah untuk kebun dan perkebunan seluas kurang lebih 886.71 Ha. Selanjutnya penggunaan tanah untuk tegalan 278.91 Ha, permukiman 218 Ha, dan sawah tadah hujan seluas 147.68 Ha. Besarnya luas penggunaan tanah untuk kebun, perkebunan, sawah dan tegalan mengindikasikan bahwa dominasi penggunaan tanah di Kalurahan Bleberan adalah untuk kegiatan pertanian.





Sumber: Pengolahan Data, 2021

Gambar 1. Penggunaan Tanah Kalurahan Bleberan

Pada wilayah Kalurahan Bleberan, terdapat dusun yang potensial menjadi wilayah pertanian, yaitu di daerah Ponjong. Hal ini terkait dengan potensi sumber air yang ada di wilayah Ponjong, yang menonjol jika dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, wilayah Bleberan dan Kapanewon Playen pada umumnya juga terkenal dengan hasil ubi kayu, yang merupakan penghasil ubi kayu terbanyak nomor 5 di Indonesia. Ubi kayu ini nantinya digunakan sebagai pasokan bagi pabrik pembuatan tepung ubi yang ada di wilayah Wonogiri. Potensi lain yang menonjol adalah kacang tanah, kacang hijau dan kunir. Di wilayah Bleberan juga terdapat rintisan usaha jamur tiram yang dimulai di tahun 2019, dan merupakan kerjasama dengan Korea.

- **Potensi Pertanian**

Sektor pertanian masih menjadi sector unggulan di Kalurahan Bleberan. Jenis pertanian yang menjadi unggulan adalah: Jagung, Kedelai, Padi, ketela sedang untuk sayuran seperti kol, cabe, kacang panjang, ketimun, terong. Umumnya jagung, ketela pohon atau kacang tanah ditanam secara bersamaan dalam satu lahan pada musim hujan. Jika musim hujan berkepanjangan, kacang tanah, kedelai atau kacang hijau ditanam untuk rotasi kedua. Jenis pemanfaatan lahan ini

sebagian besar ditanam di dasar depresi tertutup, lembah kering, dan lereng kaki perbukitan karst. Di sisi lain, kebun campuran ditanam di lereng perbukitan karst atau di tanah dekat permukiman. Tanaman yang tumbuh di kebun campuran sangat beragam, kebanyakan adalah tanaman kayu, tanaman buah atau tanaman industri lainnya.

Walaupun sector pertanian sampai dengan saat ini masih menjadi andalan masarakat Kalurahan Bleberan yang memang mayoritas petani, namun yang menjadi kendala adalah kepemilikan lahan petani yang rata – rata masarakat petani hanya memiliki lahan 0,25 ha /kk sehingga di masa mendatang aspek menejemen kelembagaan harus mendapatkan perhatian yang serius serta kedepan diperlukan pembangunan pertanian dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya alam dan manusia dengan didukung tehnologi anjuran terkini dan sepesifik serta memperhatikan daya dukung lahan, dan juga pendampingan kelompok – kelompok tani agar menjadi lebih mandiri.

- **Potensi Peternakan**

Di Kalurahan Bleberan terdapat ternak sapi, yakni sebanyak 1,216 ekor sapi. Ternak kambing/domba sebanyak 1,343 ekor, dan ayam sebanyak 14,263 ekor (BPS, 2020). Di Kalurahan Bleberan terdapat Kelompok ternak andini mulyo di Dusun Sawahan I merupakan salah satu kelompok ternak terbaik di Gunung Kidul. Jenis sapi yang diternak adalah api Peranakan Ongole (PO). Jumlah anggota lebih dari 50 anggota, dan lebih dari 80 ekor sapi betina dan 40 ekor sapi jantan. usaha kelompok yaitu pemeliharaan dan penggemukan sapi, simpan pinjam dan pembuatan pupuk organik.



Sumber: Sugiyarto dkk, 2015 dalam <https://andinimulyosawahan.wordpress.com/2015/04/05/profil-andini-mulyo>

Gambar 2. Kandang Komunal Sapi Peternakan Sapi Andini Mulyo

- **Potensi UKM**

UKM yang ada di Kalurahan Bleberan antara lain UKM pembuatan tepung mocaf yang bahan baku utamanya berasal dari ketela (casava), yang merupakan produk hasil pertanian dari Kalurahan Bleberan ini. Tepung mocaf ini pemasarannya masih dalam skala kecil. Selain itu juga terdapat Kelompok budidaya jamur tiram AMURA (80 rumah jamur), pemasaran langsung on site, market place online, maupun dipasarkan ke Swayalan Progo (Kota Yogyakarta).

- **Potensi BUMDES**

BUMDesa saat ini mendukung sector pariwisata di Kalurahan Bleberan. Pengelolaan pariwisata saat ini sudah cukup baik sehingga sudah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, tetapi masih bisa dikembangkan lebih maksimal sehingga akan mampu mendorong pendapatan Asli Desa.

BUMDES di Kalurahan Bleberan bernama BUMDES Sejahtera. BUMDES ini didirikan pada tahun 2007, dengan empat unit usaha, yaitu Unit Pengelola Desa Wisata, Simpan Pinjam, Air Bersih, dan GSG Saemaul (bekerjasama dengan Korea Selatan membudidayakan jamur tiram). BUMDES ini didirikan hasil dari musdes pembentukan

BUMDESA dengan PERDES NO.I /KPTS/2007. Unit pertama yg di kelola Pengelolaan air bersih (PAB).

Latar belakang dari pendirian BUMDES ini pada dasarnya adalah karena Keprihatinan warga masyarakat ttg kesulitan akan air bersih. Setiap musim kemarau mengalami kekurangan air bersih, Keprihatinan ttg PAD Desa Bleberan yg rata – rata per tahun kurang dari Rp.1.000.000, serta Masyarakat kecil susah untuk dapat mengakses modal dari perbankan.Kalurahan Bleberan merupakan daerah karst sehingga masyarakat harus menggali sumur >25 meter untuk mendapatkan air bersih. Di musim kemarau harus membeli air per kk 1 s/d 5 tengki per bulan @ Rp. 100.000. Mata Air Jambe yang dikelola oleh BUMDES sejak tahun 2012. Mata air ini memiliki debit air 80 liter / detik dan melayani 742 sambungan rumah tangga.Pendapatan pertahun mencapai lebih dari 2 M dengan sumbangan paling besar diperoleh dari sector wisata (Sri Gethuk).

- **Potensi Wisata**

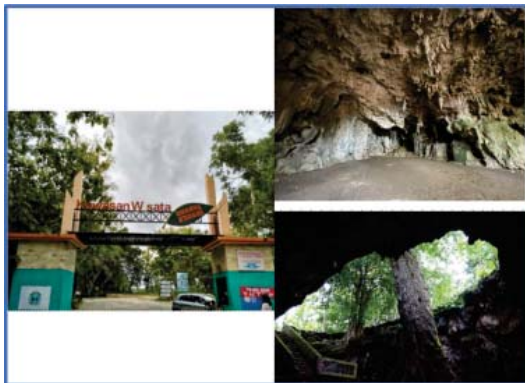
Dewasa ini dengan arus informasi dan media sosial menjadikan obyek-obyek wisata di Gunungkidul mulai diketahui masyarakat luas. Hal tersebut memunculkan opini public yang muncul dalam media sosial yang menyebutkan Gunungkidul merupakan hidden paradise bagi khususnya wisatawan usia muda. Hal ini menimbulkan terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata baru yang bisa dikatakan masih kurang layak tersebut.Kalurahan Bleberan memiliki obyek wisata alam yang memiliki daya tarik yang cukup unik dan potensial untuk berkembang. Potensi tersebut sudah dapat dikemas menjadi destinasi wisata. Destinasi wisata tersebut adalah Air terjun Sri Getuk. Pengelolaan kegiatan pariwisata dan pemanfaatan potensi wisata dirintis oleh pemerintah desa Bleberan dengan dibentuknya badan usaha milik desa yang bernama Desa Wisata Bleberan. Desa Wisata Bleberan sendiri merupakan poros penggerak, motivator dan komunikator dalam pengelolaan potensi wisata di

desa Bleberan. Air terjun Sri Getuk menjadi ikon obyek wisata yang ditawarkan pihak Desa Wisata Bleberan. Selain dikembangkan sebagai ikon, diharapkan seiring berkembangnya Air terjun Sri Getuk akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mendorong Desa Wisata Bleberan berupaya keras meningkatkan setiap komponen kepariwisataan yang ada di area Air terjun Sri Getuk, termasuk diantaranya bagaimana membentuk kesadaran masyarakat sekitar obyek wisata yaitu masyarakat dusun Menggoran dapat sebagai subyek dan penerima manfaat pembangunan pariwisata obyek wisata Air terjun Sri Getuk.



Sumber: Survey Lapangan, 2021

Gambar 3. Wisata Air Terjun Srigethuk



Sumber: Survey Lapangan, 2021

Gambar 4. Gua Rancang Kencono

Secara historis, gua ini adalah lokasi tempat tentara mataram menyusun strategi. Gua ini merupakan gua purba, didasarkan pada temuan artefak dan tulang belulang yang diperkirakan hidup ribuan tahun yang lalu. Gw ini memiliki ruangan yang luas dengan pohon klumpit (*Terminalia edulis*) yang juga diperkirakan berumur sekitar 200 tahun. Pada saat penelitian dilakukan, Obyek Wisata ini sudah tutup selama lebih dari 2 bulan. Masyarakat pengelola Kembali ke aktivitas awal mereka sebagai petani.

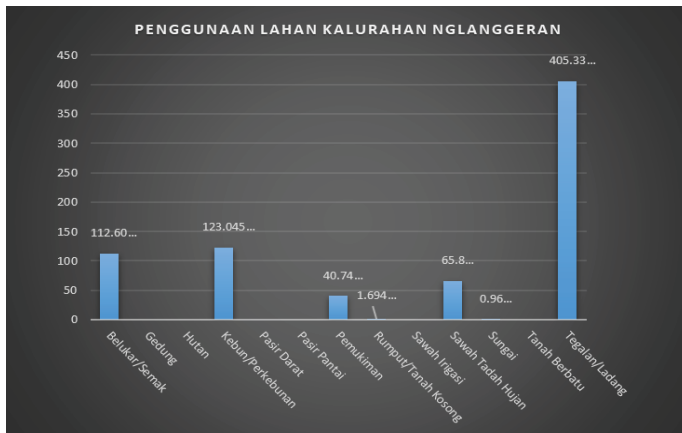
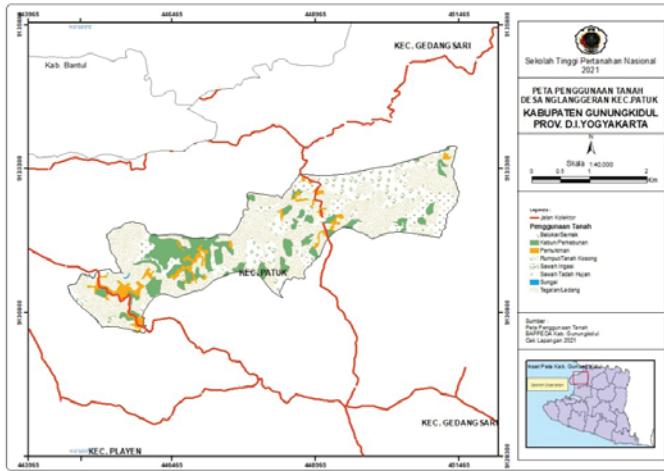
Pokdarwis Bleberan memiliki peranan penting dalam mengelola wisata desa bleberan. Salah satu tindakan nyata pokdarwis adalah memfasilitasi obyek wisata Sri Getuk yang rusak akibat banjir. Banjir besar karena siklon cempaka pada Tahun 2017 telah memporak porandakan salah satu objek wisata Srigethuk yang berada di kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul. Akibat banjir tersebut dermaga dan perahu serta beberapa fasilitas lainnya ikut hanyut terbawa banjir yang sangat dasyat dan terbilang baru pertama kali terjadi. Akibatnya pelayanan dan kegiatan pariwisata di Srigethuk nyaris lumpuh dan tidak bisa beroperasi secara normal untuk sementara waktu. Melihat hal itu upaya pembenahan dan rehabilitasi terus dilakukan untuk pemulihan objek wisata yang dilakukan oleh pokdarwis. Dengan melakukan pendataan dan upaya mencari bantuan kepada Dinas terkait agar harapannya segera bisa merenovasi dan mempercepat pemulihan layanan wisata. Akhirnya setelah melalui usulan dan pengajuan proposal akhirnya Pemerintah pusat merespon usulan renovasi objek wisata Srigethuk melalui BPBD kabupaten Gunungkidul telah menanggarkan dana untuk kegiatan renovasi dan rehabilitasi meskipun tertunda. Titik terang realisasi pembangunan pemeliharaan dan renovasi Srigethuk baru ada kejelasan setelah dari pihak kalurahan Bleberan dan pokdarwis mendapat undangan dari BPBD Gunungkidul terkait dengan sosialisasi kegiatan pembangunan dermaga dan talud di Srigethuk yang akan dilaksanakan mulai akhir maret 2021 setelah terjadi kontrak dengan penyedia barang dan

jasa. Kami menyambut baik dan sangat bersyukur ahirnya renovasi dermaga dan talud di objek wisata Srighetuk bisa terealisasi dan harapannya semoga bisa meningkatkan layanan dan kemajuan wisata di Kalurahan Bleberan utamanya di objek wisata srighetuk.

Secara umum akses bagi wisatawan menuju lokasi obyek wisata mudah. Aksesibilitas tersebut mencakup ketersediaan jaringan jalan, moda transportasi, dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) menuju obyek wisata. Kondisi jalan Kalurahan Bleberan menuju obyek wisata Air Terjun Sri Getuk telah beraspal, sedangkan kondisi jalan lingkar dalam kawasan wisata belum beraspal sepanjang 2,2 km. Untuk menuju ke obyek wisata dapat ditempuh melalui empat koridor yaitu: koridor pertama, untuk wisatawan dari arah barat yang melewati Yogyakarta; koridor kedua, dari arah barat melalui Kabupaten Bantul; koridor ketiga, dari arah utara melalui Solo/Sukoharjo (Jawa Tengah); koridor empat, untuk wisatawan dari arah timur melalui Wonogiri. Angkutan umum belum tersedia untuk mencapai ke obyek wisata. RPPJ terpasang hampir pada setiap persimpangan jalan besar. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung wisata yang tersedia diantaranya: home stay, rumah makan dan toko, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi, fasilitas informasi dan promosi, mushola tempat parkir.

C. Potensi dalam Pengembangan Kalurahan Nglanggeran

Penggunaan tanah di wilayah Desa Nglangeran didominasi dengan tanah untuk Tegalan dan ladang seluas kurang lebih 886.71 Ha. Selanjutnya penggunaan tanah untuk tegalan 405,33 Ha, Kebun/perkebunan seluas 123 Ha, Belukar semak seluas 112 Ha, sawah tadah hujan seluas 65,8 Ha, permukiman 40,74 Ha Penggunaan tanah untuk kebun, perkebunan, sawah dan tegalan mengindikasikan bahwa dominasi penggunaan tanah di Kalurahan Nglanggeran adalah untuk kegiatan pertanian.



Sumber: Pengolahan Data, 2021

Gambar 5. Penggunaan Tanah Kalurahan Nglanggeran

• Potensi Pertanian

Jika dilihat dari aspek tata guna lahan serta penggunaan tanahnya, pertanian masih menjadi sektor utama perekonomian desa. Terdapat 2 (dua) jenis pertanian yang diusahakan di wilayah tersebut, yaitu tanah pekarangan dan tanah tegal/ladang. Tanah pekarangan biasanya dimanfaatkan untuk menanam pohon pisang, kelapa, papaya dan beberapa tanaman buah lainnya, sementara tegal/ladang

lebih diusahakan untuk ubi kayu, kedelai, jagung, kacang tanah, padi dan lain sebagainya. Untuk pemasaran, sektor pertanian di wilayah Kalurahan Nglanggeran lebih didominasi untuk konsumsi lokal dan dipasarkan di pasar lokal.

Untuk sektor pertanian sendiri masih didominasi oleh padi sawah (seluas 85.92 hektar), diikuti dengan pertanian umbi-umbian dan jagung. Sektor padi juga masih memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi daerah, diikuti oleh jagung dan umbi-umbian pada peringkat kedua dan ketiga. Sawah di wilayah Kalurahan Nglanggeran juga didominasi oleh sawah tadah hujan sebanyak 62,67 ha, diikuti dengan sawah irigasi teknis seluas 14,68 ha.

Potensi pertanian Kalurahan Nglanggeran lebih menonjol pada sektor padi dan pertanian lahan kering seperti jagung, kacang-kacangan, serta umbi-umbian lainnya. Tanaman padi juga menyumbang kontribusi terbesar dalam potensi pertanian desa. Meskipun begitu, karakteristik wilayah Kalurahan Nglanggeran yang berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan yang relatif curam menyebabkan wilayah ini tidak begitu cocok untuk dikembangkan sebagai wilayah pertanian padi. Kebanyakan tanaman padi yang ditanam di tempat ini menggunakan sistem pertanian terasering, dan mengandalkan jenis sawah tadah hujan karena tidak semua wilayah dapat dicover pengairan irigasi. Daerah yang berbukit juga menjadikan tempat ini tidak terlalu memungkinkan untuk dikembangkan menjadi wilayah pertanian padi, sehingga komoditas pertanian yang paling cocok untuk dikembangkan adalah tanaman pertanian lahan kering seperti jagung, singkong, kacang tanah dan lain sebagainya, yang tidak tergantung kepada pengairan sepanjang musim.

Hal lain yang potensial dikembangkan adalah bahwa lahan pertanian terasering yang banyak ditemui di wilayah ini (terkait lokasinya yang berbukit-bukit), juga memungkinkan wilayah ini untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, seperti yang sudah dilakukan di wilayah wisata air terjun Kedung Kayang. Selain wisata

air terjun yang hanya dapat dikunjungi pada musim penghujan, pemandangan sawah terasering yang indah yang terletak di tengah wilayah pegunungan Nglanggeran.

Selain itu, untuk meningkatkan nilai jual komoditas pertanian (terutama pertanian lahan kering), dapat juga dikembangkan produk olahan berbasis hasil pertanian tersebut, seperti olahan jagung, olahan kacang dan lain sebagainya, dan dapat dipasarkan melalui BUMDES Griya Coklat Nglanggeran, maupun di daerah wisata. Pengembangan ini cukup menjanjikan, mengingat bahwa di tempat ini terdapat beberapa destinasi wisata yang bisa digunakan sebagai objek pemasaran hasil olahan pertanian. Selain itu, beberapa destinasi wisata kuliner yang terdapat di area wisata juga dapat memanfaatkan produk tersebut.

Untuk potensi pertanian perkebunan terdapat 2 (dua) jenis komoditas unggulan yang ada di Kalurahan Nglanggeran, yaitu coklat (kakao) dan kopi. Khusus untuk tanaman kakao, masyarakat setempat telah melakukan budidaya dan pengolahan produknya yang dipasarkan melalui Rumah Coklat Nglanggeran, yang juga menjadi salah satu tujuan wisata di komplek ekowisata Nglanggeran. Rumah Coklat tersebut merupakan BUMDES yang dikelola dengan melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah Kelompok Tani, kelompok PKK, serta Karang Taruna. Tabel berikut menunjukkan hasil perkebunan yang diambil dari data tingkat pengembangan desa tahun 2020.

- **Potensi Peternakan**

Sektor peternakan di Kalurahan Nglanggeran lebih didominasi untuk konsumsi lokal, dengan sistem pengelolaan yang bersifat lokal. Peternakan yang dibudidayakan berupa unggas, kambing, sapi, dengan hasil yang dimanfaatkan berupa telur maupun daging dan dipasarkan untuk konsumsi lokal. Secara keseluruhan, jumlah ternak yang dibudidayakan di Kalurahan Nglanggeran adalah sebanyak 540 ekor (tahun 2020), dan menyumbang nilai produksi sebesar

Rp.1.350.000.000,- pada tahun tersebut. Tabel berikut menunjukkan kontribusi sektor peternakan dalam pendapatan ekonomi daerah, diambil dari data tingkat pengembangan desa tahun 2020.

Di Nglanggeran terdapat kelompok ternak yang dinamakan Purbaya. Kelompok yang diketuai oleh Pardiya ini memiliki anggota sebanyak 70 orang peternak yang tersebar di 5 dusun.

- **Potensi UKM**

UKM yang terdapat di Kalurahan Nglanggeran diantaranya adalah UKM topeng batik. Topeng berbahan kayu bisa dibeli dengan harga Rp 30.000-Rp 300.000 tergantung ukuran dan model. Topeng ini memiliki keunikan karena diwarnai menggunakan model batik. Biasanya para wisatawan setelah mengunjungi Gunung Api Purba Nglanggeran, akan pergi mencari topeng ini sebagai souvenir.

Selain topeng kayu UKM lainnya yang berkembang di Kalurahan Nglanggeran adalah Pengolahan cokelat dan juga usaha pengrajin kuliner yang tergabung dalam kelompok penyedia kuliner purba rasa. Griya coklat Nglanggeran sebagai salah satu contoh potensi UKM, merupakan pusat produksi dan oleh-oleh cokelat asli masyarakat Nglanggeran. Tempat ini terletak 600 meter arah selatan dari pintu masuk gunung api purba Nglanggeran. Griya Coklat Nglanggeran merupakan salah satu inovasi masyarakat desa Nglanggeran yang mempromosikan hasil kelompok tani, kelompok kuliner Purbarasa, Pokdarwis Nglanggeran dan juga pemuda Karang Taruna. Aktivitas pengolahan cokelat ini pun menjadi komoditas yang ditawarkan dalam paket wisata kegiatan pertanian (Bersama dengan paket tanam dan pengolahan padi dan ternak etawa)



Sumber: Restu, 2017 dalam <http://gunungapipurba.com/posts/detail/produk-unggulan-desa-di-griya-cokelat-nglanggeran>

Gambar 6. Griya Cokelat Nglanggeran sebagai salah satu UKM Pengolah Kakao

- **Potensi BUMDES**

BUMDES yang ada di Kalurahan Nglanggeran adalah BUMDES Tunas Mandiri. BUMDES Tunas Mandiri Nglanggeran didirikan pada tahun 2012. BUMDES ini memiliki empat unit usaha, yaitu Usaha pariwisata, Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam, Pengelolaan Sampah, dan Grosir Bahan Pokok. Pendapatan mencapai 3 M dengan sumbangan paling besar diperoleh dari sector wisata. Saat ini BUMDES Tunas Mandiri sudah berperan sangat baik dalam mendukung sector pariwisata di Kalurahan Bleberan. Pengelolaan pariwisata saat ini sudah cukup baik sehingga sudah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, tetapi masih bisa di kembangkan lebih maksimal sehingga akan mampu mendongkrak pendapatan Asli Desa.

- **Potensi Wisata**

Kalurahan Nglanggeran merupakan Kalurahan yang terkenal dengan destinasi ekowisata Nglanggeran. Objek utama yang terdapat di wilayah ini adalah Gunung Api Purba Nglanggeran, yang merupakan gunung berapi purba yang diperkirakan aktif pada 20 – 60 juta tahun yang lalu. Gunung api purba ini berupa bongkahan batu andesit raksasa yang membentang sekitar 800 meter (lebar) dan setinggi 300 meter. Secara fisiologis, Gunung Api Purba Nglanggeran terletak di Zona Pegunungan Selatan Jawa Tengah – Jawa Timur (Van Bemmelen 1949), atau tepatnya di Sub Zona Pegunungan Baturagung (Baturagung Range). Tempat ini terletak di ketinggian 700 mdpl, dengan kemiringan medan rata rata lebih dari 45 derajat, dan termasuk kategori curam-terjal.

Berdasarkan periode geologisnya, Gunung Nglanggeran merupakan gunung api purba berumur tersier (Oligo-Miosen), yang berarti bahwa gunung ini terbentuk sekitar 0,6 – 70 juta tahun yang lalu. Material penyusunnya berupa endapat vulkanik tua berjenis andesit (Old Andesit Formation), yang menjelaskan bahwa kebanyakan batuan yang ditemukan di wilayah ini berjenis breksi andesit, tufa dan lava bantal, yang juga menjadi bukti lapangan bahwa dulu kala, tempat ini pernah emngalami aktivitas vulkanik yang aktif. Singkapan batuan vulkanik klastik yang ditemukan di gunung Nglanggeran dianggap sangat khas, sehingga kemudian dikenal sebagai Formasi Geologi Nglanggeran. Bentuk kawah Gunung Api Purba Nglanggeran juga dapat ditemukan di puncak gunung tersebut.

Karena kekhasannya, kompleks gunung api purba Nglanggeran ini kemudian dikembangkan sebaagai objek wisata geologi serta kawasan ekowisata. Perkembangan kawasan ekowisata Gunung Api Purba ini telah dirintis sejak tahun 1999, yang diawali oleh Kelompok Pemuda Karang Taruna. Pada awalnya, kesadaran tersebut tumbuh dari keadaan wilayah di sekitar batu-batu di gunung api purba tersebut yang banyak digunduli masyarakat. Mereka kemudian

melakukan kegiatan penanaman pohon di wilayah tersebut. Pada 12 Mei 1999, melalui SK Kepala Desa Nglanggeran No.05/KPTS/1999, wilayah tersebut kemudian secara resmi diserahkan kepada Kelompok Karang Taruna untuk dikelola sebagai kawasan wisata. Wilayah seluas 48 ha tersebut kemudian dikelola oleh Karang Taruna, dan setelah program penghijauan kembali tersebut berhasil, ternyata berhasil menarik wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Hal ini kemudian menarik perhatian Dinas Budaya dan Pariwisata Gunung Kidul, dan pada tahun 2007, Nglanggeran masuk dalam salah satu promosi FAM Tour. Dimulai pada 2007 tersebut, pengelolaan wisata Nglanggeran mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah. Agar pengelolaannya lebih melembaga, akhirnya dibentuklah sebuah lembaga Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari PKK, Kelompok Tani, Pemerintah Desa dan Karang Taruna.



Sumber: Survey Lapangan, 2021

Gambar 7. Obyek Wisata di Kalurahan Nglanggeran

D. Potensi dan Strategi Pembangunan Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

- **Strategi Pengembangan Potensi Pertanian**

Secara garis besar, kedua wilayah ini memiliki potensi pertanian yang spesifik sesuai karakteristik fisik dan geografis yang dimilikinya. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa potensi pertanian dapat dikembangkan menjadi komoditas utama bagi pendapatan desa, akan tetapi tetap dapat dikembangkan ataupun dioptimalisasi untuk menjadi ikon wilayah yang disesuaikan dengan keunikan ataupun spesifikasi wilayah masing-masing. Sebagai contoh, promosi coklat dari wilayah Nglanggeran ataupun jamur dari Bleberan dapat dijadikan sebagai ikon pertanian yang dapat mendukung potensi wisata daerah. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan terkait pertanian di kedua wilayah ini diantaranya adalah:

Tabel 1. Strategi Pengembangan Pertanian

No	Strategi	Konsep Pengembangan
1	Produksi	Strategi produksi dapat diarahkan mengenai bagaimana melakukan intensifikasi pertanian untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga dapat mengatasi keterbatasan alam. Komoditas coklat/kakao dan jamur dinilai sesuai untuk dikembangkan di kedua kalurahan tersebut, mengingat kondisi fisik (tanah, batuan, iklim) dan sumberdaya air yang terbatas.

No	Strategi	Konsep Pengembangan
2	Pemasaran	Komoditas coklat di Nglanggeran dan jamur di Bleberan dapat digunakan sebagai ‘ikon pertanian’ yang mendukung pariwisata setempat. Mengingat kondisi alam yang terbatas untuk dikembangkan secara intensif, maka strategi pemasaran yang dilakukan lebih diarahkan pada intensifikasi dan pengolahan <i>after-product</i> yang diarahkan sebagai bagian dari ikon pariwisata yang sudah lebih berkembang. pengolahan hasil pertanian juga dapat diarahkan menjadi konsep pemberdayaan masyarakat untuk dapat mendukung ekonomi masyarakat dan menciptakan kemandirian berbasis lokalitas.
3	Kelembagaan	Pengembangan potensi pertanian harus didukung dengan strategi kelembagaan yang kuat yang melibatkan lintas sektor. Beberapa <i>stakeholder</i> terkait diantaranya adalah dinas pertanian (strategi intensifikasi pertanian); dinas perindustrian dan perdagangan (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran serta <i>branding</i> produk).

• **Strategi Pengembangan Potensi Perkebunan**

Potensi perkebunan yang menonjol adalah tanaman durian di wilayah Kalurahan Nglanggeran, yang mulai dibudidayakan sejak 2015. Saat ini, komoditas durian belum memberikan hasil yang menonjol dikarenakan hasil panen yang belum optimal. Beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya adalah belum optimalnya pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat terkait pengetahuan

budidaya durian, serta hasil budidaya yang memerlukan waktu minimal 5 tahun untuk dapat memperoleh hasil.

Selain durian, di wilayah Bleberan juga terdapat perkebunan kayu putih yang merupakan komoditas yang ditanam oleh Perhutani. Meskipun demikian, terdapat beberapa masyarakat juga yang memanfaatkan lahannya untuk menanam kayu putih. Hasil komoditas ini kemudian dijual kepada Perhutani untuk diolah menjadi produk olahan selanjutnya. Karena sangat tergantung kepada pihak Perhutani dalam pemasaran hasil, kayu putih bukanlah merupakan komoditas perkebunan yang umum ditanam masyarakat secara mandiri, kebanyakan dari mereka yang membudidayakannya bekerja sama dengan pihak Perhutani, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan cukup potensial untuk dikembangkan di kedua lokasi penelitian. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi perkebunan diantaranya adalah:

1. Menentukan jenis komoditas yang sesuai untuk ditanami di wilayah tersebut, sesuai dengan karakteristik tanah dan batuan yang ada. Untuk itu, diperlukan penelitian mengenai kesesuaian jenis tanah dengan komoditas perkebunan agar budidaya perkebunan dapat mencapai hasilnya yang optimal.
2. Memanfaatkan lahan-lahan potensial yang dapat digunakan untuk perkebunan, yang juga sekaligus dapat menjadi fungsi penyangga seperti pencegahan terhadap erosi dan tanah longsor, menjaga kestabilan sumber mata air, serta menjaga keanekaragaman hayati yang ada di wilayah tersebut.
3. Memberikan bekal pengetahuan dan motivasi kepada masyarakat terkait budidaya perkebunan sebagai salah satu alternatif pendapatan.
4. Strategi lanjutan untuk mengembangkan komoditas perkebunan adalah pengolahan produk pasca panen dan melekatkannya

terhadap ikon pariwisata yang sudah lebih dulu berkembang di kedua wilayah tersebut.

- **Strategi Pengembangan Potensi Peternakan**

Peternakan di wilayah Kalurahan Nglanggeran dan Bleberan bukan merupakan komoditas unggulan bagi masyarakat. Peternakan yang ada di kedua wilayah tersebut adalah sapi dan kambing, namun sampai saat ini hasil peternakan masih digunakan untuk konsumsi lokal. Masyarakat setempat lebih memanfaatkan ternak sebagai tabungan yang akan dijual ketika memiliki kepentingan (sekolah anak, kepentingan keluarga, atau kepentingan lainnya). Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa pengembangan peternakan sulit dilakukan di wilayah tersebut terkait dengan ketersediaan pakan yang memadai, serta biaya produksi dan operasional yang terlalu besar jika akan dikembangkan dalam skala besar. Selain itu, kesulitan distribusi dan pemasaran juga menjadi salah satu kendala utama, mengingat bahwa pasokan sapi di wilayah DIY dan sekitarnya sudah banyak disuplai dari daerah Boyolali, Kulon Progo dan Sleman.

Sementara itu, ternak unggas seperti ayam ataupun bebek juga kurang berkembang di kedua wilayah ini. Terdapat beberapa peternakan unggas (ayam) yang terdapat di kedua wilayah tersebut, tapi hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi lokal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa untuk mengembangkan peternakan unggas juga kurang efisien untuk dilakukan di kedua wilayah tersebut, terkait dengan kesulitan suplai pakan yang tergantung pada daerah lain, serta kurangnya permintaan pasar.

- **Strategi Pengembangan Potensi Kepariwisata**

Secara umum, potensi kepariwisataan di wilayah Kalurahan Nglanggeran sudah dikelola dengan baik dan terlembaga dengan baik. Melalui konsep ekowisata, wisata gunung api purba Nglanggeran

dapat memadukan antara konteks wisata, pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kepariwisata di wilayah ini juga telah dikelola dengan melibatkan sektor masyarakat, dengan dikelola oleh Kelompok Karang Taruna dan memberdayakan beberapa kelompok lain seperti Kelompok Tani, Kelompok PKK dan lain sebagainya. Selain itu, pembinaan yang intensif dari pihak Pemerintah Daerah juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan pariwisata.

Penggunaan teknologi informasi juga sangat membantu pengelolaan pariwisata di wilayah kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran ini. Dengan adanya website kawasan wisata tersebut (dapat diakses di <http://gunungapipurba.com/>), pemasaran wisata dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, tidak hanya masyarakat lokal dan nasional, tapi juga wisatawan mancanegara. Selain itu, terdapat juga beberapa paket wisata yang ditawarkan, seperti paket wisata edukasi, paket wisata budaya, wisata hijau dan lain sebagainya, juga dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat ini.

Untuk pengembangan selanjutnya, beberapa strategi ini dapat digunakan untuk melakukan pengembangan potensi wisata di wilayah Kalurahan Nglanggeran:

1. Untuk mencapai jangkauan wisatawan yang lebih luas, perlu melakukan pembaharuan website dalam bentuk bilingual (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia). Hal ini dilakukan terutama untuk dapat menjaring wisatawan dalam maupun luar negeri.
2. Penambahan paket wisata dan layanan booking paket wisata di website pariwisata Nglanggeran. Hal ini dilakukan agar calon wisatawan dapat melakukan pemesanan secara daring sebelum datang ke tempat wisata.
3. Untuk menyikapi pandemic COVID yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya daerah wisata tersebut, maka dapat dilakukan penyiapan wisata virtual melalui kanal video/ film pendek yang dapat diunggah di website wisata.

4. Karena destinasi Nglanggeran ini juga merupakan situs geologi, maka dapat juga dikembangkan paket wisata edukasi yang berfokus pada informasi geologis wilayah tersebut.

- **Strategi Pengembangan Potensi UKM**

Potensi UKM yang menonjol di wilayah Nglanggeran adalah industri coklat Nglanggeran yang menjadi salah satu penyumbang pemasukan BUMDES yang dominan di samping sektor pariwisata. UKM coklat juga merupakan sektor pendukung pariwisata yang juga signifikan, dan menjadi lahan pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. UKM coklat Nglanggeran bahkan menjadi rujukan dalam program penguatan UKM dalam mengoptimalkan potensi desa dan melalui sektor perkebunan dan pengolahan hasil pertanian.

- **Strategi Pengembangan Potensi BUMDES**

BUMDES di wilayah penelitian memiliki potensi yang besar dan signifikan dalam mendorong pendapatan desa. Baik di Kalurahan Nglanggeran maupun Kalurahan Bleberan memiliki pengelolaan Bumdes yang baik, yang bahkan menjadi rujukan nasional mengenai pengembangan potensi desa. Kedua wilayah tersebut memiliki kesamaan dalam keunggulan sektor pariwisata sebagai komoditas utama yang dimiliki.

Strategi pengembangan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Strategi Pembangunan Reforma Agraria Berbasis Potensi

STRATEGI PEMBANGUNAN REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI Desa Nglangeran dan Bleberan				
FAKTA	MASALAH		STRATEGI/KEBUJAKAN	
1 Desa Nglangeran (Geosite Gunung Api Purba Nglangeran) dan Desa Bleberan (Geosite Air Terjun Srigetuk dan Goa Rancang Kencono) termasuk Geosite Gunung Sewu UNESCO Global Geopark (Gunung Sewu UGgp)	1 Dari aspek pembangunan Sarana dan Prasarana Publik serta Pengembangan Aksesibilitas, Amenitas dan Visibilitas belum sepenuhnya seperti apa yang diharapkan. Khususnya : di Geosite Air Terjun Srigetuk dan Goa Rancang Kencono desa Bleberan	1	Perlu Dukung DAK dari K/L untuk Pengembangan Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark di Bidang : 1. Infrastruktur 2. Visibilitas Kawasan Geosite 3. Pembangunan Kawasan Geosite 4. Konservasi Situs Warisan Geologi/Tata Ruang	
2 Gunung Sewu UGgp berada di kawasan Pawonsari (Pacitan-Wonogiri-Wonosari) dalam satu Kuster Heritage UNESCO (Borobudur-Prambanan-dan Sangiran) memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat	2 Koordinasi antar Provinsi dan antar Kabupaten, SDM Pengelola Geosite, Pemandu GeoTourism dan Pelaku Pariwisata (GeoPartner), serta Kondisi Existing visibilitas dan infrastruktur Geosite di Gunung Sewu belum seluruhnya memenuhi standart yang diharapkan. Serta Operasionalisasi Badan Pengelola menjadi permasalahan karena BP mengelola wilayah 3 Kabupaten	2	Perlu Penganggaran untuk Penguatan Kapasitas : 1. Badan Pengelola 2. Pengelola Geosite 3. Pemandu Geotourism,HPI,Pokdarwisdan Geopartner lainnya	
3 Telah ada Mou bersama antara 3 Menteri (Pariwisata, ESDM dan Dikbud)- 3 Gubernur (DIY,Jateng,Jatim) dan 3 Bupati (Gunungkidul,Wonogiri, Pacitan) pada tanggal 17 Februari 2015 untuk Pengembangan Geopark Gunung Sewu. Juga terdapat Mou antara BP GSUUGgp dan Perguruan Tinggi dan beberapa Pelaku Pariwisata (GeoPartner)	3 Belum adanya peran aktif dari K/L untuk mengimplementasikan PEREPRES Nomor 9 Tahun 2019, khususnya Pendampingan dan Penganggaran untuk Pengembangan Geopark di Indonesia, khususnya GSUUGgp Lemahnya Koordinasi DI INTERNAL SEGMENT antara Provinsi dan Kabupaten masing-masing. Masih rendahnya keterlibatan Perguruan Tinggi dalam pendampingan dan research. Perlu peningkatan kemitraan GeoPartner dalam pelayanan Wisata serta keterlibatan OPD Provinsi dan Kabupaten dalam pembangunan Visibilitas dan Infrastruktur di Kawasan Geopark Gunung Sewu.	3	Peningkatan Koordinasi K/L, dan Peran aktif Kementerian Dalam Negeri, mengingat GSUGGp adalah Geopark Lintas Provinsi dan lintas Kabupaten	

3	Telah ada Mou bersama antara 3 Menteri (Pariwisata, ESDM dan Dikbud)- 3 Gubernur (DIY,Jateng,Jatim) dan 3 Bupati (Gunungkidul,Wonogiri, Pactan) pada tanggal 17 Februari 2015 untuk Pengembangan Geopark Gunung Sewu. Juga terdapat MoU antara BP GSUGGp dan Perguruan Tinggi dan beberapa Pelaku Pariwisata (GeoPartner)	3	Belum adanya peran aktif dari K/L untuk mengimplementasikan PEREPRES Nomor 9 Tahun 2019, khususnya Pendampingan dan Penganggaran untuk Pengembangan Geopark di Indonesia, khususnya GSUGGp Lemahnya Koordinasi DI INTERNAL SEGMENT antara Provinsi dan Kabupaten masing-masing. Masih rendahnya keterlibatan Perguruan Tinggi dalam pendampingan dan research. Perlunya peningkatan Kemitraan GeoPartner dalam pelayanan Wisata serta keterlibatan OPD Provinsi dan Kabupaten dalam pembangunan Visibilitas dan Infrastruktur di Kawasan Geopark Gunung Sewu.	3	Peningkatan Koordinasi K/L, dan Peran aktif Kementerian Dalam Negeri, mengingat GSUGGp adalah Geopark Lintas Provinsi dan lintas Kabupaten
---	---	---	---	---	---

Sumber: Hasil Pengolahan, 2021

E. Penutup

Kalurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk dan Kalurahan Bleberan Kecamatan Playen merupakan contoh dari keberhasilan BUMDES yang diinisiasi dari dalam diri masyarakat atas dasar potensi yang dimiliki wilayahnya. Kondisi alam dan wilayah Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya berupa Kawasan karst yang dianggap sebagai hambatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masyarakat Kalurahan Bleberan dan Kalurahan Nglanggeran membuktikan bahwa inisiatif dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- **Rekomendasi**

1. Karakteristik Karst yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, tidak hanya menjadi tantangan alami yang menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah. Wilayah Karst tersebut merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan, dalam kasus Kalurahan Nglanggeran dan Kalurahan Pathuk, Karst menjadi salah satu potensi yang dikembangkan menjadi geopark yang sudah dikenal sampai ke mancanegara.
2. Aktivitas BUMDES di Kalurahan Bleberan dan Kalurahan Nglanggeran yang memberdayakan sumber daya manusia pada kalurahan tersebut merupakan contoh nyata dari pemberdayaan masyarakat desa yang diinisiasi oleh masyarakat local. Dalam hal ini kasus pada kedua desa ini dapat dijadikan best parctises bagi daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik sejenis dengan kedua desa tersebut;
3. Perlu adanya studi lanjut terkait seberapa besar pengaruh BUMDES terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2020) Kecamatan Patuk dalam Angka 2020
- Badan Pusat Statistik (2020) Kecamatan Playen dalam Angka 2020
- Bappeda Kabupaten Gunung Kidul.2021. Materi Musrenbang Kabupaten Gunung Kidul 2021-2026. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=2mErBN5shbE>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2021
- Bappeda Kabupaten Gunung Kidul. RPJMD Kabupaten Gunung Kidul 2016-2021 Bappeda Kabupaten Gunung Kidul
- Pemerintah Kalurahan Nglanggeran. 2020. Monografi Kalurahan Nglanggeran.
- Pemerintah Kalurahan Bleberan.2020. Monografi Kalurahan Bleberan.
- Peraturan Presiden No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
- Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
- Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 73 tahun 2019
- Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 61 Tahun 2018
- Sugiyarto dkk. 2015. Profil Kelompok Ternak Andini Mulyo. Diakses dari <https://andinimulyosawahan.wordpress.com/2015/04/05/profil-andini-mulyo> (diakses 5 Agustus 2021)
- _____.2021. <http://gunungapipurba.com/>
- Triharjono.2021.Paparan Presntasi Profile Bumdesa Sejahtera Desa Bleberan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul

SOLUSI SOSIO EKOLOGIS DALAM BINGKAI REFORMA AGRARIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Aristiono Nugroho, Sugiasih, dan Prastyo Bayu Nugroho

A. Pendahuluan

Kelurahan Pucung (Desa Pucung) merupakan Kelurahan yang berada dalam wilayah Kapanewon Girisubo (Kecamatan Girisubo), Kabupaten Gunung Kidul. Kelurahan ini memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut: (1) di sebelah Utara, yaitu Kabupaten Wonogiri, (2) di sebelah Timur, yaitu Kelurahan Songbanyu, (3) di sebelah Selatan, yaitu Samudera Indonesia, dan (4) di sebelah Timur, yaitu Kelurahan Jerukwudel (pada sisi Utara) dan Kelurahan Tileng (pada sisi Selatan).

Lurah Pucung (Estu Dwiyono Pardiwiatno) pada tanggal 25 Juli 2021 menjelaskan, bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Pucung berprofesi sebagai petani. Uniknya, ketika dihitung pendapatan petani rata-rata perbulan, ternyata pendapatannya antara Rp. 200.000,- hingga Rp. 500.000 per bulan. Padahal kebutuhan satu keluarga petani sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.

Penjelasan Lurah Pucung memperlihatkan adanya ketidakberdayaan masyarakat, khususnya petani, dalam memperoleh kesejahteraan. Situasi ini memerlukan solusi yang: (1) bersesuaian dengan kondisi alam atau lingkungan setempat dan mampu menjaga kelestariannya; dan (2) berbasis masyarakat atau sarat dengan partisipasi masyarakat; serta (3) berada dalam bingkai reforma agraria.

Reforma agraria dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kelurahan Pucung, karena reforma agraria memiliki dua kegiatan utama, yaitu penataan aset dan penataan akses.

Penataan aset diwujudkan dalam bentuk landreform yang intinya redistribusi tanah, dan land registration yang saat ini berupa PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Sementara itu, penataan akses diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, setelah masyarakat memperoleh legalisasi aset melalui PTSL.

Peter Jacobs, Tim Hart, Shirin Motala, dan Charles Nhemachena dalam karyanya, yang berjudul: *"Agrarian Reform and Poverty Reduction in South Africa (2013),"* yang dipublikasikan oleh HSRC (Human Sciences Research Council) menyatakan, bahwa reforma agraria mampu mereduksi kemiskinan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman di Afrika Selatan memperlihatkan adanya korelasi positif yang kuat antara intervensi agraria pasca-apartheid (dalam bentuk reforma agraria) dengan kesejahteraan masyarakat. Para petani kulit hitam (petani berskala kecil) secara individual memperoleh kepemilikan tanah, dan menikmati akses berupa dukungan pemerintah untuk memanfaatkan tanahnya secara optimal.

Oleh karena ketidakberdayaan masyarakat Kelurahan Pucung harus diatasi dalam bingkai reforma agraria, dan solusi yang diberikan haruslah solusi sosio ekologis, bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat; maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: "Solusi Sosio Ekologis Dalam Bingkai Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon GiriSubo, Kabupaten Gunung Kidul."

B. Rumusan Masalah

Seharusnya segenap Bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera, sebagaimana amanat konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945), yang disemangati oleh ideologi Pancasila. Tetapi kenyataannya, masyarakat Kelurahan Pucung belum memperoleh kesejahteraan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan Rumusan Masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana format ketidak-berdayaan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul?
2. Bagaimana format pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan format ketidak-berdayaan masyarakat dan dilanjutkan dengan merumuskan format pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak, sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, sebagai peluang dan kesempatan untuk mendalami pengetahuan tentang reforma agraria dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, sebagai reservoir pengetahuan yang terkait dengan reforma agraria dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan reforma agraria dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Bagi masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Pucung, sebagai referensi dalam memajukan Kelurahan Pucung, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta hamonisasi kegiatan masyarakat dengan kondisi alam setempat.

D. Metodologi

1. Subjek Penelitian

Penetapan subjek penelitian dilakukan dengan memperhatikan issue atau fenomena yang diteliti (Nugroho, 2020:57). Subjek penelitian ini, terdiri dari: (1) Lurah Pucung, yaitu Estu Dwiyono Pardiwiatno; dan (2) Carik Pucung, yaitu Eko Sujarno; serta (3) staf Kantor Kelurahan Pucung, seperti: (a) Ulu-Ulu (Kepala Urusan Kesejahteraan), yaitu Sugeng Handoyo; (b) Jagabaya (Kepala Urusan Pemerintahan), yaitu Wahid; (c) Kamitua (Kepala Urusan Pelayanan), yaitu Sri Endayani; (d) Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan), yaitu Edy Prastowo; (e) Danarta (Kepala Urusan Keuangan), yaitu Tujiran; dan (f) Tata Laksana (Kepala Urusan Umum), yaitu Wiji Iswanto.

2. Penetapan Informan

Pada penelitian ini informan ditetapkan dengan memperhatikan pengertian, bahwa informan terdiri dari subyek penelitian yang berkesempatan memberi informasi (Moleong, 2007:224; dan Nugroho, 2020:59). Oleh karena itu, informan pada penelitian ini adalah individu yang mampu memberi informasi tentang ketidakberdayaan masyarakat dan potensi Kelurahan Pucung.

3. Jumlah Informan

Jumlah informan pada penelitian ini bersifat situasional dan kondisional. Moleong (2007:224) telah menjelaskan, bahwa jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan. Namun demikian, saat pelaksanaan penelitian jumlah informan yang diwawancarai di Kelurahan Pucung sebanyak 8 orang.

4. Pemilihan Informan

Informan pada penelitian ini dipilih secara *purposive*, agar peneliti dapat memperoleh informasi secara akumulatif dari orang yang tepat (Moleong, 2007:224; dan Nugroho, 2020:61). Tepatnya, pemilihan informan saat penelitian dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta mempertimbangkan informasi yang dimiliki oleh informan, dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

5. Data yang Diperoleh

Berdasarkan sumbernya, data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Nugroho, 2020:63). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, yang substansinya tercantum dalam *interview guide*, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang bersifat publik, yang berasal dari Kantor Kelurahan Pucung, seperti:

- a. Struktur Pemerintahan;
- b. Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
- c. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- d. Komposisi Penduduk;

6. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data

Pengambilan data primer dari informan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, serta memanfaatkan instrumen panduan wawancara (*interview guide*) dan alat pencatat (Nugroho, 2020:65). Sementara itu, pengambilan data sekunder dari Kantor Kelurahan Pucung dilakukan dengan teknik dokumentasi, serta menggunakan instrumen alat pencatat.

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif digunakan suatu teknik analisis data yang khas kualitatif, yang tahapannya sebagai berikut:

- a. Telaah Awal Seluruh Data, dengan cara mengumpulkan data secara cermat, yang bersumber dari para informan serta didukung oleh data sekunder, yang materinya relevan dengan pertanyaan penelitian;
- b. Reduksi dan Abstraksi Data, dengan cara melakukan penghapusan sebagian data yang meskipun relevan tetapi tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi;
- c. Penyusunan Satuan Informasi Terkecil, dengan cara menyusun abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang terkait dengan pertanyaan penelitian, yang keberadaan maknanya tidak tergantung pada keberadaan makna-makna lainnya. Tepatnya, saat makna ini secara tunggal diungkapkan, maka makna ini dapat difahami;
- d. Pengelompokan Satuan Informasi Terkecil, dengan cara mengelompokkan satuan-satuan informasi terkecil yang berhasil diperoleh dari penelitian ke dalam kategori-kategori, yang disusun berdasarkan substansi yang terkait dengan pertanyaan penelitian;
- e. Penyusunan Pernyataan Proposisional, dengan menyusun pernyataan logis, yang diperoleh dari masing-masing kategori. Pernyataan ini (pernyataan proposisional) merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan penjelasan atas fenomena yang sedang diteliti (Sumber: Moleong, 2007:248-277; dan Nugroho, 2020:66-69).

E. Teori Mutakhir (Tinjauan Pustaka)

1. Reforma Agraria

Ide reforma agraria telah dimuat dalam UUPA, khususnya pada Pasal 7, 10, dan 17. Meskipun cakupan ide tersebut hanyalah terbatas pada konsep landreform (bagian dari reforma agraria). Bernhard Limbong (2012a:171) menjelaskan, bahwa UUPA telah memuat program *agrarian reform*, sebagai berikut: (1) pembaharuan hukum agraria nasional melalui unifikasi hukum; (2) penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah; (3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; (4) perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan; dan (5) perencanaan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Sementara itu, Abhijit Banerjee, Paul J. Gertler, dan Maitreesh Ghatak saat melakukan penelitian di India berjudul, *"Empowerment and Efficiency: The Economics of Agrarian Reform (1998)"*, yang dipublikasikan oleh Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, menyatakan bahwa: (1) dampak reformasi tenancy (reforma agrarian) terbukti memberi efek pada peningkatan daya tawar petani; (2) ada efek keamanan tenurial yang mendorong keberanian petani melakukan investasi di atas tanahnya.

Berbeda dengan Abhijit Banerjee, Paul J. Gertler, dan Maitreesh Ghatak; Samuel Kariuki melakukan penelitian berjudul, *"Agrarian Reform, Rural Development and Governance in Africa: A case of Eastern and Southern Africa (2009)"*, yang dipublikasikan oleh Centre for Policy Studies, Johannesburg (South Africa) menyatakan, bahwa: setelah 14 tahun demokrasi di Afrika Selatan, ada kesepakatan di seluruh spektrum politik dan sosial bahwa program reforma agraria berada dalam kesulitan besar.

Hampir sejak awal, program ini telah dikritik karena gagal mencapai targetnya, atau mencapai berbagai tujuan, seperti: (1) pemulihan historis, (2) redistribusi kekayaan dan peluang, serta (3) pertumbuhan ekonomi. Ada 36 target reforma agraria yang diusulkan oleh Bank Dunia, dan harus diadopsi dalam Program Rekonstruksi dan Pembangunan (*The Reconstruction and Development Programme*) pada tahun 1994, yang antara lain berisi seruan untuk mentransfer 30 persen tanah pertanian dalam lima tahun pertama. Namun, pada tahun 1999, hanya tercapai kurang dari 1 persen tanah pertanian telah dialihkan melalui semua aspek reforma agraria. Selanjutnya, pada tahun 2000, setelah melalui tinjauan komprehensif reforma agraria, pemerintah mengadopsi target yang direvisi dan tidak diragukan lagi lebih realistis untuk mentransfer 30 persen tanah pertanian. Hasilnya, berupa terlaksananya redistribusi tanah sebesar 30 persen tanah pertanian pada tahun 2014, yang setara dengan 25 juta hektar.

Kritik terhadap reforma agraria tidak menyurutkan niat untuk melaksanakan reforma agrarian, melainkan justru menambah semangat dalam melaksanakan reforma agraria, dengan tetap memperhatikan kritik yang ada. Berbekal semangat *agrarian reform* tersebut dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka dilaksanakanlah reforma agraria, yang meliputi: reforma regulasi, reforma asset, dan reforma akses, yang perinciannya sebagai berikut:

a. Reforma Regulasi

Reforma regulasi perlu dilakukan, karena adakalanya regulasi tidak mendukung atau gagal mendukung reforma agraria, atau menghambat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Maria S.W. Soemardjono dalam "Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan" yang dimuat Kompas.com pada 9 Oktober 2012 menyatakan, bahwa ada lima karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral, yaitu: (1) berorientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, serta hanya digunakan

sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; (2) lebih berpihak pada pemodal besar; (3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik; (4) pada saat koordinasi antar sektor lemah, justru sumberdaya dikelola secara sektoral; dan (5) tidak memberi perlindungan hak asasi manusia secara proporsional.

Regulation reform atau reforma regulasi inilah yang menjadi unsur penting dalam pelaksanaan reforma agraria. Penataan dan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat, khususnya para petani kecil di desa, perlu diimplementasikan melalui pelaksanaan reforma aset (*assetreform*) dan reforma akses (*accessreform*).

b. Reforma Aset

Reforma aset perlu dilakukan, karena bagi petani dan sebagian besar masyarakat Indonesia, tanah merupakan aset berharga yang akan dijaganya dengan sepenuh hati. Sebagai aset, maka penguasaan dan pemilikan tanah serta tindakan pengadministrasiannya merupakan sesuatu yang penting, serta perlu direformasi. Reforma aset dapat menjadi dasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi, dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju dan demokratis. Sebagaimana diketahui reforma aset terdiri dari tiga konsepsi utama, yang perlu dilaksanakan secara terpadu. Konsepsi utama tersebut terdiri dari *landreform*, redistribusi tanah, dan legalisasi aset, yang princiannya sebagai berikut:

(1) Landreform

Hal ini sesuai dengan pernyataan Boedi Harsono (dalam Santoso, 2012:207), yang telah menjelaskan bahwa *landreform* merupakan serangkaian tindakan dalam rangka *agrarian reform*, yang meliputi perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta hubungan hukum yang terkait dengan penguasaan tanah.

(2) Redistribusi tanah

Hal ini sesuai dengan pernyataan Russet King (dalam Hutagalung, 1985) menyatakan, bahwa redistribusi tanah merupakan pengambil-alihan sebagian tanah, atau seluruh tanah milik tuan tanah, yang kemudian diserahkan kepada petani yang bertanah sempit atau petani yang tidak mempunyai tanah. Untuk melengkapi keterangan Russet King, maka E. Jacoby (dalam Hutagalung, 1985) menjelaskan bahwa landreform memiliki tiga tahapan, yaitu: pengambil-alihan tanah, redistribusi tanah, dan penyesuaian unit-unit pertanian baru.

(3) Legalisasi aset

Legalisasi aset merupakan proses administrasi pertanahan, yang meliputi adjudikasi, pendaftaran hak atas tanah, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah (Mediatataruang.com, 2016). Sementara itu diketahui, bahwa adjudikasi merupakan serangkaian kegiatan, yang terdiri dari: (a) pengumpulan data fisik dan data yuridis; (b) pengumuman data fisik dan data yuridis; dan (c) penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pengakuan atau pemberian hak atas tanah.

Pasca legalisasi aset, maka para peserta reforma agraria atau penerima redistribusi tanah telah mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan tanahnya. Oleh karena itu, beberapa pihak menyebut kegiatan ini (legalisasi aset) sebagai “penguatan aset”. Tetapi ada pula beberapa pihak tertentu yang memberi sebutan lebih teknis, yaitu “pendaftaran tanah”. Bagi mereka sebutan ini lebih tepat secara yuridis, karena sesuai dengan terminologi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

c. Reforma Akses

Reforma akses perlu dilakukan, karena merupakan hal penting bagi petani atau peserta reforma agraria. Bernhard Limbong (2012b:299) menjelaskan, bahwa access-reform (reforma akses) merupakan penyediaan sarana bagi masyarakat (penerima redistribusi tanah), untuk mengembangkan tanah pertanian sebagai sumber kehidupan petani, yang meliputi partisipasi ekonomi politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas dan kemampuan.

Dalam konteks reforma akses, pemerintah memberikan fasilitasi akses kepada masyarakat, baik akses masyarakat ke tanahnya itu sendiri, maupun akses masyarakat ke instrumen penunjang agar mereka dapat mengelola tanahnya dengan baik (optimal), seperti: akses permodalan. Tepatnya, pemerintah terlibat dalam semua mekanisme reforma agraria, dalam bingkai tanggungjawab dan pengawasan (Arisaputra, 2015:142).

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Memaknai Pemberdayaan Masyarakat

Aristiono Nugroho, dkk (2013:118-119) menjelaskan, bahwa pemberdayaan (*empowerment*) dapat dimaknai, sebagai berikut:

- (1) *To give power or authority*, atau suatu ikhtiar untuk memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain,
- (2) *To give ability to or enable*, atau suatu ikhtiar untuk memberi kemampuan atau keberdayaan, yang dapat menghindarkan masyarakat dari ketidak-berdayaan yang diakibatkan oleh kondisi dan pandangan subyektif yang bersangkutan yang kurang optimis, dan ketidak-berdayaan yang diakibatkan struktur sosial dalam hubungan antar anggota masyarakat.

- b. Menemukan Ketidak-berdayaan Masyarakat
- Ketika kemiskinan dipandang sebagai wujud ketidak-berdayaan, maka penjelasan Aristiono Nugroho dan kawan-kawan (2013) tentang kemiskinan dapat dimaknai sebagai berikut:
- (1) Ketidak-berdayaan merupakan ketidak-mampuan individu memenuhi hak-hak dasarnya, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, seperti: pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup (Nugroho, 2013:75).
 - (2) Ketidak-berdayaan memperlihatkan gambaran tentang ketidak-mampuan memenuhi kekurangan penghasilan dan kekurangan kekayaan yang memadai, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, dan pendidikan (Nugroho, 2013:76).
 - (3) Ketidak-berdayaan dapat dianalogikan dengan pohon bonsai, dengan pengertian bahwa kekerdilan bonsai bukan disebabkan bibitnya buruk, karena bibit pohon besar di hutan juga akan tumbuh kerdil ketika ditanam dengan sistem bonsai. Dengan demikian ketidak-berdayaan masyarakat bukanlah disebabkan oleh kualitas masyarakat yang buruk, melainkan karena adanya sistem buruk, yang telah membuat masyarakat menjadi tidak berdaya (Nugroho, 2013:77).
- c. Merancang Pemberdayaan Masyarakat
- Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan (2013:119-121) menjelaskan hal-hal yang terkait dengan perancangan pemberdayaan masyarakat berupa Perancangan tahapan, Perancangan fokus, Perancangan tujuan, Perancangan

strategi komunikasi, dan Perancangan pemenuhan kebutuhan masyarakat,

d. Merancang roadmap pemberdayaan masyarakat.

Roadmap merupakan gambaran tentang rencana rinci suatu kegiatan yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, penyusunan roadmap memperhatikan empat hal, yaitu: apa, siapa, kapan, dan di mana. Biasanya roadmap disederhanakan dalam bentuk tabel, yang kolomnya terdiri dari program/kegiatan, output, tahapan kerja, waktu pelaksanaan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran, penanggungjawab, dan lokasi pelaksanaan (Sari, 2016:21-22).

3. Sosio Ekologis

Untuk mengatasi ketidak-berdayaan masyarakat yang kompleks dibutuhkan solusi sosio ekologis, yaitu solusi yang berbasis masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dengan memperhatikan pelestarian ekologis. Untuk itu perlu diperhatikan pandangan beberapa peneliti sebagai berikut.

- a. Irene Correa Cavalier dan Helena Neves Almeida dalam penelitiannya yang berjudul, *"Power, Empowerment and Social Participation: the Building of a Conceptual Model (2018),"* dan dipublikasikan dalam *European Journal of Social Science Education and Research*, Volume 5, Number 1, April 2018, page 174-185. Penelitian ini menyatakan bahwa intervensi sosial mampu mengintegrasikan konsep dan praktik multidisiplin dan partisipatif, yang pada awalnya direspon oleh masyarakat secara acuh tak acuh.
- b. Lopamudra Patnaik Saxena melakukan penelitian berjudul, *"Community Self Organisation from a Social Ecological Perspective: Burlang Yatra and Revival of Millets in Odisha, India (2020),"* dan dipublikasikan dalam *Sustainability Journal*,

Volume 12, Number 1867, 2020, Page 1-27. Penelitian ini menyatakan, bahwa ada makna yang dibangun oleh masyarakat Odisha, India, saat penyelenggaraan festival benih yang dikenal secara lokal sebagai “Burlang Yatra” (Festival Keanekaragaman Hayati Adat) di distrik Kandhamal, Odisha, India. Acara tahunan ini menyatukan petani millet, untuk berbagi pengetahuan dan praktik, termasuk pertukaran benih pusaka adat. Festival benih komunitas seperti itu sebagian besar masih kurang dihargai (dan kurang dieksplorasi).

F. Hasil dan Pembahasan

1. Potensi Wilayah Desa

Potensi wilayah Desa Pucung meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanahan dan tata ruang, serta perekonomian desa.

a. Sumberdaya Alam

Data Sumberdaya alam yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini meliputi formasi batuan, jenis tanah, Curah Hujan, Suhu Udara, Kondisi Lereng, dan Kondisi Hidrologi.

b. Sumberdaya Manusia

Data sumberdaya manusia yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini meliputi Usia Produktif, Komposisi Gender Tingkat Pendidikan Penduduk Profesi Penduduk

c. Pertanahan dan Tata Ruang

1) Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Website Pucung memperlihatkan, bahwa di Kelurahan Pucung terdapat tanah kas desa berupa tanah bengkok (tanah jabatan) seluas 760 Ha. Penguasaan tanah bengkok berada pada perangkat desa (18 orang), tetapi penggarapannya dilakukan oleh para petani yang tidak memiliki tanah (265 keluarga) dengan cara sewa. Selain itu, Website Pucung menyebutkan, bahwa ada 548 keluarga

yang memiliki tanah pertanian, dengan luas pemilikan masing-masing kurang dari 10 Ha.

2) Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Berdasarkan buku, “Kecamatan Girisubo Dalam Angka 2020,” diketahui bahwa penggunaan tanah di Kelurahan Pucung didominasi oleh penggunaan tanah pertanian non sawah, yang luasnya mencapai 961,00 Ha. Sementara itu luas tanah non pertanian sebesar 481,60 Ha, atau sebesar 33,38% dari luas wilayah Kelurahan Pucung yang mencapai 1.442,60 Ha (BPS Kabupaten Gunung Kidul, 2020:7).

Monografi Kelurahan Pucung Tahun 2020 mengkritisi data pada buku, “Kecamatan Girisubo Dalam Angka 2020,” yang tidak menyebutkan luas tanah sawah tadah hujan, sebesar 44,33 Ha. Oleh karena itu, penggunaan tanah di Kelurahan Pucung tidak lagi hanya sebatas pertanian non sawah dan non pertanian, melainkan adapula penggunaan tanah sawah (tadah hujan). Oleh karena itu, penggunaan tanah Kelurahan Pucung, terdiri dari:

- a) Sawah tadah hujan, seluas 44,33 Ha, atau 3,07%;
- b) Tegalan, seluas 138,00 Ha, atau 9,57%;
- c) Kebun campuran, seluas 600,47 Ha, atau 41,62%;
- d) Pemukiman, seluas 462,47 Ha, atau 32,06%;
- e) Fasilitas umum, seluas 197,33 Ha, atau 13,68%.

Kritik Monografi Kelurahan Pucung Tahun 2020 terhadap data pada buku, “Kecamatan Girisubo Dalam Angka 2020,” ternyata tidak mengubah dominasi penggunaan tanah pertanian non sawah di Kelurahan Pucung; melainkan mempertegas bahwa penggunaan tanah pertanian non sawah yang mendominasi adalah kebun campuran, yaitu seluas 600,47 Ha, atau 41,62%. Sementara itu

Website Pucung memperlihatkan data tentang pemanfaatan tanah, sebagai berikut:

- a) Jagung, seluas 12 Ha;
 - b) Kacang tanah, 30 Ha;
 - c) Padi sawah (tadah hujan), seluas 44,33 Ha;
 - d) Ubi kayu, seluas 15 Ha;
 - e) Kelapa, seluas 5 Ha;
 - f) Rumput gajah, seluas 13 Ha;
- 3) Pola dan Struktur Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2030 (Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 4 Tahun 2011) diketahui adanya arahan pola ruang dan arahan struktur ruang, sebagai berikut:

- a) Arahan pola ruang, berupa:
 - (1) Kawasan karst yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi;
 - (2) Kawasan terbuka hijau;
- b) Arahan struktur ruang, berupa:
 - (1) Fasilitas pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan menengah, kesehatan dan sosial untuk skala kawasan.
 - (2) Pengembangan dan peningkatan prasarana dasar perdesaan yang meliputi jalan, listrik, air minum, dan telepon.

d. Perekonomian Desa

1) Kondisi Pertanian

Kondisi pertanian di Kelurahan Pucung didominasi oleh penggunaan tanah kebun campuran, yang selanjutnya diikuti oleh tegalan, dan sawah tadah hujan, dengan urutan sebagai berikut:

- a) Kebun campuran, seluas 600,47 Ha, atau 41,62%;
- b) Tegalan, seluas 138,00 Ha, atau 9,57%;
- c) Sawah tadah hujan, seluas 44,33 Ha, atau 3,07%;

Sementara itu, pemanfaatan tanah di Kelurahan Pucung didominasi oleh pohon jati dan albasia yang ditanam di kebun campuran. Selain itu, juga ada tanaman lainnya yang dibudidayakan, seperti: padi sawah (tadah hujan), kacang tanah, ubi kayu, rumput gajah, jagung, dan kelapa, yang urutannya sebagai berikut:

- a) Jagung, seluas 12 Ha;
- b) Kacang tanah, 30 Ha;
- c) Padi sawah (tadah hujan), seluas 44,33 Ha;
- d) Ubi kayu, seluas 15 Ha;
- e) Kelapa, seluas 5 Ha;
- f) Rumput gajah, seluas 13 Ha.

Berkaitan dengan kepemilikan tanah pertanian di Kelurahan Pucung diketahui, bahwa:

- a) Jumlah keluarga petani yang memiliki tanah pertanian, sebanyak 548 keluarga;
- b) Jumlah keluarga petani yang tidak memiliki tanah pertanian, sebanyak 265 keluarga;

Secara ekonomi ternyata kondisi pertanian di Kelurahan Pucung belum mampu mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun sebagian besar masyarakat Kelurahan Pucung berprofesi sebagai petani, tetapi hasil dari profesinya sebagai petani, saat dirata-ratakan per bulannya sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Padahal kebutuhan rata-rata satu keluarga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan. Sehingga

ada kekurangan uang setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- per bulan.

Sawah di Kelurahan Pucung hanya satu kali setahun, kemudian dilanjutkan dengan kacang tanah, sedangkan ketela ditanam di ladang. Tetapi hasil pertanian utamanya yang berupa padi diketahui, bahwa padi ini tidak dijual oleh petani, melainkan hanya dikonsumsi sendiri, karena jumlahnya tidak banyak. Hasil pertanian lainnya adalah ketela, dan kacang tanah. Ketela (singkong) tidak terlalu menguntungkan, tetapi tetap ditanam oleh petani, karena mudah pemeliharaannya. Saat panen harga ketela Rp. 2.000,- per kilogram. Berbeda dengan ketela, hasil pertanian yang bagus adalah kacang tanah, yang saat panen harganya mencapai Rp. 10.000,- per kilogram. Oleh karena harga kacang tanah bagus, ada usulan agar BUMDES Sejahtera (Kelurahan Pucung) suatu saat dapat memasok langsung kacang tanah Kelurahan Pucung ke produsen kacang kemasan, misal: Garuda, atau Dua Kelinci.

Pada sisi lain, buruh tani mengalami kesulitan bekerja, karena bidang tanah pertanian yang dimiliki masyarakat berukuran kecil, sehingga tidak membutuhkan bantuan tenaga kerja. Kondisi ini pada akhirnya memaksa buruh tani, untuk mengerjakan pekerjaan lain, yang biasanya berupa kerja serabutan.

2) Kondisi Peternakan

Ketika kondisi pertanian kurang menguntungkan bagi petani, maka para petani selanjutnya melakukan kegiatan tambahan berupa peternakan, misalnya berternak sapi, kambing, atau ayam, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Jumlah peternak sapi, sebanyak 682 orang, dengan sapi sebanyak 1.023 ekor;

- b. Jumlah peternak kambing, sebanyak 731 orang, dengan kambing sebanyak 1.462 ekor;
- c. Jumlah peternak ayam, sebanyak 802 orang, dengan ayam sebanyak 4.030 ekor.

Tetapi berternak sapi dan kambing terasa berat, ketika musim kemarau, karena kesulitan mencari pakannya. Sementara itu, saat berternak ayam, yaitu ayam pedaging, pernah dilakukan kerjasama antara petani dengan perusahaan, yang menyediakan bibit ayam pedaging. Kesulitan muncul saat perusahaan yang awalnya telah berjanji akan membeli ayam pedaging yang telah besar (telah dipanen), ternyata hanya bersedia membeli ayam pedaging yang dijual petani dengan harga murah, sehingga tidak sesuai dengan biaya pakan dan perawatan ayam pedaging.

3) Kondisi Perdagangan Eceran

Perdagangan eceran di Kelurahan Pucung belum digarap secara serius, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian ada dua pihak yang berpeluang melakukan bisnis eceran di Kelurahan ini, yaitu:

- a) Pengusaha warung kelontong, sebanyak 21 orang, yang mendistribusikan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
- b) BUMDES Sejahtera, yang mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi untuk para nelayan di Pantai Sadeng.

4) Kondisi Home Industry

Home industry di Kelurahan Pucung tidak digarap dengan baik, sehingga belum mampu mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal di Kelurahan ini ada dua kegiatan yang bila dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut, yaitu:

- a) Pengolahan kayu di Kelurahan Pucung, sebanyak 4 buah, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 20 orang;
- b) Industri camilan atau makanan olahan, yang dikelola oleh ibu-ibu UPPKS Kelurahan Pucung.
- c) Industri kerajinan bambu.

5) Kondisi Industri Wisata

Kondisi industri wisata di Kelurahan Pucung belum dikelola dengan baik, padahal di Kelurahan ini terdapat obyek wisata yang menarik, yaitu:

- a) Pantai Sadeng, yang sesungguhnya berada di dua wilayah Kelurahan yaitu: Kelurahan Pucung dan Kelurahan Songbanyu;
- b) Bengawan Solo Purba, yang masih memerlukan *stop sight* yang memadai serta perlunya pelebaran jalan, agar kendaraan yang lalu lalang dapat lebih aman dan nyaman;
- c) Pantai Srakung, yang masih memerlukan pengaspalan jalan sepanjang 3 (tiga) kilometer;
- d) Pantai Ngungap, yang masih memerlukan pengaspalan jalan sepanjang 1 (satu) kilometer, serta perbaikan pendopo yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara adat Ngunduh Walet;
- e) Spot Rock Fishing Tebing Menyer, yang masih memerlukan perbaikan jalan sepanjang 5 (lima) kilometer.

2. Ketidakberdayaan dan Solusinya

a. Kompleksitas Ketidakberdayaan

1) Bidang Pertanian

Secara ekonomi, bidang pertanian di Kelurahan Pucung belum mampu mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun sebagian besar masyarakat Kelurahan Pucung berprofesi sebagai petani, tetapi hasil dari profesinya sebagai petani, saat dirata-ratakan per bulannya sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Padahal kebutuhan rata-rata satu keluarga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan. Sehingga ada kekurangan uang setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- per bulan.

Selain itu, sawah di Kelurahan Pucung hanya satu kali ditanami padi dalam setahun, yang kemudian dilanjutkan dengan menanam kacang tanah, sedangkan ketela ditanam di ladang. Tetapi hasil pertanian utamanya yang berupa padi tidak dijual oleh petani, melainkan hanya dikonsumsi sendiri, karena jumlahnya tidak banyak. Sementara itu, hasil pertanian lainnya yaitu ketela (singkong), ternyata juga tidak terlalu menguntungkan, tetapi tetap ditanam oleh petani, karena mudah pemeliharaannya. Saat panen harga ketela Rp. 2.000,- per kilogram, sehingga produknya banyak, tetapi karena harga jualnya rendah, maka penghasilan petani hanya sedikit. Berbeda dengan ketela, hasil pertanian yang bagus adalah kacang tanah, yang saat panen harganya mencapai Rp. 10.000,- per kilogram.

Kendala lainnya bagi pengembangan pertanian di Kelurahan Pucung, antara lain berupa kepemilikan tanah pertanian yang relatif sempit. Perlu diketahui, bahwa:

- a. Wilayah Kelurahan Pucung, seluas 1.442,60 Ha.
- b. Tanah Kas Kelurahan Pucung, seluas 760 Ha.

- c. Tanah masyarakat, seluas 682,6 Ha, yang dimiliki oleh 548 keluarga.
- d. Rata-rata kepemilikan tanah, sebesar 1,25 Ha, dengan kondisi topografi bergelombang, serta bahan induk pembentuk tanah berupa karst, sehingga membentuk jenis tanah grumusol.

2) Bidang Peternakan

Secara ekonomi, bidang peternakan berpeluang untuk dikembangkan, karena jumlah sapi di Kelurahan Pucung baru mencapai 1.023 ekor, sedangkan jumlah kambing sebanyak 1.462 ekor, dan jumlah ayam sebanyak 4.030 ekor. Sementara itu, luas tanam rumput gajah sebesar 13 Ha, sedangkan luas tanam jagung sebesar 12 Ha. Tetapi kesulitannya adalah keberadaan pakan ternak pada musim kemarau, yang sulit tumbuh karena ketiadaan air.

3) Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan yang dapat dikembangkan di Kelurahan Pucung adalah perdagangan eceran, yang wujudnya berupa keberadaan 21 warung kelontong. Tetapi usaha ini sulit berkembang, karena daya beli masyarakat relatif rendah, sehingga komoditi yang diperdagangkan sangat terbatas dari sisi jenis dan volumenya. Selain itu, para pedagang eceran yang jumlahnya 21 orang juga memiliki kendala dalam mengembangkan usahanya, yaitu kendala permodalan. Padahal 90% bidang tanah yang dimiliki masyarakat sudah bersertipikat hak milik atas tanah, sehingga sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk mengakses kredit (untuk peningkatan modal) dari bank.

4) Bidang Home Industry

Home industry di Kelurahan Pucung yang menonjol adalah pengolahan kayu, yang jumlahnya mencapai 4 unit usaha, dengan melibatkan 20 orang pekerja. Sementara itu, industri camilan atau makanan olahan saat ini baru dilakukan secara sampingan oleh ibu-ibu UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Kelurahan Pucung. Oleh karena itu, home industry di Kelurahan ini berpeluang dikembangkan, tetapi kendalanya terlebih dahulu harus diatasi. Kendala tersebut berupa rendahnya keterampilan yang dimiliki masyarakat, serta rendahnya kemampuan permodalan masyarakat.

5) Bidang Industri Wisata

Berkaitan dengan industri wisata, terdapat kendala yang menyulitkan masyarakat bila ingin berusaha di bidang ini, sebagai contoh:

- a) Pantai Sadeng, memiliki kendala berupa jalan yang relatif sempit sehingga membahayakan kendaraan roda empat saat berpapasan.
- b) Bengawan Solo Purba, memiliki kendala berupa ketiadaan stop sight yang memadai, karena stop sight yang ada saat ini sangat tidak memadai (sempit dan tanpa fasilitas).
- c) Pantai Srakung, memiliki kendala berupa masih diperlukannya 3 km jalan aspal, untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Srakung. Selain itu, pantai ini tidak memiliki fasilitas yang dapat membuat nyaman pengunjung, kecuali ketersediaan lahan parkir yang sangat sederhana.
- d) Pantai Ngungap, memiliki kendala berupa masih diperlukannya 1 km jalan aspal, untuk memudahkan

masyarakat mengakses Pantai Ngungap. Selain itu, pantai ini memiliki fasilitas berupa pendopo yang sudah rusak, sehingga tidak dapat membuat nyaman pengunjung, padahal pendopo ini tempat berlangsungnya upacara adat “Ngunduh Walet”, saat masyarakat akan memanen sarang burung walet di goa-goa pada tebing-tebing curam di sepanjang pantai.

- e) Spot Rock Fishing Tebing Menyer, memiliki kendala berupa masih diperlukannya penyediaan jalan aspal, untuk memudahkan masyarakat mengakses spot ini. Saat ini wisatawan (penggemar kegiatan memancing) harus berjalan kaki selama 45 menit, untuk sampai di Spot Rock Fishing Tebing Menyer.

6) Bidang Usaha Desa (BUMDES)

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan pengembangan usaha desa, khususnya BUMDES Sejahtera (Kelurahan Pucung), memiliki kendala berupa rendahnya permodalan dan terbatasnya sumberdaya manusia. Padahal meskipun saat ini BUMDES Sejahtera telah memiliki usaha sebagai penyalur BBM bersubsidi bagi nelayan di Pantai Sadeng, tetapi sesungguhnya usaha ini dapat dikembangkan dengan berperan sebagai pengepul kacang tanah petani, untuk kemudian dijual ke perusahaan pengolahan kacang tanah, seperti: Garuda dan Dua Kelinci.

b. Solusi Sosio Ekologis

1. Sasaran Solusi:

a) Bidang Pertanian

Untuk bidang pertanian, tanaman padi tetap perlu mendapat perhatian yang memadai dalam solusi sosio ekologis. Wujudnya berupa upaya

dalam mempertahankan tanaman padi yang ada, untuk dikonsumsi petani setempat, agar tidak terjadi kekurangan gizi ditingkat petani. Sementara itu, tanaman ketela pohon (singkong) perlu mendapat perlakuan berbeda, yaitu berupa pengurangan luas tanamnya, agar petani (masyarakat) tidak terlalu merugi saat harga jual ketela pohon di tingkat petani sangat rendah, yaitu Rp. 2.000,- per kg. Sebaliknya, tanaman kacang tanah perlu mendapat perhatian lebih, dengan cara meningkatkan luas tanam kacang tanah, agar dapat memperoleh manfaat secara optimal, terutama ketika harga kacang tanah cukup baik, yaitu Rp. 10.000,- per kg. Hal penting lainnya berupa perhatian terhadap albasia, yang membutuhkan perlakuan khusus sebagai “tabungan jangka menengah” (8 tahun). Untuk itu, luas tanam pohon albasia perlu ditingkatkan, agar petani (masyarakat) mendapat kesempatan panen lebih cepat daripada pohon jati. Khusus kepada pohon jati dilakukan tebang pilih, agar keberadaan pohon jati dapat lestari di wilayah Kelurahan Pucung.

b) Bidang Peternakan

Untuk bidang peternakan, masyarakat perlu disemangati agar mampu meningkatkan jumlah ternak yang dipelihara. Dengan demikian masyarakat Kelurahan Pucung perlu didorong agar tidak puas dengan jumlah ternak yang ada saat ini, yaitu 1.023 ekor sapi, 1.462 ekor kambing, dan 4.030 ekor ayam, karena: (1) Kelurahan Jepitu memiliki 1.547 ekor sapi, dan (2) Kelurahan Jerukwudel memiliki 1.855 ekor kambing.

Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap semangat dan dorongan yang diberikan, maka masyarakat perlu dibantu dalam hal: (1) mengakses modal; (2) meningkatkan luas tanam pakan ternak, seperti jagung dan rumput gajah; dan (3) mencari pasar pakan ternak baru yang harganya memadai serta pasokannya terjamin.

c) Bidang Perdagangan

Untuk bidang perdagangan, perlu upaya untuk memberi dorongan pada 21 orang pemilik warung kelontong, agar berkenan meningkatkan skala usahanya sehingga mampu memberi keuntungan berlipat baginya. Oleh karena itu, permodalan yang seringkali menjadi kendala usaha mereka perlu diatasi, dengan memberi pelatihan manajemen, yang materinya antara lain berupa akses permodalan dan pengembangan usaha.

d) Bidang Home Industry

Untuk bidang home industry, perlu tindakan inkubasi (pemiakan) kesadaran bisnis pada diri ibu-ibu yang tergabung dalam UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Kelurahan Pucung dan 4 orang pengusaha pengolahan kayu di Kelurahan ini. Kesadaran bisnis ini menjadi salah satu materi dalam “Pelatihan Manajemen dan Produksi”, sehingga mereka (ibu-ibu UPPKS dan 4 pengusaha pengolahan kayu) selain memiliki kesadaran bisnis yang tinggi, dan memiliki keterampilan dalam memproduksi barang sesuai keahlian dan bidang bisnisnya. Hal lain yang perlu difasilitasi dalam rangka memberdayakan home

industry di Kelurahan Pucung, yaitu: (1) memberi dukungan dan fasilitasi peningkatan kualitas produk, (2) memberi dukungan dan fasilitasi peningkatan permodalan, serta (3) memberi dukungan dan fasilitasi pemasaran produk.

e) Bidang Industri Wisata

Untuk bidang industri wisata, perlu upaya yang mampu mengatasi kendala pengembangan lokasi wisata, sebagai berikut:

- 1) Pantai Sadeng, melakukan pelebaran jalan, untuk memudahkan kendaraan roda empat saat berpapasan.
- 2) Bengawan Solo Purba, menyediakan stop sight yang memadai, untuk memudahkan wisatawan belajar tentang sungai purba.
- 3) Pantai Srakung, melakukan perbaikan jalan (agar beraspal) sepanjang 3 km, untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Srakung. Selain itu, di pantai ini juga perlu disediakan fasilitas wisata pantai yang memadai.
- 4) Pantai Ngungap, melakukan perbaikan jalan (agar beraspal) sepanjang 1 km, untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Ngungap. Selain itu, juga perlu dilakukan renovasi pendopo, agar dapat membuat nyaman pengunjung, dan untuk memfasilitasi upacara adat “Ngunduh Walet”, saat masyarakat akan memanen sarang burung walet di goa-goa pada tebing-tebing curam di sepanjang pantai.
- 5) Spot Rock Fishing Tebing Menyer, melakukan perbaikan jalan (agar beraspal) untuk

memudahkan masyarakat mengakses spot ini. Hal ini penting, agar wisatawan (penggemar kegiatan memancing) tidak perlu lagi berjalan kaki selama 45 menit, untuk sampai di Spot Rock Fishing Tebing Menyer.

f) Bidang Usaha Desa (BUMDES)

Bidang usaha desa tidak boleh dilupakan, karena keuntungan usaha ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan desa. Oleh karena itu, BUMDES Sejahtera perlu didorong mengembangkan kegiatan usahanya. Jika saat ini, BUMDES Sejahtera hanya memiliki usaha sebagai penyalur BBM bersubsidi bagi nelayan di Pantai Sadeng, maka usaha ini perlu dikembangkan dengan mendorong BUMDES Sejahtera berperan sebagai pengepul kacang tanah petani, untuk kemudian dijual ke perusahaan pengolahan kacang tanah kemasan, seperti: Garuda dan Dua Kelinci. Selain itu, BUMDES Sejahtera perlu distimulus agar: (1) mampu mengatasi kesulitan permodalan melalui penyertaan modal, serta (2) mampu mengatasi keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia melalui bantuan rekrutmen sumberdaya manusia dan pelatihan bisnis bagi mereka yang telah direkrut.

2. Tahapan Solusi

- a. Tahap Pertama, berupa inisiasi, yaitu memperkenalkan kegiatan yang akan dilakukan pada bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera).

- b. Tahap Kedua, berupa partisipasi, yaitu mengajak, membujuk, dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi pada kegiatan pemberdayaan yang terkait dengan bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera).
 - c. Tahap Ketiga, berupa emansipasi, yaitu mengajak, membujuk, dan mendorong masyarakat agar mempertahankan dan mengembangkan keberdayaannya dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera).
 3. Fokus Solusi
 - a. Fokus Pertama, berupa penguatan inisiatif, yaitu mendorong masyarakat agar mampu berinisiatif dalam memajukan bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera);
 - b. Fokus Kedua, berupa penguatan posisi tawar, yaitu mendorong masyarakat agar mampu menghadapi dinamika bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera);
 - c. Fokus Ketiga, berupa penguatan gerakan, yaitu mendorong masyarakat agar mampu melakukan kegiatan bersama secara massif, sistematis, dan terarah untuk memajukan bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera);
 - d. Fokus Keempat, berupa penguatan partisipasi, yaitu mendorong masyarakat agar mampu terlibat atau turut

serta secara aktif dalam kegiatan yang diminati terkait dengan bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera).

4. Tujuan Solusi

- a. Tujuan Pertama, berupa *enabling*, yaitu menciptakan suasana, situasi, atau kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera).
- b. Tujuan Kedua, berupa *empowering*, yaitu menyediakan berbagai fasilitas bagi peningkatan kemajuan bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera).
- c. Tujuan Ketiga, berupa *protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat, terutama yang terkait dengan bidang pertanian, peternakan, perdagangan, home industry, industri wisata, dan usaha desa (BUMDES Sejahtera).

5. Strategi Komunikasi Pada Solusi

- a. Solusi diterapkan dengan melakukan strategi komunikasi berupa pengembangan komunikasi, dengan cara membangun interaksi antara fasilitator pemberdayaan masyarakat dengan kepala desa, masyarakat desa, dan mitra strategis.
- b. Solusi diterapkan dengan melakukan strategi komunikasi berupa integrasi aliansi strategis, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat, kepala desa, masyarakat desa, dan mitra strategis, sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif.

- c. Solusi diterapkan dengan melakukan strategi komunikasi berupa pendekatan langsung, dengan cara menggalang kerjasama antar elemen aliansi strategis, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat, kepala desa, masyarakat desa, dan mitra strategis.
6. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Saat Penerapan Solusi
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*), agar masyarakat dapat mengakses tanahnya, sehingga dapat memperoleh pendapatan yang memadai, sebagai bagian dari penerapan solusi.
 - b. Penyediaan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat menghasilkan uang, sebagai bagian dari penerapan solusi.
 - c. Penyiapan *alternative development*, yang didukung penyelenggaraan *inclusive democracy* melalui pemilihan kepala desa yang demokratis, sehingga mendukung terwujudnya *economic growth* (pertumbuhan ekonomi), *gender equality* (kesetaraan gender), dan *intergenerational equity* (kesetaraan antar generasi), sebagai bagian dari penerapan solusi.
 - d. Terbentuknya paradigma pembangunan yang bersifat *people centered* (berpusat pada masyarakat), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan), sebagai bagian dari penerapan solusi.
7. Roadmap Solusi

Roadmap solusi disusun dengan cara memberi gambaran tentang rencana rinci suatu kegiatan yang berkelanjutan

dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu, roadmap solusi disusun dengan memperhatikan empat hal utama, yaitu: apa, siapa, kapan, dan di mana. Secara rinci, roadmap solusi berbentuk tabel, yang kolomnya terdiri dari program/kegiatan, output, tahapan kerja, waktu pelaksanaan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran, penanggungjawab, dan lokasi pelaksanaan.

G. Kesimpulan

1. Format ketidak-berdayaan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul nampak pada kondisi, sebagai berikut:
 - a. Secara ekonomi, bidang pertanian di Kelurahan Pucung belum mampu mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun sebagian besar masyarakat Kelurahan Pucung berprofesi sebagai petani, tetapi hasil dari profesinya sebagai petani, saat dirata-ratakan per bulannya sangat kecil, yaitu sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Padahal kebutuhan rata-rata satu keluarga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.
 - b. Sementara itu, bila pemberdayaan masyarakat dilakukan pada sektor pertanian, perlu diketahui bahwa pemilikan tanah pertanian di Kelurahan ini relatif sempit, dan tanah yang tersedia adalah tanah pertanian non sawah;
 - c. Bila pemberdayaan masyarakat dilakukan pada sektor peternakan (misal: sapi, kambing, dan ayam), perlu diketahui bahwa pakan ternak kerap kali tidak tersedia secara memadai saat musim kemarau;
 - d. Bila pemberdayaan masyarakat dilakukan pada sektor perdagangan, perlu diketahui bahwa daya beli masyarakat relatif rendah, sehingga komoditi yang diperdagangkan akan terbatas jenis dan volumenya;

- e. Bila pemberdayaan masyarakat dilakukan pada sektor produksi atau industri rumah tangga, perlu diketahui bahwa keterampilan yang dimiliki masyarakat relatif rendah, dan kemampuan permodalannya lemah;
 - f. Bila pemberdayaan masyarakat dilakukan pada sektor pariwisata, perlu diketahui bahwa infrastruktur yang tersedia sangat minim, sehingga kurang mampu menimbulkan ketertarikan wisatawan pada objek-objek wisata yang ditawarkan;
 - g. Bila pemberdayaan masyarakat dilakukan pada sektor usaha desa, misalnya BUMDES, khususnya BUMDES Sejahtera, perlu diketahui bahwa permodalan dan sumberdaya yang tersedia sangat terbatas.
2. Format pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, sebagai berikut:
- a. Oleh karena adanya kompleksitas ketidak-berdayaan masyarakat Kelurahan Pucung, maka solusi yang ditawarkan harus secara simultan mengurai kompleksitas ketidak-berdayaan tersebut.
 - b. Solusi tersebut berupa solusi sosio-ekologis, yang secara substantif berisi:
 - (1) Sasaran Solusi;
 - (2) Tahapan Solusi;
 - (3) Fokus Solusi;
 - (4) Tujuan Solusi;
 - (5) Strategi Komunikasi;
 - (6) Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat;
 - (7) Roadmap Solusi.

H. Rekomendasi

1. Solusi sosio ekologis diterapkan dengan melibatkan multi pihak terkait, sehingga dibutuhkan kemampuan koordinatif, dan kesediaan para pihak berkoordinasi, untuk menghasilkan sinergitas kinerja.
2. Untuk menghasilkan sinergitas kinerja perlu dilakukan pertemuan awal dan pertemuan lanjutan pendahuluan, untuk membangun chemistry dan keterpaduan gerak langkah antar para pihak.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, Muhammad Ilham 2015, *Accessreform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, (Disertasi), Universitas Airlangga, Surabaya.
- Azwar, Saifuddin 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Banerjee, Abhijit; Paul J. Gertler; dan Maitreesh Ghatak 1998, *Empowerment and Efficiency: The Economics of Agrarian Reform*, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
- BPS Kabupaten Gunung Kidul 2020, "Kecamatan Girisubo Dalam Angka 2020."
- Cavalier, Irene Correa; dan Helena Neves Almeida 2018, 'Power, Empowerment and Social Participation: the Building of a Conceptual Model', *European Journal of Social Science Education and Research*, vol. 5, no. 1, April 2018, hh. 174-185.
- Hutagalung, Arie Sukanti 1985, *Program Reditribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ilmugeografi.com. 2015, "Tanah Grumusol: Pengertian, Karakteristik, Jenis, dan Pemanfaatan."

- Indrawati, Oka 2016, 'Genesis Tanah Banjar Batuan Pada Formasi Wuni dan Wonosari Punung di Girisubo, Gunung Kidul.' *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Isnaeni, Diyan 2017, 'Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, no. 4, Oktober 2017, hh. 308-317.
- Jacobs, Peter; Tim Hart; Shirin Motala; dan Charles Nhemaehena 2013, *"Agrarian Reform and Poverty Reduction in South Africa."* HSRC (Human Sciences Research Council).
- Kariuki, Samuel 2009, *'Agrarian Reform, Rural Development and Governance in Africa: A case of Eastern and Southern Africa'*, Centre for Policy Studies, Johannesburg (South Africa).
- Kementerian PAN-RB 2011, "Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi."
- Limbong, Bernhard 2012a, "Konflik Pertanahan." Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Limbong, Bernhard. 2012b. "Reforma Agraria." Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Mediatataruang.com 2016, "Program Legalisasi Asset BPN-RI." www.mediatataruang.com.
- Moleong, Lexy J 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, Noeng 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.) 2013, *Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah Di Desa Karanganyar*, STPN Press, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*, Gramasurya, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P 1983, *Landreform di Indonesia*, STIKI, Ujungpandang.

- Sari, Defi Mustika 2016, *Roadmap Pengembangan Industri Andalan Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Rangka Mengurangi Disparitas Pendapatan*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
- Saxena, Lopamudra Patnaik 2020, 'Community Self Organisation from a Social Ecological Perspective: Burlang Yatra and Revival of Millets in Odisha, India', *Sustainability Journal*, vol. 12, no. 1867, 2020, hh. 1-27.
- Santoso, Urip 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- Stokols, Daniel; Raul P. Lejano; dan John Hipp 2012, 'Enhancing the Resilience of Human Environment Systems: A Social Ecological Perspective', *School of Social Ecology*, University of California, California.
- Soemardjono, Maria S.W 2012, "Penyempurnaan UUPA Dan Sinkronisasi Kebijakan." *Kompas.com* tanggal 9 Oktober 2012.
- Utarini, Adi 2016, 'Proses Penyusunan *Roadmap* Riset di FK-KMK UGM', Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

KONSEP PEMBANGUNAN DESA BERBASIS POTENSI WILAYAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL (Studi Kasus di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo)

Priyo Katon Prasetyo, Ardi Ananto, Tunjung Fitra Wijanarko

A. Pendahuluan

Kalurahan Jepitu, secara geologis adalah bagian dari jajaran pegunungan karst Gunungsewu yang membentang di selatan Jawa bagian tengah. Kawasan pegunungan karst ini, secara administratif menjadi milik tiga provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wilayah DIY sendiri, mendapatkan porsi besar kawasan karst ini, di bagian yang secara administratif masuk Kabupaten Gunung Kidul. Kawasan karst Gunungsewu sendiri, di Gunung Kidul menjadi bagian yang sangat mendominasi bentangan lahannya, dengan luasan sekitar 798,38 km² atau sebesar 53,70% dari total luas Kabupaten.

Bentangan perbukitan karst yang di banyak titik langsung bertemu dengan laut, menjadikan keuntungan alamiah bagi Gunung Kidul. Pantai-pantai dengan karakteristik seperti ini lambat laun menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Selain pantai, terdapat berbagai potensi wisata unggulan yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul, seperti goa-goa dengan lanskap yang sangat menarik (Goa Pindul dan Goa Jomblang adalah contoh yang menarik), berbagai air terjun dengan pemandangan yang unik, dan berbagai lembah karst dengan *view* menarik, yang menjadi konsekuensi logis dari lekukan-lekukan kontur perbukitan Gunungsewu.

Lanskap perbukitan karst dan pantai yang menarik di Gunung Kidul, menjadi keberuntungan pula bagi Kapanewon Girisubo, wilayah paling ujung (tenggara) Kabupaten seribu bukit ini, khususnya

di Kalurahan Jepitu, satu di antara delapan Kalurahan di Kapanewon Girisubo. Kalurahan Jepitu ini, memiliki satu di antara deretan wisata pantai populer di Gunung Kidul, yaitu Pantai Wediombo. Jepitu juga memiliki beberapa pantai lain yang berpotensi untuk “di-upgrade” levelnya dalam dunia wisata alam: Pantai Jungwok, Pantai Sedahan, Pantai Greweng, Pantai Sinden dan Pantai Dadapan.

Potensi lain dari desa ini berupa sumber air bawah tanah yang bisa dimanfaatkan untuk mem-*boost* sektor pertanian dan perkebunan setempat yang dalam kondisi tertentu berpeluang untuk kekurangan air. Lahan pertanian dan perkebunan itu sendiri, apabila ditangani dengan tepat, menjanjikan potensi ekonomi yang menarik, pun dengan perlakuan tertentu juga bisa menjadi daya tarik bagi “turis dari kota” yang terkenal haus hiburan bernuansa alami.

Jepitu juga memiliki kekayaan alam yang sangat menjanjikan dalam dunia wisata berwujud pulau-pulau karang berukuran kecil namun secara visual sangat menarik, pun memiliki tantangan berupa jembatan penghubung kecil antara pantai dengan pulau tersebut. Jepitu memiliki tiga pantai dengan tipe seperti itu yakni Pulau Kalong/Pulau Gelatik (karena menjadi sarang kelelawar dan burung gelatik), Pulau Jungwok, dan Pulau Watusigar. Pulau Kalong adalah yang terbesar di antara ketiganya dan memiliki jembatan yang menghubungkannya dengan Pantai Sinden.

Jepitu, dilihat dari potensi yang dimiliki, menampilkan potensi diri sebagai desa yang memiliki prospek bagus, dengan pengelolaan yang tepat dan tetap menjaga kualitas alam, karena kualitas alam inilah katalisator bagi progresi positif sekaligus menjadi penopang bagi kualitas hidup bagi warganya.

B. Kondisi Umum dan Sistem Pemerintahan Desa

1. Kondisi Umum Desa & Pembagian Administratif

Kalurahan Jepitu, dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit, ditambah dengan sebagian besar wilayahnya yang minim air

permukaan, maka sebagai dampaknya adalah terpusatnya penduduk yang terpusat di sisi utara desa, dan membawa konsekuensi tertentu bagi pembagian administratifnya.

Secara administratif, Jepitu dibagi menjadi sepuluh padukuhan:

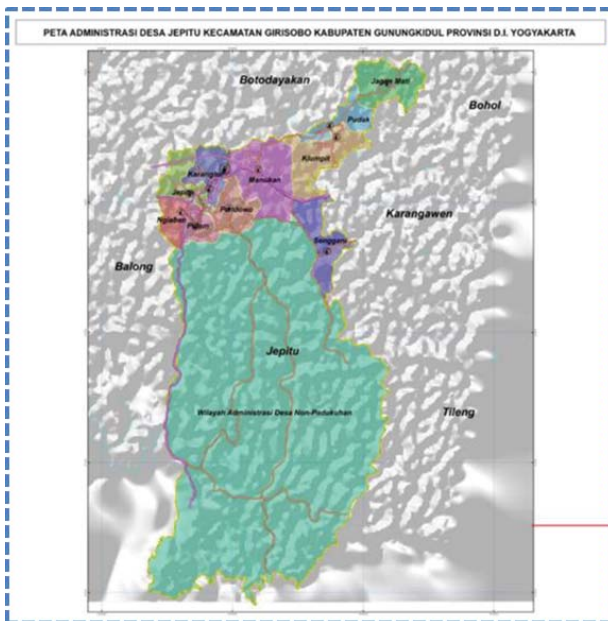
1. Padukuhan Janganmati
2. Padukuhan Pelem
3. Padukuhan Puduk
4. Padukuhan Jepitu
5. Padukuhan Klumpit
6. Padukuhan Manukan
7. Padukuhan Karanglor
8. Padukuhan Nglaban
9. Padukuhan Pendowo
10. Padukuhan Senggani

Jepitu seperti terlihat dengan jelas pada peta, memiliki keunikan tersendiri dalam pembagian administrasinya. Desa di tengah perbukitan karst ini, selain memiliki sepuluh padukuhan, juga memiliki bagian desa yang disebut dengan istilah “blok”. Blok-blok yang terbentang dari pantai selatan hingga tengah desa ini bukanlah bagian dari padukuhan, namun justru meliputi sekitar 70% dari keseluruhan wilayah desa. Blok-blok ini tidak dimasukkan dalam wilayah padukuhan karena ketiadaan penduduk di dalamnya, dan disebabkan daya dukung lain yang minim. Kini, di dalam wilayah yang disebut blok tersebut terdapat bangunan-bangunan semi permanen dan permanen, termasuk sebuah masjid yang cukup bagus, seiring dengan beranjaknya wisata pantai di Jepitu. Namun demikian, secara administratif, blok-blok tersebut tetaplah berstatus “tanpa penghuni”.

Padukuhan-padukuhan yang ada di Jepitu, semuanya terletak di sisi utara desa, karena di tempat itulah yang oleh warga dirasakan sebagai kawasan yang “layak huni”. Faktor lain adalah adanya jaringan

jalan antar wilayah yang melewati lokasi-lokasi yang kemudian menjadi padukuhan-padukuhan.

Pemerintah desa, memiliki rencana untuk memasukkan blok-blok tersebut ke dalam padukuhan-padukuhan, namun demikian upaya ini menemui kesulitan. Faktor utamanya tentu adalah ketiadaan “warga” di lokasi-lokasi tersebut, dan juga terlalu luasnya wilayah blok-blok sehingga belum bisa ditentukan untuk dimasukkan ke dalam padukuhan mana saja. Keterpencilan lokasi menyebabkan adanya kesulitan-kesulitan tertentu untuk menghuni blok-blok tersebut, seandainya ada yang berminat, meskipun kini sudah terdapat sumber daya listrik, yang khususnya dimanfaatkan untuk kepentingan wisata di pantai. Namun demikian, apabila dilihat secara ekologis, justru ketiadaan penduduk bisa memiliki dampak positif bagi kelestarian lingkungan, karena terjaganya alam setempat dari eksplorasi berlebih.

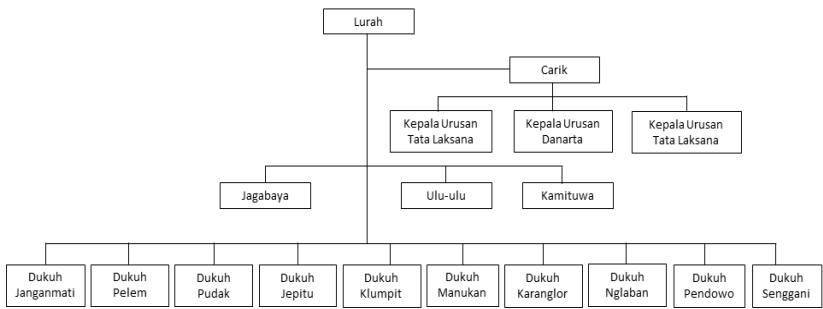


Gambar 1. Peta administratif Kalurahan Jepitu.

2. Sistem Pemerintahan Desa

Sebagaimana pemerintahan desa pada lazimnya, Jepitu memiliki lembaga formal desa yang merupakan pengeawantahan dari asas otonomi desa yang dianut oleh desa-desa di Indonesia. Pemerintah Kalurahan Jepitu sendiri, terdiri atas: Lurah (Kepala Desa); Carik (Sekretaris Desa), yang membawahkan tiga Kepala Urusan beserta staf-stafnya: Kepala Urusan Urusan Danarta (keuangan), Kepala Urusan Pangripta (perencanaan dan evaluasi), Kepala Urusan Tata Laksana (tata usaha); Pamong Teknis, yang di Yogya disebut sebagai Jagabaya (bidang pemerintahan, keamanan, urusan keistimewaan terkait tanah dan penataan ruang), Ulu-ulu (perekonomian, kebudayaan, dan urusan keistimewaan terkait kebudayaan) dan Kamituwa (sosial kemasyarakatan); dan Pamong Kewilayahan yakni sepuluh orang Kepala Padukuhan.

Tabel 1. Bagan Organisasi Pemerintahan Desa.



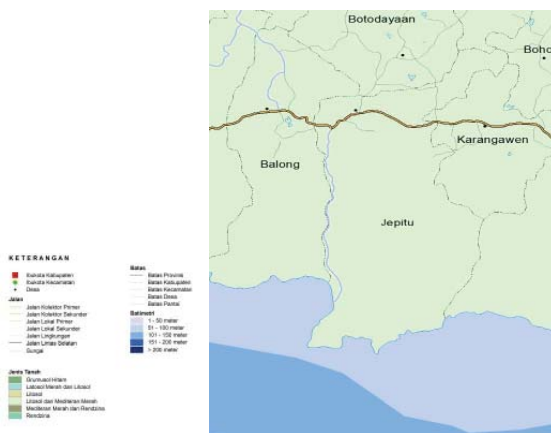
C. Potensi Alam di Jepitu

1. Formasi Batuan

Kalurahan Jepitu, wilayahnya termasuk dalam satuan Pegunungan Sewu yang merupakan kawasan perbukitan batu gamping yang termasuk dalam bentangan bebatuan karst yang cenderung tandus dan kekurangan air (air tanah permukaan/air tanah dangkal).

Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panjang, Ponjong Selatan, Semanu Selatan. Jepitu yang merupakan bagian dari Kapanewon Girisubo, termasuk kawasan yang permukaannya didominasi oleh perbukitan karst ini.²

Jenis tanah di Jepitu, sama dengan jenis yang terdapat di kawasan pegunungan karst Gunungsewu, yakni litosol³ dan mediteranian merah.⁴



Gambar 3. Jenis tanah di Jepitu. Sumber: materi teknis RTRW Kabupaten Gunung Kidul 2010-2030.

² https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1501229675Bab_4_Profil_Kabupaten_Kab_Gkidul.pdf

³ Tanah mediteran atau tanah alfisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan beku yang berkapur yang banyak mengandung karbonat. Tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. Tanah mediteran banyak terdapat pada dasar-dasar dolina dan merupakan tanah pertanian yang subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur yang lainnya.

Sumber: <https://www.pengertianilmu.com/2015/08/pengertian-tanah-mediterran.html>

⁴ Litosol: Tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari batuan beku yang berasal dari proses meletusnya gunung berapi (baca: penyebab meletusnya gunung berapi) dan juga sedimen keras dengan proses pelapukan kimia (dengan menggunakan bantuan organisme hidup) dan fisika (dengan bantuan sinar matahari dan hujan) yang belum sempurna. Dan hal ini tentu membuat struktur asal batuan induknya masih terlihat. dan hal ini pula yang menyebabkan bahwa tanah litosol disebut juga dengan tanah yang paling muda, sehingga bahan induknya dangkal dan sangat sering terlihat di permukaan sebagai batuan padat yang padu. Tanah litosol ini merupakan jenis tanah yang belum lama mengalami pelapukan dan sama sekali belum mengalami perkembangan. Sumber: <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-litosol>

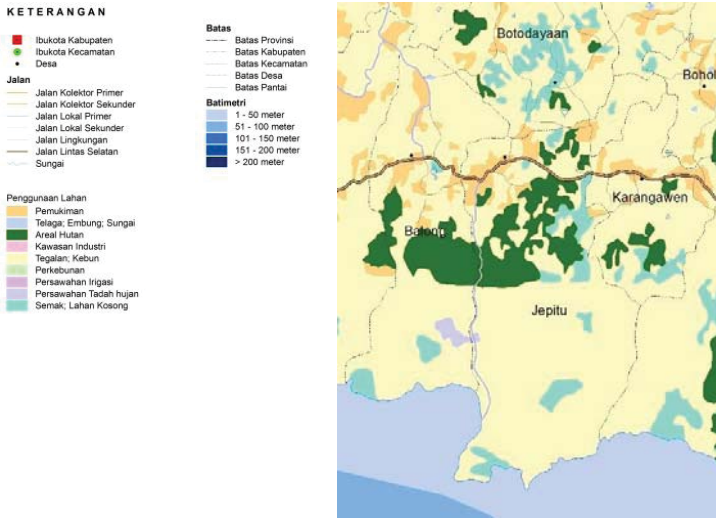
3. Sebaran Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kalurahan Jepitu, didominasi oleh lahan pertanian tadah hujan, perkebunan (tegalan), serta tanah belukar. Secara umum, penggunaan lahan di Jepitu adalah sebagai berikut:

1. Tanah belukar. Jenis tanah ini terutama terdapat di bagian desa yang tidak masuk wilayah administratif yang tidak termasuk padukuhan (disebut dengan "blok"). Tanah-tanah "blok" ini berada di sisi tengah desa hingga pantai selatan. Luas lahan belukar ini mencapai 1029,1 hektar atau (kurang lebih 60%-an dari luas Jepitu).
2. Tanah pekarangan yang letaknya di padukuhan-padukuhan. Lahan pekarangan ini fungsi utamanya sebagai pemukiman warga. Luas lahan pekarangan ini mencapai 78 hektar.
3. Tanah tegalan berujud lahan kering, dengan pengairan mengandalkan tadah hujan. Pemanfaatannya adalah untuk lahan pertanian. Fungsi lainnya dari tegalan ini adalah sebagai tempat ditanamnya Hijauan Makanan Ternak (HMT), yang hasilnya digunakan sebagai pakan bagi sapi dan kambing milik warga. Luasan lahan tanah tegalan di Jepitu yakni 108,5 hektar.
4. Pasir darat. Pasir darat ini adalah pasir yang letaknya bukan di pantai, melainkan terletak di "pedalaman". Luas lahan pasir darat ini sendiri tidak begitu luas, yakni 4,3 hektar.
5. Lahan kosong. Disebut lahan kosong karena berisi tanah berumput yang pemanfaatannya masih belum jelas. Luas lahan kosong ini mencapai 4,1 hektar.
6. Sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan, yang biasanya ditanami dengan padi gogo, luasnya mencapai 420,8 hektar, atau sekitar 25% dari keseluruhan luas desa.

Selain kategorisasi secara geografis, terdapat pula jenis lahan yang penggolongannya secara administratif.

1. Pertama adalah tanah kas desa, yang sangat lazim dimiliki oleh setiap desa di mana pun di Indonesia. Jepitu sendiri memiliki tanah kas desa seluas 196,9 hektar, yang diperuntukkan bagi bermacam kegiatan. Tanah kas desa Jepitu, umumnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, di bagian yang kurang produktif untuk lahan pertanian, sebagian darinya ditanami pohon jabon, akasia, dan jati. Tanah kas desa Jepitu juga dimanfaatkan untuk pembagunan fasilitas-fasilitas umum (pasar, sekolah, puskesmas, dan lain-lain).
2. Kedua adalah Tanah AB, yang merupakan tanah negara. Tanah AB di Jepitu sudah mendapatkan izin pengelolaan dari Bupati Gunung Kidul dalam skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Di Kalurahan Jepitu, tanah AB yang sudah mendapatkan izin kelola seluas 60 hektar, dan yang yang belum mendapatkan izin pengelolaan seluas 22 hektar.
3. Ketiga adalah Sultan Ground (SG). Tanah SG di Jepitu utamanya berada di pinggir pantai, dengan luas keseluruhannya 40,7 hektar. Pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat setempat, biasanya terkait pariwisata, serta sebagian lainnya digunakan untuk pertanian.



Gambar 4. Jenis tanah di Jepitu. Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gunung Kidul 2010-2030.

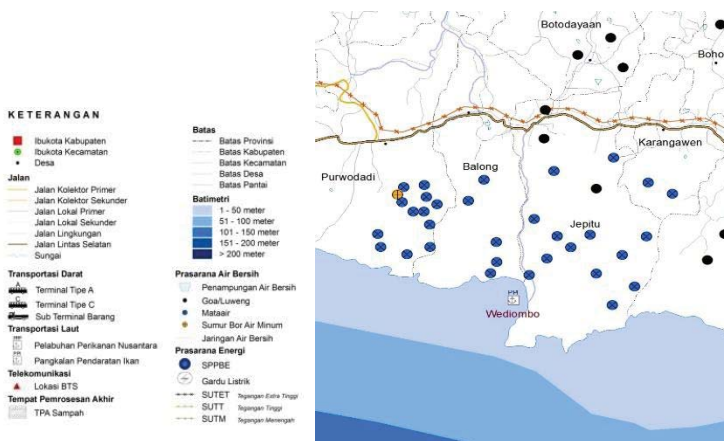
4. Kondisi Hidrologi

Jepitu memiliki sumber-sumber air bawah tanah yang terdapat di goa-goa dengan aliran air di dalamnya. Sumber-sumber air ini adalah salah satu aset sangat berharga yang ke depannya dieksplorasi, agar air yang terkandung di dalamnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, perkebunan maupun keperluan sehari-hari. Apabila eksplorasi air bawah tanah ini data digali dengan sebaik-baiknya, maka dapat menjadi obat mujarab kebutuhan air bersih yang diperlukan warga. Salah satu sumber mata air bawah tanah yang sudah berhasil dieksplorasi adalah di Goa Pulejajar, yang menurut rencana akan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan pertanian sekaligus kebutuhan sehari-hari bagi warga Jepitu .

Masyarakat memanfaatkan aliran air dari sungai bawah tanah di dalam Goa Pulejajar dengan menggunakan sistem pengangkatan air bawah tanah. Air kemudian dinaikkan dari dalam goa menuju mulut goa, kemudian ditampung di tempat penampungan air. Debit aliran air yang bisa dicapai adalah 4 liter/detik. Kini, sistem eksplorasi air ini

menjadi solusi bagi sumber pengairan untuk kepentingan pertanian dan ternak warga.

Namun demikian, adanya potensi sumber daya air yang melimpah ini menyisakan permasalahan yang cukup serius: bagaimana “mengangkat” air dari bawah tanah ke permukaan? “Bagaimana” terkait problematika air ini berhubungan dengan dua hal: teknologi dan biaya. Persoalan terkait teknologi, seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap warga Gunung Kidul, sudah mulai bisa diatasi dengan baik. Diinisiasi oleh eksplorasi yang diikuti dengan eksploitasi air dari Goa Bribin di sekitar 2008 dan selanjutnya, menyusul kemudian usaha-usaha pemanfaatan air dari deposit-deposit air bawah tanah Gunung Kidul. Bisa dilihat, bahwa teknologi bukanlah masalah yang sangat sulit untuk diatasi, terlebih dengan arus bantuan terkait teknologi yang masuk ke Gunung Kidul.



Gambar 5. Jenis tanah di Jepitu. Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gunung Kidul 2010-2030.

5. Pola Ruang Jepitu

Menurut RTRW Kabupaten Gunung Kidul 2011-2031, pola ruang di Jepitu terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung. Pasal 31 menyatakan: Rencana penetapan kawasan suaka alam, pelestarian

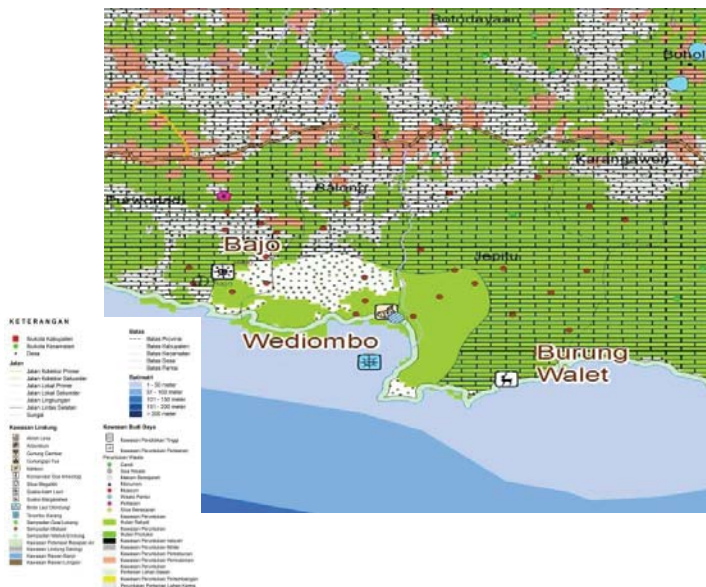
alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a.
- b.
- c. kawasan suaka margasatwa meliputi:
 1. kawasan suaka margasatwa burung walet meliputi:
 - a) Desa Giripurwo dan Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari;
 - b) Desa Girikarto Kecamatan Panggang; dan
 - c) Desa Pucung, Desa Songbanyu dan **Desa Jepitu**, Kecamatan Girisubo.

Selain kawasan suaka margasatwa, Jepitu memiliki kawasan lindung setempat berupa sempadan goa, sempadan mata air, dan sempadan pantai. Dibanding sempadan goa dan sempadan pantai, sempadan mata air justru memiliki luas yang paling besar, mencapai 160 hektar. Namun demikian, belum dapat informasi lebih lanjut mengapa sempadan mata air memiliki luasan yang besar, mengingat di Jepitu beberapa sumber air terdapat di bawah tanah. Hipotesisnya, sempadan-sempadan yang luas ini adalah tanah-tanah yang secara sengaja luasnya ditentukan agar memiliki lebar tertentu (luas) untuk melindungi secara optimal sumber daya air tersebut dari pemanfaatan-pemanfaatan tertentu yang kontraproduktif dari fungsinya selaku penyuplai air bagi warga. Termasuk bagi sumber air yang berada di bawah tanah, sempadan berada di tanah-tanah di atasnya, agar tidak dimanfaatkan untuk keperluan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tersebut.

Sedangkan kawasan budidaya yang ada, terdiri dari kawasan pertanian, kawasan hutan rakyat, dan kawasan permukiman. Kawasan permukiman, seluruhnya terletak di sisi utara desa, sedangkan kawasan hutan rakyat dan kawasan pertanian tersebar di sebagian besar wilayah desa, dengan porsi besar di kawasan-kawasan yang

tidak termasuk wilayah administratif padukuhan (kawasan blok-blok).



Gambar 6. Pola ruang di Jepitu. Sumber: RTRW Kab. Gunung Kidul 2010-2030.

D. Potensi Sumberdaya Buatan di Jepitu

1. Jenis dan Jumlah Sumberdaya Buatan

Belumlah terlalu lama Jepitu memiliki sumber daya buatan yang benar benar memberikan manfaat bagi warga, berupa pompa air yang berguna untuk mengeluarkan air tanah yang melimpah ruah di bawah tanah. Jepitu, sebagaimana diketahui memiliki Kali Puring, sebuah sungai yang mengalir di bawah tanah, sebagaimana lazimnya kawasan karst. kali Puring ini, pada satu titik memiliki celah berwujud goa, yang oleh masyarakat dinamai Goa Pulejajar.

Goa Pulejajar inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai jalur pipa untuk menyedot air dari aliran Kali Puring, melalui pipa sepanjang lebih dari 150 meter km menuju tempat penampungan air.

Dampak dari keberadaan pompa air ini sangatlah signifikan, karena di masa-masa tertentu, warga sangat terbantu dengan keberadaan air bersih yang kini bisa langsung digunakan tanpa harus bersusah payah memperolehnya.

Aliran air dari sungai bawah tanah ini, mencapai debit 56 liter/detik di saat musim kering yang paling kering, dan kini telah menjadi sebagian solusi bagi permasalahan kebutuhan air masyarakat di sekitar goa dengan jumlah kurang lebih 1500 KK, terutama untuk keperluan pertanian dan ternak.

Pengangkatan air dari dalam goa ini, dilakukan oleh masyarakat Jepitu dengan bantuan dari pihak-pihak lain (Pemda Gunung Kidul dan TNI AD). Dapat dikatakan pula sebagai salah satu bentuk kemandirian masyarakat dalam membangun desanya. Potensi aliran sungai bawah tanah ini sendiri, adalah salah satu alternatif solusi masalah kekurangan air bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan progresi dalam kehidupannya. Potensi seperti ini seharusnya dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pegunungan karst.

Hal yang perlu digarispawahi dengan adanya potensi sumber air ini adalah perlunya eksplorasi terhadap potensi air yang ada, penelitian lebih lanjut terhadap hasil yang didapat, dan membuat perencanaan yang disesuaikan potensi dan kebutuhan, serta implementasi eksploitasi air secara bertanggungjawab demi menjaga *sustainability* yang baik bagi lingkungan alami.

2. Manfaat Langsung dan Manfaat Ekonomi dari Sumberdaya Buatan yang Ada

Sumberdaya buatan yang dirasakan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalurahan Jepitu adalah pompa air yang menyedot dan mengalirkan air dari sumber air bawah tanah berupa aliran Kali Puring, yang pengambilannya melalui lobang Goa Pulejajar.

Air dari bawah tanah ini disedot dan dialirkan atas upaya swadaya masyarakat dengan bantuan dari Kodim 0730 Gunung Kidul, SAR DIY dan pihak-pihak lainnya. Aliran air dari sumber air bawah tanah inilah pemutus rantai kesulitan air yang dialami warga di waktu-waktu tertentu (biasanya di musim kemarau). Manfaat langsungnya adalah warga berpotensi menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari (mandi, memasak, dan kebutuhan harian lainnya).

Manfaat ekonomi yang muncul, adalah keberadaan air ini memberikan “nafas” bagi sektor pertanian di Jepitu. Meskipun karena kontur alamnya, sehingga keberadaan irigasi teknis masih sulit untuk diwujudkan, namun kejelasan suplai air dari Kali Puring sangatlah jelas perannya, menjadi pemasok air yang bisa diandalkan bagi kebutuhan pertanian dan perkebunan.

3. Potensi Sumber Daya Manusia

Tahun 2018, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Jepitu adalah sebanyak 1153 Kepala keluarga, naik dari tahun 2017 (1142 KK) dan tahun 2016 (1131 KK).

Tabel 2. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Laki-laki	Wanita
1	Janganmati	2	49	134	69	65
2	Jepitu	8	236	670	330	340
3	Karanglor	6	193	576	292	284
4	Klumprit	5	101	324	156	168
5	Manukan	6	199	630	306	324
6	Nglaban	6	245	742	372	370
7	Pelem	5	104	324	162	162
8	Pendowo	6	213	627	316	311
9	Pudak	5	100	298	143	155
10	Senggani	4	78	265	135	130
	Total	53	1518	4590	2281	2309

Sumber: website Kalurahan Jepitu

Tabel 3. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Wanita	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	985	21.46%	438	9.54%	547	11.92%
2	Tamat SD/Sederajat	1684	36.69%	833	18.15%	851	18.54%
3	Belum tamat SD/ Sederajat	485	10.57%	245	5.34%	240	5.23%
4	SLTP/Sederajat	825	17.97%	461	10.04%	364	7.93%
5	SLTA/Sederajat	602	13.12%	302	6.58%	300	6.54%
6	Diploma I/II	5	0.11%	3	0.07%	2	0.04%
7	Diploma III/ Akademi/S. Muda	23	0.50%	10	0.22%	13	0.28%
8	S1/Diloma IV	44	0.96%	22	0.48%	22	0.48%
9	S2	3	0.07%	2	0.04%	1	0.02%
10	S3	1	0.02%	0	0.00%	1	0.02%
	Total	4590	100%	2281	49.69%	2309	50.31%

Sumber: website Kalurahan Jepitu

Tabel 4. Pembagian Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah		Laki-laki		Wanita	
		n	%	n	%	n	%
1	Pertanian/Perkebunan	2435	53.05%	1132	24.66%	1303	28.39%
2	Belum/Tidak Bekerja	619	13.49%	314	6.84%	305	6.64%
3	Pelajar/Mahasiswa	535	11.66%	289	6.30%	246	5.36%
4	Pekerja Harian Lepas	347	7.56%	209	4.55%	138	3.01%
5	Karyawan Swasta	231	5.03%	158	3.44%	73	1.59%
6	Wiraswasta	183	3.99%	114	2.48%	69	1.50%
7	Pengurus Rumah Tangga	155	3.38%	0	0.00	155	3.38%
8	Pekerja (Buruh) Pertanian/Perkebunan	52	1.13%	24	0.52%	28	0.61%
9	PNS/ASN	27	0.59%	18	0.39%	9	0,20%

10	Perangkat Desa	21	0.46%	20	0.44%	1	0.02%
11	Pensiunan	16	0.35%	15	0.33%	1	0.02%
12	Sopir	7	0.15%	7	0.15%	0	0.00%
13	Karyawan Honorer	6	0.13%	5	0.11%	1	0.02%
14	Guru	5	0.11%	1	0.02%	4	0.09%
15	Karyawan BUMN	4	0.09%	1	0.02%	3	0.07%
16	Asisten Rumah Tangga	2	0.04%	0	0.00%	2	0.04%
17	Pedagang	2	0.04%	1	0.02%	1	0.02%
18	Anggota Polri	2	0.04%	2	0.04%	0	0,00%
19	Penjahit	1	0.02%	1	0,02%	0	0,00%
20	Dosen	1	0.02%	1	0,02%	0	0,00%
21	Anggota TNI	1	0.02%	1	0,02%	0	0,00%
22	Pendeta	1	0.02%	0	0,00%	1	0,02%
23	Pekerja Transportasi	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
24	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1	0,02%	0	0,00%	1	0,002%
25	Kepala Desa	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
26	Tukang Sol Sepatu						
	Total	4590	100%	2281	49.69%	2309	50.31%

Sumber: website Kalurahan Jepitu

E. Potensi Perekonomian Desa

1. Potensi Hutan

Potensi hasil hutan di Jepitu sebagian besar adalah dari Kayu Jati (*Tectona Grandis*) dan Akasia (*Acacia Penninervis*). Keduanya adalah kayu dengan nilai jual tinggi, terutama pohon jati. Pohon kayu lain yang dibudidayakan adalah Sengon Laut (*Paraserianthes Falcataria*) dan Jabon (*Neolamarckia Cadamba*), karena masyarakat melihat prospek yang baik dari kayu jenis ini. Pembudidayaan pohon kayu-kayu di Jepitu, didukung oleh luasnya lahan perbukitan, yang sejauh ini di atasnya hanya berupa semak belukar dan sebagian besar belum dimanfaatkan oleh warga. Lingkungan alami ini juga menjadi faktor penting akan banyaknya pohon kayu yang tumbuh secara alami. Pepohonan kayu

keras ini, selain memberikan kontribusi secara ekonomi (profit), juga memberikan dampak positif bagi kelestarian alam.

Tabel 5. Jenis dan luas hutan di Kalurahan Jepitu

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)*
1	Suaka Margasatwa	belum terdapat informasi
2	Taman Hutan Rakyat	-
3	Hutan Produksi	-
4	Hutan Pendidikan	-
5	Hutan Lindung	-
5	Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan izin kelola.	66,2
6	Hutan Tanaman Rakyat (HTR) belum ada izin kelola	20
7	Hutan Tanaman Rakyat (HTR) (belum ada keterangan sudah ada izin kelola/belum ada izin kelola)	5,7

Keterangan: *estimasi

2. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Jepitu, dengan dominasi bebatuan karstnya dan tanah lempung di permukaan, membuat pilihan di bidang cocok tanam menjadi lebih “terbatas” pada jenis-jenis tanaman tertentu. Tentunya, tanaman-tanaman yang menjadi “favorit” ialah tanaman yang sanggup untuk bertumbuh dengan baik di tanah lempung di perbukitan karst, dengan keterbatasan-keterbatasan ekologis bagi proses tumbuh kembangnya. Pun demikian bisa “menghasilkan”, baik berupa umbi, buah, daun maupun bagian tanaman lain yang bisa dimanfaatkan.

Sejauh ini, tanaman yang bisa tumbuh dengan baik di Jepitu adalah tanaman palawija, diantaranya umbi kayu (cassava), jagung, garut (sejenis umbi berserat tinggi berwarna putih), kacang tanah, dan padi ladang atau lebih akrab disebut sebagai “padi gogo”.

Dilihat dari luasnya lahan yang dimiliki, Jepitu memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian. Desa ini memiliki kurang lebih lima ratus tiga puluh (530) hektar lahan yang dimanfaatkan untuk sektor pertanian, dan masih ada “sisa” hingga kurang lebih tiga ratus (300) hektar lagi yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Namun, ada dua kendala utama yang hingga kini membatasi berkembang pesatnya pertanian (dan perkebunan), yakni sumber air dan jenis tanah. Keduanya adalah kendala alamiah, yang memerlukan solusi tertentu agar pemanfaatannya bisa dioptimalkan bagi kepentingan pertanian (dan perkebunan).

Ke depannya, diharapkan komoditas-komoditas inilah yang bisa terus di-*push* baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, yang sebagai dampaknya kemudian diharapkan adalah adanya pergerakan ekonomi dengan tren positif di Kalurahan Jepitu. Sekaligus bisa menjadi semacam komodita trade mark bagi Jepitu dan Girisubo khususnya, dan Gunung Kidul pada umumnya.

3. Potensi Peternakan

Dilihat secara kuantitas, budidaya ternak di Jepitu, apabila dikalkulasi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Peternakan di Jepitu, dengan demikian memiliki potensi menjanjikan secara hitungan bisnis. Namun di lapangan, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai penopang perekonomian masyarakat Jepitu. Masyarakat Jepitu yang beternak, pada umumnya memilih sapi dan kambing sebagai hewan yang mereka ternakkan.

Bagi masyarakat Jepitu, hewan ternak, khususnya sapi dan kambing tidak atau belum diperlakukan sebagai komoditas ekonomi utama. Sapi dan kambing, bagi masyarakat Jepitu lebih bersifat sebagai “*rajakaya*”. *Rajakaya* ini adalah konsep pemikiran yang nampaknya secara umum dianut oleh masyarakat di Gunung Kidul, khususnya di Jepitu. Konsep *rajakaya* ini, secara sederhana dapat dijelaskan, yakni kepemilikan terhadap sesuatu yang memang dimaksudkan

sebagai suatu barang yang berharga bagi diri dan/atau keluarga, serta dipandang berharga dalam lingkungan sosial, namun kepemilikan ini tidak untuk dijadikan sebagai komoditas bisnis. Singkatnya: “yang penting punya”. Demikian pula, semakin banyak ternak yang dimiliki, semakin baik artinya bagi si empunya. Landasan pemikiran seperti itulah yang membuat jumlah sapi dan kambing di Jepitu dikategorikan sebagai “banyak” dari sisi jumlah, namun perputaran uang dari jual beli hewan ternak ini belumlah berbanding lurus dengan potensinya. Konsep hewan ternak sebagai rajakaya yang dianut warga Jepitu ini sesuai sebagaimana dituturkan oleh seorang warga Jepitu (Bapak SY):

“[...] Menawi ternak, kula alhamdulillah gadhah sapi pitu. Ning nggih mboten disade, kanggeh aset keluarga mawon. Menawi misal wonten betah napa niku, nggih disade. [...]”

([...] Kalau ternak, saya punya sapi tujuh. Tapi tidak (untuk) dijual, untuk aset keluarga saja. Apabila misal ada kebutuhan apa begitu, ya dijual. [...])

Jepitu sendiri memiliki sebuah pasar ternak yang buka pada hari hari tertentu, biasanya ditentukan dengan penanggalan Jawa (sistem pasaran). Disayangkan, ketika penelitian ini berlangsung, masih berada dalam situasi PPKM Level 4, sehingga kegiatan yang memicu keramaian sama sekali dilarang, dengan demikian belum dapat dilihat seluk beluk perdagangan hewan ternak di Jepitu.



Gambar 7. Pasar hewan di Kalurahan Jepitu

Ternak di Jepitu, mendapat “pasokan” makanan dari limbah pertanian yang cukup melimpah. Potensi sumber Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang juga cukup melimpah pada musim penghujan. Pasokan yang banyak ini mendorong masyarakat Jepitu hingga mampu memelihara rata-rata tiga sampai empat ekor sapi, masih ditambah dengan lima hingga sepuluh ekor kambing per Kepala Keluarga.

Peternakan, selain sebagai *rajakaya*, bagi masyarakat Jepitu hingga kini lebih bersifat sebagai *supporting* bagi sektor pertanian, yakni kotorannya yang digunakan sebagai pupuk. Secara tidak langsung, hal ini sebenarnya juga memberikan manfaat ekonomi tertentu bagi warga Jepitu, yakni adanya penghematan biaya dibandingkan apabila harus membeli pupuk dari pihak lain, yang berarti adalah penambahan pengeluaran secara cukup signifikan.

Tabel 6. Jumlah hewan ternak di Kalurahan Jepitu.

No	Jenis Ternak	Jumlah (Estimasi)
1	Sapi	2100
2	Kambing	4200
3	Ayam	950
4	Itik	-
5	Domba	-

Sumber: monografi Kalurahan Jepitu.

4. Potensi Wisata



Sumber: <https://jogja.idntimes.com/travel/destination/putriana-cahya/yogyakarta-rasa-bali-11-potret-pulau-kalong-ini-eksotis-abis-regional-jogja>, <https://visitingjogja.com/30423/pantai-pulau-kalong-pulau-hijau-eksotis-yang-menantang-adrenalin>

Gambar 8 & 9. Pulau Gelatik/Pulau Kalong. Salah satu objek wisata prospektif di Jepitu.

Jepitu memiliki tiga pulau Pulau Gelatik alias Pulau Kalong, Pulau Jungwok, dan Pulau Watusigar. Pulau Gelatik adalah yang paling menjanjikan dari ketiganya. Ia memiliki karakteristik hampir sama dengan Pulau Timang di Kapanewon Tepus yang sudah terlebih dulu terkenal. Pulau gelatik ini juga sudah memiliki jembatan gantung, yang menjadi sensasi tersendiri apabila dijual sebagai suatu daya tarik wisata.

Target wisatawannya bisa siapa saja, namun diutamakan yang memiliki kepedulian terhadap alam, karena seperti diketahui, masyarakat Indonesia masih memiliki budaya membuang sampah yang kurang baik. Kekhawatirannya adalah, apabila objek wisata seperti Pulau Gelatik ini terlalu “diobral” sehingga siapa pun bisa datang, akan berdampak pada kekotoran di sekelilingnya. Sebagai solusi, di Pulau Gelatik ini sudah diterapkan sistem yang kurang lebih mirip dilakukan di Goa Jomblang (Kapanewon Playen), yang mana untuk menuruni goa harus melalui *effort* yang cukup keras, dengan tarif yang cukup tinggi dan pembatasan pengunjung. Adanya tarif yang tinggi di satu sisi akan menimbulkan “keceburuan” bagi yang merasa keberatan, namun di sisi lain ini menjadi solusi bagi kualitas lingkungan. Selain itu, tarif yang tidak murah akan menutup (bahkan justru bisa berlebih, sebagaimana dalam kasus Goa Jomblang, yang untuk memasukinya dikenakan biaya sangat tinggi) kekurangan pemasukan, sebagai konsekuensi dari jumlah pengunjung yang terbatas.



Gambar 10. Pemandangan dari atas Pantai Wediombo.

F. Strategi Pembangunan Wilayah

Menengok sejenak satu dasawarsa dan selebihnya ke belakang, Jepitu bukanlah nama yang dikenal banyak orang, bahkan bagi “orang

lokal” Yogyakarta. Lebih ekstrim lagi, Jepitu mungkin dianggap hanyalah sepotong perbukitan karst yang “tidak menghasilkan”. Ditambah dengan posisinya yang ujung dan jauh dari pusat gravitasi Yogyakarta –pun dari pusat kabupaten, jaraknya masih relatif jauh-, dengan kontribusi perekonomian yang minim, maka dianggap jamak jika Jepitu (dan desa-desa lainnya di kawasan tersebut) dianggap sebagai semacam tempat yang kontribusinya kurang bagi daerah. Puluhan tahun kawasan karst selatan Jawa ini menderita stigmatisasi sebagai daerah minus, menjadi beban bagi daerah, ditambah dengan posisinya yang seperti terisolasi dari tempat lain dengan kehidupan “lebih mapan”.

1. Pertanian & Perkebunan

Potensi sektor pertanian di Kalurahan Jepitu tergolong kecil, meskipun memiliki lahan yang sangat luas. Hal ini berkaitan dengan jenis tanah yang tergolong tidak subur dan ketergantungan dengan musim penghujan untuk bercocok tanah khususnya tanaman padi, untuk tanah sawah tanah hujan dapat ditanami padi dalam satu tahun sekali, kemudian dilanjutkan dengan palawija (kacang dan jagung). Pendampingan oleh dinas pertanian selama ini sudah dilakukan dan langsung ke kelompok tani hal ini yang disampaikan oleh Pak Lurah:

“Pendampingan dari dinas (kurang koordinasi dengan desa) ada program langsung ke kelompok tani”, hal ini menurut peneliti yang harus diperbaiki (koordinasi dengan desa),”

Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang sudah terjadi misalnya di jelaskan oleh Lurah Jepitu: “misal pengeboran air bawah tanah tanpa koordinasi tetapi tidak selesai”, hal ini adalah salah satu contoh kekurangan koordinasi yang menyebabkan suatu kegiatan tidak selesai dalam kasus pengeboran ini disebabkan aliran listrik yang belum memadai dan besarnya biaya yang kurang sebanding dengan pasokan air yang akan diterima.

Potensi pertanian yang ada di Jepitu memang hanya menghasilkan padi gogo untuk setahun sekali dengan tanaman kacang dan singkong, untuk produksi kacang mungkin bisa juga dilakukan dengan kerjasama seperti apa yang dilakukan di Padukuhan Kanigoro tentunya dengan studi tentang kemampuan tanah yang lebih mendalam apakah memungkinkan dilakukan seperti apa yang dilakukan di Padukuhan Kanigoro.

2. Peternakan

Potensi peternakan yang ada di Jepitu adalah peternakan kambing, dengan konsentrasi di Padukuhan Manukan (kambing) dan Padukuhan Nglaban (kambing). Ternak menjadi *supporting system* bagi warga yang berladang, sebagai sumber pupuk hewani. Peternakan yang ada di Jepitu masih sangat mungkin dikembangkan, misalkan peternakan kambing diarahkan ke peternakan kambing etawa agar dapat dimanfaatkan susunya untuk menambah penghasilan dan nutrisi keluarga. Hal ini memungkinkan di karenakan kebiasaan yang ada di masyarakat yang sudah memiliki tradisi untuk beternak dan biaya akan lebih kecil daripada beternak sapi. Walaupun bila sapi sangat bermanfaat untuk pupuk tetapi membutuhkan tempat dan biaya yang lebih besar. Akan tetapi yang menjadi point utamanya adalah pemanfaatan pupuk kandang yang sangat memadai. Sapi-sapi tersebut dimanfaatkan pupuknya setahun dua kali. Artinya, Petani harus mempunyai dua ekor sapi, menurut peneliti ini hal ini agak berat diimplementasikan, maka pilihan pengembangan potensi perternakan pada peternakan kambing dengan kualitas yang bagus (kambing etawa).

3. Perikanan

Potensi perikanan yang ada di Jepitu cukup baik hal itu tidak terlepas dengan adanya sarana untuk memasarkan hasil tangkapan yaitu adanya tempat pariwisata yang ada di Pantai Wediombo, Pantai

Jungwok, Pantai Sedahan, Pantai Greweng dan Pantai Dadapan. Adanya tempat yang dapat menampung hasil perikanan, maka hasil tangkapan laut dapat langsung terserap. Sebelum adanya pandemi, kunjungan wisata di Pantai Wediombo tergolong tinggi, tangkapan perikanan laut pada waktu musim ikan juga relatif tinggi, mencapai 1 kwintal per perahu. Terkait pemasaran “pemasaran di tempat wisata”, artinya produksi perikanan laut masih bisa di tampung di tempat pariwisata. Oleh sebab itu perlu peningkatan produksi dengan alat produksi berupa kapal dengan kapasitas yang lebih besar, karena bila membeli kapal sendiri menurut salah satu informan, harga kapal bekas masih mahal sekitar 50 juta rupiah, permodalan ini bisa diusahakan dengan pemanfaatan sertifikat tanah untuk diagunkan karena selama ini yang melakukan pemberian permodalan untuk produksi dari Dinas Kelautan maupun lembaga lain.

4. Pariwisata & Bumdes

Potensi pariwisata yang ada di Desa jepitu menurut peneliti merupakan potensi yang sudah tampak tetapi masih bisa di tingkatkan, hal itu tidak terlepas dengan adanya potensi-potensi pariwisata terutama dengan adanya pantai-pantai lain selain Pantai Wediombo yang sudah dahulu dikenal (hal itu di dukung oleh banyaknya kunjungan wisatawan sebelum pandemi yang cukup tinggi) ada beberapa pantai di desa jepitu antara lain Pantai Jungwok, Pantai Sedahan, Pantai Greweng dan Pantai Dadapan. Pengembangan potensi pariwisata tetap harus terkait dengan keberadaan pantai Wediombo sebagai *hub* dan pantai yang lain sebagai pendukung, untuk menghubungkannya diperlukan sarana transportasi lokal dengan kendaraan kecil seperti *jeep* dan lainnya yang dapat mencapai pantai pantai selain wediombo, jadi bus pariwisata tetap parkir di Pantai Wediombo, akan tetapi wisatawan tetap bisa mengunjungi pantai pantai yang lain dengan transportasi lokal, tentunya pendampingan

dalam kegiatan ini dari Dinas Pariwisata dan bumdes serta organisasi kepemudaan lokal.

Pengembangan dengan model seperti ini akan turut memicu berkembangnya bumdes, di mana bumdes melakukan kegiatan dengan menyediakan sarana bagi wisatawan. Selain itu, dengan banyaknya sumber mata air serta perbukitan karst, bumdes bisa juga mengembangkan wisata edukasi.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan sementara yang bisa diambil, Kalurahan jepitu memiliki potensi di bidang pariwisata yang sangat menjanjikan, ditunjang dengan keberadaan 3 buah pulau mini (Pulai Gelatik/ Pulau Kelelawar, Pulau Watusigar, dan Pula Jungwok). Berkaca dari keberadaan Pulau Timang di Kapanewon Tepus yang terbukti bisa mendongkrak popularitas wisata, maka metode yang sama bisa diterapkan di Jepitu.

Selain pariwisata, Jepitu memiliki prospek sangat menjanjikan di bidang pertanian dan perkebunan. Tanah “gersang” karst yang dimiliki, dengan “suntikan” pengetahuan yang cukup dari *stakeholder* yang kompeten di bidangnya, justru akan menjadi lahan yang baik bagi komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan tertentu. Kini, dengan keberadaan sumber air dari Kali Puring yang sudah bisa diangkat, maka satu permasalahan krusial terkait air sudah menemukan titik terang. Hal yang perlu dipikirkan adalah, bagaimana mencapai kualitas dan kuantitas optimal dari komoditas-komoditas tersebut, serta bagaimana mengangkat “harkat” dari komoditas-komoditas yang dihasilkan, sehingga bisa terserap dengan baik di pasaran.

2. Saran/Usulan Kebijakan

Pariwisata, jelas menjadi salah satu aktor utama yang sanggup mendongkrak “martabat” Kalurahan Jepitu, dan hal ini sudah terbukti

berhasil di tempat-tempat lain di Gunung Kidul. Namun demikian, karena masih berada dalam masa pandemi Covid 19, pada masa sekarang sektor pariwisata ini masih sulit apabila akan dijadikan “gacoan” dalam rencana dan strategi pengembangan potensi desa. Rencana progresi yang realistis adalah dengan melakukan dorongan secara optimal pada bidang pertanian dan perkebunan, di mana sektor ini dalam kondisi dan masa apapun, dengan rancangan dan implementasi yang baik, akan terus sanggup menjalankan perannya sebagai sokoguru kuat bagi kehidupan masyarakat Jepitu. Pun dalam jangka panjang, dengan dukungan lahan yang relatif luas dan didukung dengan pengairan serta teknologi pertanian yang sesuai dengan lahan karst, akan menjadikan Jepitu terus berada dalam alur progresi yang baik.

Daftar Pustaka

- Kusumaningrum, Ambarwati, 2009, Pengembangan Obyek Wisata Pantai Wediombo Sebagai Daya Tarik Wisata di Kabupaten Gunungkidul, Tugas Akhir, Prodi DIII Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Rif'an, Achmafd Andi, 2018. 'Daya Tarik Wisata Pantai Wediombo Sebagai Alternatif Wisata Bahari Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Geografi*, Vol. 10 No.1, hlm, 63-73, Universitas Negeri Medan, Medan.
- Panjaitan, Theresia; Wijaya Saputra, Suradi; Rudyanti, Siti, 2019, 'Valuasi Ekonomi Objek Wisata Pantai Wediombo Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Dengan Pendekatan *Travel Cost*', *Jurnal Maquares*, Vol. 8, No. 3, Magister Sumber Daya Perairan, Departemen Sumberdaya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang,

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2011, Materi Teknis
RTRW Kabupaten Gunung Kidul 2010-2030.